



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 dan 392 bahwa *“Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah, dan memuat paling sedikit informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan”*. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan

Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPD Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan selama Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 yaitu antara lain untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;



- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 disu berdasarkan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2020 Nomor 34, Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 27);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 62);
- t. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 26);
- u. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56);
- v. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 33);

1.3. Informasi Umum tentang Pemerintah Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan mempunyai Motto “**Gawi Hatantiring**” atau “**Bekerja Bersama-sama**”, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung



Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.

Kuala Pembuang adalah Ibukota, Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekenomian dari Kabupaten Seruyan, yang pada awalnya merupakan Kelurahan sebelum dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Kuala Pembuang Satu dan Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Pemerintahan di Kuala Pembuang sangat unik karena tidak diatur oleh satu pemerintahan tunggal melainkan setiap lurah mengatur kelurahannya masing-masing. Kuala pembuang, selain menjadi ibukota kabupaten, juga menjadi ibukota dari Kecamatan Seruyan Hilir.

1.3.1 Sejarah Singkat Kabupaten Seruyan

a. Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*”

1) SEBELUM TAHUN 1880

Wilayah Seruyan terdiri atas 13 kampung yang waktu itu disebut “*Shoofd*” di mana Pejabat Pemerintahannya disebut “Asisten Kiai” sedangkan kedudukan pemerintahannya berada di Sampit. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Beratih (sekarang Kuala Pembuang), Kampung Telaga Pulang, Kampung Sembuluh, Kampung Pembuang Hulu, Kampung Asam, Kampung Durian Kait, Kampung Sandul, Kampung Sukamandang, Kampung Rantau Pulut, Kampung Tumbang Kale, Kampung Tumbang Manjul, Kampung Sepundu Hantu, dan Kampung Tumbang Darap.

2) TAHUN 1880

Karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kampung-kampung tersebut, maka ditempatkan Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibu Kota Telaga Pulang.

3) TAHUN 1902

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” yang kala itu dengan Ibukota di Telaga Pulang pindah ke Pembuang Hulu.

4) TAHUN 1905

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibukota dipindahkan ke Kuala Pembuang, karena letaknya di pesisir selatan maka dianggap strategis terutama dari segi perhubungan dan perekonomian serta pemerintahan saat itu.

b. Pemerintahan Kecamatan Seruyan

1) TAHUN 1946

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” diubah menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan Ibu Kota Pemerintahannya di Kuala Pembuang.

2) TAHUN 1947

Pada tahun ini Wilayah Kecamatan Seruyan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu terdiri dari :

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Barat.
- b. Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibu Kota Rantau Pulut dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Utara.



Wilayah Seruyan kala itu termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebelum terbentuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1957) dan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin (sebelum terbagi menjadi dua Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).

3) TAHUN 1958

Wilayah Kecamatan Seruyan Hulu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- b. Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Pembuang Hulu.

4) TAHUN 1961

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- b. Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.

5) TAHUN 1963

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- b. Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.

c. Pemerintahan Kewedanaan Seruyan

Dengan semakin pesatnya perkembangan pemekaran kecamatan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 06/Pem.330-c-2-3/1963, tanggal 1 Juni 1963 tentang Penetapan Kewedanaan Seruyan. Kewedanaan Seruyan membawahi 5 (lima) wilayah kecamatan dengan Ibukota Kuala Pembuang. Di antara 5 (lima) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- 2) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.
- 3) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.
- 4) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- 5) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Tumbang Manjul.

d. Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan

Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan terbentuk berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979, tanggal 28 April 1979 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kapuas untuk Wilayah Gunung Mas, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Katingan, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan, Pembantu Bupati Barito Utara



untuk Wilayah Murung Raya, Pembantu Bupati Barito Selatan untuk Wilayah Barito Timur.

- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 148/KPTS/1979, tanggal 18 Juni 1979 tentang Penghapusan Status Wilayah dan Kantor Daerah Tingkat II Administratif Gunung Mas, Katingan, Murung Raya dan Barito Timur serta Status Wilayah dan Kantor Persiapan Daerah Tingkat II Seruyan.
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 247/KPTS/1980, tanggal 02 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan.

Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubup) Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang.

e. Pemerintahan Kabupaten Seruyan

Pemerintahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Ibukota Kabupaten Seruyan berada di Kuala Pembuang yang termasuk dalam Kecamatan Seruyan Hilir.

1.3.2 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Nama-nama Bupati yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| a) Drs. H. Loper H. Anggus (Pj. Bupati) | : | Periode 2002-2003 |
| b) DR. (HC). H. Darwan Ali | : | Periode 2003-2008 |
| c) DR. (HC). H. Darwan Ali | : | Periode 2008-2013 |
| d) Sudarsono, S.H. | : | Periode 2013-2018 |
| e) Yulhaidir | : | Periode 2018-2023 |

Nama-nama Wakil Bupati yang menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut.

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| a) H. Rasyidi Harun | : | Periode 2003-2008 |
| b) Ir. H. Tarwidi Tamasaputra | : | Periode 2008-2013 |
| c) Yulhaidir | : | Periode 2013-2018 |
| d) Hj. Iswanti S.E., M.M. | : | Periode 2018-2023 |

Dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintah maupun Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan



tersebut dimaksud dilaksanakan oleh SPKD dan Kecamatan yang terdiri atas 19 (Sembilan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 2 (dua) Sekretariat, 10 (sepuluh) Kecamatan dan 1 (satu) Inspektorat.

1.3.3 Letak Geografis

Kabupaten Seruyan memiliki bentuk wilayah yang memanjang, mengikuti aliran Sungai Seruyan yang panjangnya mencapai 350 km, dengan Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan ibukota kabupaten terletak dibagian hilir Sungai Seruyan. Hal ini menyebabkan rata-rata jarak dari ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Seruyan cukup jauh, yakni sekitar 281,4 km. Kabupaten ini terletak pada posisi astronomi antara 00 77' Lintang Selatan dan 30 56' Lintang Selatan dan antara 1110 49' Bujur Timur dan 1120 84' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Kabupaten Melawi di sebelah Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat di sebelah barat. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa, menyebabkan Kabupaten Seruyan memiliki iklim tropis yang diisi oleh musim hujan dan musim kemarau secara bergantian. Meski demikian, indikator cuaca seperti curah hujan dan hari hujan memiliki nilai yang cukup bervariasi antar kecamatan. Seruyan Hilir memiliki curah hujan dan hari hujan yang relatif lebih rendah dan pendek dibandingkan wilayah lain yang terletak jauh dari pesisir laut, misalnya daerah Danau Seluluk dan sekitarnya.

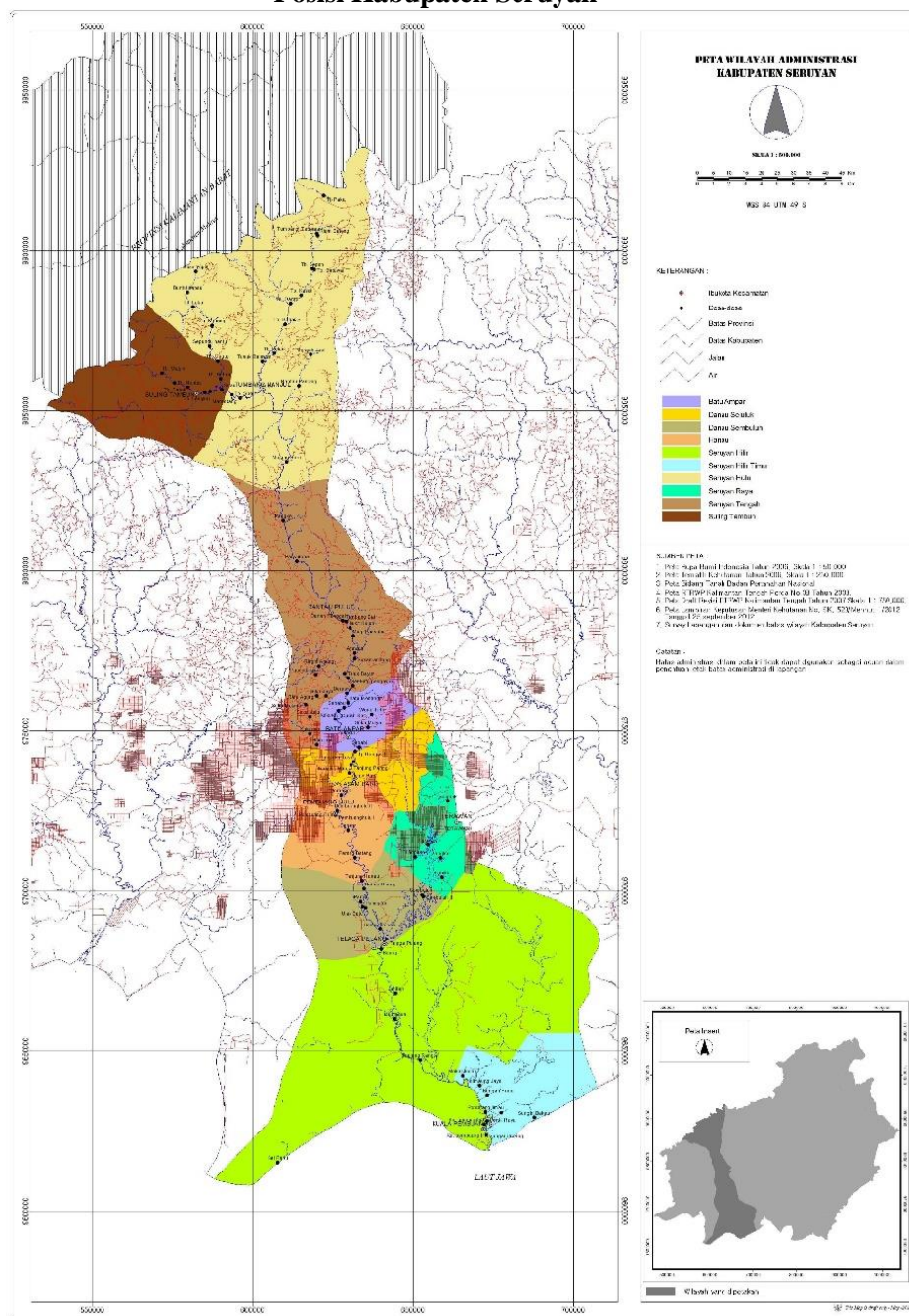
Tabel 1.1
Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Seruyan, Tahun 2022

Uraian	Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)
Luas	Km ²	16404
Panjang Sungai	Km ²	350
Jarak dari kecamatan terjauh ke ibukota Kabupaten	Km ²	514
Curah Hujan Tertinggi	mm	753

Sumber : Publikasi Seruyan Dalam Angka 2022



Gambar 1.1
Posisi Kabupaten Seruyan



Dilihat dari topografinya, lahan di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki kemiringan lereng datar hingga berbukit. yaitu dengan kemiringan lereng berkisar antara 0%-60%. Lahan dengan topografi datar (kelas lereng 2%), berombak (kelas lereng 2%-8%), hingga bergelombang (kelas lereng 9%-15%) umumnya terdapat di bagian selatan wilayah Kabupaten Seruyan dan wilayah yang dekat pinggir sungai. Lahan dengan topografi berbukit kecil (kelas lereng 16%-25%) umumnya dijumpai di bagian tengah Kabupaten Seruyan, sedangkan lahan dengan topografi berbukit (kelas lereng >40%) pada umumnya dijumpai di bagian Utara wilayah Kabupaten Seruyan, yaitu merupakan daerah limitasi untuk pengembangan.



1.3.4 Demografi

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan. Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2022 Secara umum, Kabupaten Seruyan didominasi oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia 15-64 tahun, dengan komposisi terbesar berada pada usia 30 – 34 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa baik mayoritas penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, didominasi oleh kelompok umur 30 – 34 tahun. Tingginya proporsi penduduk usia produktif akan membantu menekan angka dependency ratio, yaitu indikator makro yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Dependency Rasio Kabupaten Seruyan pada tahun 2021 mencapai 42 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif (berada di rentang usia 15-64 tahun) memiliki tanggungan ekonomi terhadap 42 penduduk non produktif. Profil penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari nilai sex ratio/rasio jenis kelamin (RJK). RJK di Kabupaten Seruyan sebesar 112 persen, yang berarti bahwa jumlah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan kurang lebih dapat digambarkan melalui rasio sebesar 112 : 100. Kemudian untuk profil sebaran penduduk, sebagian besar berkumpul di Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan ibukota Kabupaten Seruyan. Sedangkan Kecamatan Suling Tambun yang merupakan kecamatan terjauh dari ibukota, ditempati hanya sekitar 1,64 persen penduduk.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan letak geografi dan struktur demografi yang demikian Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada SKPD meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi:
 - 1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 6) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 1) Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 2) Dinas Perikanan



- c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - 1) Sekretarian Daerah
- d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Unsur Kewilayahan
 - 1) Kecamatan Seruyan Hilir;
 - 2) Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - 3) Kecamatan Danau Sembuluh;
 - 4) Kecamatan Seruyan Raya;
 - 5) Kecamatan Danau Seluluk;
 - 6) Kecamatan Hanau;
 - 7) Kecamatan Batu Ampar;
 - 8) Kecamatan Seruyan Tengah;
 - 9) Kecamatan Seruyan Hulu;
 - 10) Kecamatan Suling Tambun.

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan oleh PPKD. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD;

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;



Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis Pengakuan dan pengukuran unsur yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan SAL
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event)

Bab VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,43 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,96 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,29 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,24
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,01%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,99 (Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit)
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp.10.808,8 Milyar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Seruyan (%)	7,43	7,22	2,91
2	Kabupaten Seruyan (Ribu Orang)	15,51	15,07	2,92
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,28	5,16	2,33
4	Nasional (%)	9,57	9,71	-1,44
5	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	-
6	Peringkat Nasional	387	380	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan pada Tahun 2022 sebesar 7,43% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 7,22% dan diharapkan pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga dibawah angka 5%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus menjadi prioritas program kegiatan yang dapat memberikan dampak untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan	1,25	1,12	11,61
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,91	0,71	28,17
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	-	1,29	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	2	1	-
5	Peringkat Nasional	-	343	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Seruyan	0,36	0,25	44
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,27	0,15	80
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	-	0,31	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	2	2	-
5	Peringkat Nasional	-	331	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari :

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah sebesar 3,96%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan (%)	3,96	4,25	-6,82
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,26	4,53	-5,96
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	-	6,49	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	7	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Seruyan Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,96%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,25% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Demikian pula jika dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah maka TPT Kabupaten Seruyan lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,26% pada Tahun 2022 dan sebesar 4,53% pada Tahun 2021. Berdasarkan data tersebut yang menyajikan nilai TPT Kabupaten Seruyan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa program kegiatan yang berhubungan dengan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 telah mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari



suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan yang pada Tahun 2022 hanya merilis data Gini Ratio tingkat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 0,319 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Seruyan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	0,292	0,262	11,45
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	0,319	0,323	-1,24
3	Tingkat Nasional	-	0,384	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	10	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah sebesar 68,24 poin dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	68,24	67,67	0,57



No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun (%)
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	71,63	71,25	0,38
3	Tingkat Nasional	72,91	72,29	0,62
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	14	14	-
5	Peringkat Nasional	388	352	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Seruyan

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah sebesar 68,24 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 67,67 poin mengalami kenaikan sebesar 0,57 poin. Peningkatan IPM tersebut antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan umur harapan hidup saat lahir (AHH) atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar rupiah)	5.908,3	6.033,6	10.808,8	102.294,5	11.118.868,5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,23	2,12	4,01	3,40	5,34
3	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	7	12	-	16	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	386	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan periode Tahun 2018 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan sebesar 5,36% dan pada Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan baru tercapai sebesar 4,01% telah meningkat



cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 2,12% namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,36%.

Dampak pandemi *Covid-19* dan pemulihan terhadap perekonomian daerah khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan antara Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 terhadap lapangan usaha mana saja yang mengalami penurunan atau kenaikan sebagai indikator hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Seruyan.

Tabel Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di wilayah Kabupaten Seruyan :

Tabel 2.8
Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Wilayah Kabupaten Seruyan (miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2021	2022	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3697584.6	4121202.0	2243813.0	2336480.9
2	Pertambangan dan Penggalian*	56594.8	60262.4	36844.0	37948.9
3	Industri Pengolahan	3184541.3	3449753.9	1916121.1	1992639.5
4	Pengadaan Listrik dan Gas*	1631.5	1694.1	1056.9	1068.8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1575.2	1528.2	982.7	911.2
6	Konstruksi	835462.3	888946.5	498814.1	520705.5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	578256.2	636884.8	362470.3	385885.1
8	Transportasi dan Pergudangan	216459.4	232213.2	132567.1	135715.0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108335.8	115630.2	67092.0	69824.6
10	Informasi dan Komunikasi	71699.9	73894.9	52360.3	53710.0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	95568.2	104440.8	68085.8	69063.1
12	Real Estat	148699.4	160460.6	101776.4	105390.0
13	Jasa Perusahaan*	920.3	1003.7	580.0	605.8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*	336545.7	367376.1	227795.1	235975.7
15	Jasa Pendidikan	336785.5	359803.5	194257.4	195727.0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146886.7	155176.3	84823.3	87506.9
17	Jasa lainnya	72519.7	78440.6	44116.8	46207.8



No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2021	2022	2021	2022
	PDRB	9890066.3	10808711.8	6033556.4	6275365.8

Sumber : BPS Kabupaten Seruyan

Krisis yang dipicu oleh pandemi *Covid-19* mempengaruhi hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya sektor kesehatan. Selain itu krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan efek selanjutnya yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia dengan ancaman resesi ekonomi di beberapa negara. Berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi dan krisis ekonomi di berbagai sektor. Upaya pemulihan di sektor ekonomi pada wilayah Kabupaten Seruyan berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha dari BPS Kabupaten Seruyan terdapat 1 (satu) lapangan usaha dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha menurut PDRB yang berpotensi terdampak signifikan yaitu : pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sedangkan 16 (enam belas) lapangan usaha menurut PDRB lainnya telah mengalami peningkatan yang positif dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan. Kondisi tenaga kerja di pada sektor ini menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi program dan kegiatan yang efektif untuk upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja terhadap ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Seruyan.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Seruyan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Data inflasi Tahun 2022 melalui sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan pada 90 Kota se Indonesia, untuk Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Kotamadya Palangkaraya dengan nilai inflasi sebesar 6,51 dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai inflasi sebesar 5,99. Berdasarkan kondisi wilayah geografis Kabupaten Seruyan yang berbatasan langsung dengan



wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dapat digunakan sebagai data acuan untuk inflasi Kabupaten Seruyan menggunakan data dari inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 5,99. Nilai tersebut termasuk kategori inflasi rendah dengan nilai persentase inflasi kurang dari 10%, sehingga kenaikan harga barang dan jasa masih dapat dikendalikan melalui instrument kebijakan harga dan distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Seruyan.

Keberhasilan dalam menjaga nilai inflasi tetap rendah dan terkendali tidak lepas dari peran dan kolaborasi yang baik Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Seruyan yang terdiri unsur Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Koramil Seruyan, Polres Seruyan, Kejaksaan Negeri Seruyan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan dan secara rutin melaksanakan kegiatan rapat koordinasi setiap minggu secara hybrid bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi di Wilayah Kabupaten Seruyan.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Seruyan

Struktur perekonomian Kabupaten Seruyan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.9
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Dalam Jutaan Rupiah		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 166,2	3 697,6	4 121,2
Pertambangan dan Penggalian	56,0	56,6	60,3
Industri Pengolahan	2 710,6	3 184,5	3 449,8
Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,6	1,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,4	1,6	1,5
Konstruksi	749,6	835,5	889,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	565,8	578,3	636,9
Transportasi dan Pergudangan	212,6	216,5	232,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106	108,3	115,6
Informasi dan Komunikasi	66,4	71,7	73,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	88,6	95,6	104,4
Real Estate	141,0	148,7	160,5
Jasa Perusahaan	1,0	0,9	1,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	370,8	336,6	367,4
Jasa Pendidikan	324,2	336,8	359,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,9	146,9	155,2
Jasa Lainnya	71,2	72,5	78,4



Lapangan Usaha PDRB	Dalam Jutaan Rupiah		
	2020	2021	2022
PDRB	8 768,9	9 890,2	10 808,8

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023, yang memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Seruyan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah/Renstra Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahun.

Pada Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kabupaten Seruyan mempunyai sumber daya alam yang memadai yang masih bersifat potensial yang merupakan sumber daya ekonomi. Dari struktur ekonominya terlihat bahwa sektor primer yakni di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan bahkan pariwisata yang secara spesifik merupakan keunggulan komparatif Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi akibat



dampak Pandemi *Covid-19* yang telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan baru. Tantangan pokok yang dihadapi di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- a. Menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Peningkatan stabilitas pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi pengangguran, penciptaan lapangan kerja masih rendah, kesempatan kerja yang diciptakan akibat laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru. Ke depan kegiatan ekonomi daerah akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin;
- b. Peningkatan mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional;
- c. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk menarik minat investor;
- e. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan potensi lingkungan dan mempertahankan potensi sumber daya alam;
- f. Meningkatkan produksi potensi unggulan daerah Kabupaten Seruyan di Sektor Pertanian yaitu komoditi berupa padi, jagung, pisang kepok, ubi, kacang tanah dan kacang kedelai;
- g. Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, jambu mente dan aren;
- h. Sumber daya alam hutan yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu potensi sumber penerimaan daerah;
- i. Produksi perikanan Kabupaten Seruyan yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya potensial untuk dikembangkan;
- j. Sektor peternakan di Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Seruyan sangat cocok untuk dikembangkan peternakan sapi, babi, kerbau, kambing dan unggas;
- k. Kawasan selatan Kabupaten Seruyan memiliki garis pantai yang berpotensi selain dikembangkan untuk sektor pariwisata juga sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan perikanan (nelayan) yang mendukung bagian tengah Kabupaten Seruyan, oleh karena itu optimalisasi pelayanan transportasi sungai dan laut guna menghubungkan pusat- pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran;
- l. Kawasan tengah dan utara Kabupaten Seruyan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan yang berbasis hasil sumber daya alam lokal. Melalui jalur jalan Provinsi yang menghubungkan Sampit - Pangkalan Bun - Pontianak, kawasan ini dimungkinkan untuk menjadi urat nadi transportasi dan perdagangan bagi Kabupaten Seruyan.



Berdasarkan data diatas dan sejalan dengan arah kebijakan yang menjadi prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
 - 1) Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional;
 - 2) Mendorong pimpinan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis di tingkat pusat;
 - 3) Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Seruyan;
 - 4) Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
- c. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Seruyan.
- d. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:



1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Rokok,dll;
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan dan Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Penerimaan atas TGR, Pendapatan Usaha BLUD, dll.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
 - 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;



- 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
 - 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
 - 5) Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- 1) Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
 - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan;
 - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD;
 - 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.



2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka struktur APBD Kabupaten Seruyan dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selain itu pengelolaan belanja diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
4. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran dan memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program kegiatan yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah;
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.



Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan, berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oleh karena itu, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;



- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran.

Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
5. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penggunaan SiLPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada SKPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk prioritas pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur.

Dimana kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:



1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dalam APBD Tahun Anggaran telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2022 SiLPA Tahun Anggaran 2021 dianggarkan berdasarkan estimasi sementara yaitu sebesar Rp145.417.832.425,00 yakni perkiraan sisa anggaran yang tidak terealisasi dari belanja Program/kegiatan yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Sedangkan jumlah pasti realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 baru dapat dianggarkan pada Perubahan APBD 2022 berdasarkan SiLPA Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dan hasil audit oleh BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 adalah untuk membiayai pemberian penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) sebesar Rp12.962.500.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, ikhtisar dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada uraian pendapatan dan belanja, dimana :

1. Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.296.879.680.318,00 yang terdiri Belanja Operasi sebesar Rp924.737.016.839,00, Belanja Modal sebesar Rp189.744.984.454,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.830.269.792,00 dan untuk Belanja Transfer Kabupaten Seruyan menganggarkan sebesar Rp168.567.409.233,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp6.461.404.233,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp162.106.005.000,00;
2. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.164.424.347.893,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp125.575.856.854,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.028.571.649.304,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10.276.841.735,00.

Pencapaian Kinerja Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat di gambarkan sebagaimana berikut :

Tabel 2.10
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	231.669.000,00	107.286.000,00	124.383.000,00	46,31
Dinas Kesehatan	1.030.104.190,00	1.078.483.700,00	-48.379.510,00	104,70



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
RSUD Kuala Pembuang	18.308.904.000,00	20.733.598.084,00	-2.424.694.084,00	113,24
RSUD Hanau	20.104.236.331,00	23.104.122.313,00	-2.999.885.982,00	114,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	804.577.377,00	479.634.798,14	324.942.578,86	59,61
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.240.000,00	0,00	36.240.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	27.500.000,00	7.660.000,00	19.840.000,00	27,85
Dinas Perhubungan	698.185.000,00	510.299.000,00	187.886.000,00	73,09
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	400.000.000,00	192.774.793,00	207.225.207,00	48,19
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	260.557.020,00	262.985.896,36	-2.428.876,36	100,93
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	216.555.000,00	207.085.000,00	9.470.000,00	95,63
Dinas Perikanan	68.064.480,00	70.934.600,00	-2.870.120,00	104,22
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	174.500.000,00	291.388.000,00	-116.888.000,00	166,98
Sekretariat Daerah	199.737.500,00	156.699.000,00	43.038.500,00	78,45
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.060.664.245.897,00	1.050.341.325.208,39	10.322.920.688,61	99,03
Badan Pendapatan Daerah	58.862.355.578,00	14.100.899.560,25	44.761.456.017,75	23,96
Kecamatan Seruyan Hilir	247.871.919,17	12.455.181,00	235.416.738,17	5,02
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	99.674.383,83	6.868.975,00	92.805.408,83	6,89
Kecamatan Danau Sembuluh	253.304.635,33	26.042.651,33	227.261.984,00	10,28
Kecamatan Seruyan Raya	263.394.727,25	177.802.796,20	85.591.931,05	67,50
Kecamatan Danau Seluluk	276.937.991,08	54.954.981,00	221.983.010,08	19,84
Kecamatan Hanau	441.198.494,92	179.857.225,80	261.341.269,12	40,77
Kecamatan Batu Ampar	109.938.767,67	14.957.153,00	94.981.614,67	13,60
Kecamatan Seruyan Tengah	417.135.600,75	93.421.826,08	323.713.774,67	22,40
Kecamatan Seruyan Hulu	137.965.000,00	27.862.000,00	110.103.000,00	20,19
Kecamatan Suling Tambun	89.495.000,00	2.572.500,00	86.922.500,00	2,87
JUMLAH	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	52.182.376.650,45	95,52

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan per SKPD dengan target sebesar Rp1.164.424.347.893,00 terealisasi sebesar Rp1.112.241.971.242,55 atau 95,52%, walaupun realisasi total pendapatan menurun



dari tahun sebelumnya, tetapi ada beberapa SKPD yang berhasil melampaui target pendapatan yang di tetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan intensifikasi pemungutan pendapatan, penggalian potensi sumber pendapatan, melakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan tingkat pusat agar kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2022 antara lain :

- 1) Kurang transparannya wajib pajak maupun pemilik usaha dalam menyampaikan data real pendapatan yang diperoleh karena masih belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 2) Masih minimnya kesadaran wajib pajak / wajib retribusi maupun pemilik usaha dalam melaporkan kewajiban pajak dan retribusinya;
- 3) Masih belum diberlakukannya tarif pajak oleh pelaku usaha dalam pengelolaan pendapatannya karena masih adanya regulasi terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum relevan sehingga pemungutan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum sesuai dengan kondisi real di lapangan;
- 4) Masa peralihan atau transisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang sebagian sudah diberlakukan;
- 5) *Standart Operating Procedure* (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum memadai;
- 6) Penggalian potensi Pajak Daerah yang belum optimal serta belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah penghasil PAD;
- 7) Belum adanya sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak taat pajak, serta pengenaan sanksi terhadap denda pajak belum diterapkan secara menyeluruh karena tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal;
- 8) Masih minimnya potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Seruyan seperti hotel, rumah penginapan, rumah makan/ warung makan, objek pajak hiburan yang belum bersifat permanen, serta pajak hiburan masih bersifat insidental;
- 9) Masih belum optimalnya capaian realisasi yang bersumber dari potensi yang sudah ada serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk operasional di lapangan;
- 10) Belum dimilikinya database atau data dasar mengenai sumber penerimaan serta data subjek dan objek Pajak/Retribusi masih banyak yang belum dilakukan pemutakhiran sehingga data potensi belum sepenuhnya akurat;
- 11) Belum ditunjang oleh pelayanan menggunakan aplikasi dan sistem teknologi berbasis online sebagai sarana dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah di seluruh perangkat daerah;
- 12) Belum primanya layanan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan petugas pelaksana operasional dilapangan dan masih minimnya pengetahuan terkait perpajakan dan retribusi;



- 13) Penagihan serta pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum maksimal sehingga memiliki potensi keterlambatan pembayaran dan tidak taat nya wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya;
- 14) Sosialisasi peraturan dan ketentuan pungutan pendapatan daerah belum optimal dan belum dilakukan secara menyeluruh ke wajib pajak, wajib retribusi, perangkat daerah, perangkat desa serta petugas pungut maupun aparat pajak di masing-masing wilayah sehingga informasi terkait perpajakan belum dapat diterima secara merata baik kepada masyarakat maupun oleh aparat di masing-masing kecamatan;
- 15) Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan data potensi yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan;
- 16) SKPD yang memiliki target pendapatan masih belum sepenuhnya melakukan pemungutan secara optimal terhadap jenis penerimaan pajak maupun retribusi.

2.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan secara umum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana berikut:

Tabel 2.11
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Per SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	280.235.168.969,00	229.127.737.057,19	(51.107.431.911,81)	81,76
Dinas Kesehatan	119.862.667.972,00	109.399.830.789,57	(10.462.837.182,43)	91,27
RSUD Kuala Pembuang	57.347.709.277,00	49.326.375.008,00	(8.021.334.269,00)	86,01
RSUD Hanau	37.980.798.870,00	37.398.546.019,83	(582.252.850,17)	98,47
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.430.501.919,00	127.777.876.217,87	(7.652.625.701,13)	94,35
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12.318.097.764,00	11.821.423.159,00	(496.674.605,00)	95,97
Satuan Polisi Pamong Praja	8.196.290.788,00	7.699.717.957,00	(496.572.831,00)	93,94
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.877.716.495,00	5.168.216.661,00	(709.499.834,00)	87,93
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.435.069.478,00	30.211.996.902,00	(27.223.072.576,00)	52,60
Dinas Sosial	12.743.674.997,00	7.507.429.450,00	(5.236.245.547,00)	58,91
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.036.065.538,00	5.678.803.817,00	(357.261.721,00)	94,08
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.326.998.053,00	9.807.547.335,00	(1.519.450.718,00)	86,59
Dinas Lingkungan Hidup	75.315.712.690,00	23.165.619.201,20	(52.150.093.488,80)	30,76
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.336.337.521,00	6.414.344.865,00	(921.992.656,00)	87,43
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.995.932.270,00	7.866.920.384,00	(129.011.886,00)	98,39



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Perhubungan	6.565.176.676,00	6.227.101.745,00	(338.074.931,00)	94,85
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.068.166.389,00	6.306.403.199,00	(761.763.190,00)	89,22
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.977.087.602,00	11.582.407.380,00	(3.394.680.222,00)	77,33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.447.889.695,00	5.343.557.408,00	(104.332.287,00)	98,08
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	13.583.489.123,00	9.789.058.810,00	(3.794.430.313,00)	72,07
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.137.492,00	4.229.470.471,00	(300.667.021,00)	93,36
Dinas Perikanan	6.870.933.863,00	6.393.256.216,00	(477.677.647,00)	93,05
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.888.719.533,00	12.243.538.566,00	(1.645.180.967,00)	88,15
Sekretariat Daerah	42.397.735.605,00	39.772.102.400,00	(2.625.633.205,00)	93,81
Inspektorat	9.764.118.920,00	8.485.800.754,00	(1.278.318.166,00)	86,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.624.322.340,00	7.607.545.318,00	(1.016.777.022,00)	88,21
Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.574.837.642,00	184.621.894.903,85	(34.952.942.738,15)	84,08
Badan Pendapatan Daerah	11.200.667.470,00	9.556.843.788,00	(1.643.823.682,00)	85,32
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.174.956.540,00	7.216.173.675,00	(958.782.865,00)	88,27
Sekretariat DPRD	43.758.576.174,00	40.941.981.284,00	(2.816.594.890,00)	93,56
Kecamatan Seruyan Hilir	8.159.966.332,00	7.964.941.884,00	(195.024.448,00)	97,61
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2.928.202.186,00	2.784.892.313,00	(143.309.873,00)	95,11
Kecamatan Danau Sembuluh	2.852.614.054,00	2.805.605.620,00	(47.008.434,00)	98,35
Kecamatan Seruyan Raya	3.029.814.132,00	2.913.638.189,00	(116.175.943,00)	96,17
Kecamatan Danau Seluluk	2.681.259.843,00	2.427.266.428,00	(253.993.415,00)	90,53
Kecamatan Hanau	4.041.176.560,00	3.993.063.020,00	(48.113.540,00)	98,81
Kecamatan Batu Ampar	2.688.563.785,00	2.578.522.487,00	(110.041.298,00)	95,91
Kecamatan Seruyan Tengah	5.958.465.304,00	5.246.812.463,00	(711.652.841,00)	88,06
Kecamatan Seruyan Hulu	3.434.142.441,00	3.394.887.087,00	(39.255.354,00)	98,86
Kecamatan Suling Tambun	3.112.826.443,00	2.961.599.068,00	(151.227.375,00)	95,14
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.127.091.573,00	5.804.713.705,00	(322.377.868,00)	94,74
JUMLAH	1.296.879.680.318,00	1.071.565.463.005,51,00	(225.314.217.312,49)	82,63



Tabel 2.12
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	727.427.696.529,00	615.439.149.221,46	84,60
1	Pendidikan	280.235.168.969,00	229.127.737.057,19	81,76
	Dinas Pendidikan	280.235.168.969,00	229.127.737.057,19	81,76
2	Kesehatan	215.191.176.119,00	196.124.751.817,40	91,27
	Dinas Kesehatan	97.409.498.487,21	109.399.830.789,57	91,27
	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	43.789.312.642,00	49.326.375.008,00	86,01
	Rumah Sakit Umum Hanau	35.668.866.950,00	37.398.546.019,83	98,47
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	135.430.501.919,00	127.777.876.217,87	94,35
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	135.430.501.919,00	127.777.876.217,87	94,35
4	Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	12.318.097.764,00	11.821.423.159,00	95,97
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	12.318.097.764,00	11.821.423.159,00	95,97
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	71.509.076.761,00	43.079.931.520,00	60,24
	Satuan Polisi Pamong Praja	8.196.290.788,00	7.699.717.957,00	93,94
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.877.716.495,00	5.168.216.661,00	87,93
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.435.069.478,00	30.211.996.902,00	52,60
6	Sosial	12.743.674.997,00	7.507.429.450,00	58,91
	Dinas Sosial	12.743.674.997,00	7.507.429.450,00	58,91

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 untuk urusan wajib non pelayanan dasar, sebagai berikut :

Tabel 2.13
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	174.071.712.582,00	108.654.773.181,20	62,41
1	Tenaga Kerja	6.036.065.538,00	5.678.803.817,00	94,08
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.036.065.538,00	5.678.803.817,00	94,08
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.326.998.053,00	9.807.547.335,00	86,59
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.326.998.053,00	9.807.547.335,00	86,59



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
3	Pangan	13.888.719.533,00	12.243.538.566,00	88,15
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.888.719.533,00	12.243.538.566,00	88,15
3	Lingkungan Hidup	75.315.712.690,00	23.165.619.201,20	30,76
	Dinas Lingkungan Hidup	75.315.712.690,00	23.165.619.201,20	30,76
4	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	7.336.337.521,00	6.414.344.865,00	87,43
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.336.337.521,00	6.414.344.865,00	87,43
5	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.995.932.270,00	7.866.920.384,00	98,39
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.995.932.270,00	7.866.920.384,00	98,39
6	Perhubungan	6.565.176.676,00	6.227.101.745,00	94,85
	Dinas Perhubungan	6.565.176.676,00	6.227.101.745,00	94,85
7	Komunikasi Dan Informatika	7.068.166.389,00	6.306.403.199,00	89,22
	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.068.166.389,00	6.306.403.199,00	89,22
8	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	14.977.087.602,00	11.582.407.380,00	77,33
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	14.977.087.602,00	11.582.407.380,00	77,33
9	Penanaman Modal	5.447.889.695,00	5.343.557.408,00	98,08
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.447.889.695,00	5.343.557.408,00	98,08
10	Kepemudaan Dan Olah Raga	13.583.489.123,00	9.789.058.810,00	72,07
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	13.583.489.123,00	9.789.058.810,00	72,07
11	Perpustakaan	4.530.137.492,00	4.229.470.471,00	93,36
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.137.492,00	4.229.470.471,00	93,36

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang, sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Daerah	86.156.311.779,00	80.714.589.434,00	93,68
1	Administrasi Pemerintahan	42.397.735.605,00	39.772.102.400,00	93,81
	Sekretariat Daerah	42.397.735.605,00	39.772.102.400,00	93,81
2	Pengawasan	9.764.118.920,00	8.485.800.754,00	86,91
	Inspektorat	9.764.118.920,00	8.485.800.754,00	86,91



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
3	Perencanaan	8.624.322.340,00	7.607.545.318,00	88,21
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.624.322.340,00	7.607.545.318,00	88,21
4	Keuangan	230.775.505.112,00	194.178.738.691,85	84,14
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	219.574.837.642,00	184.621.894.903,85	84,08
	Badan Pendapatan Daerah	11.200.667.470,00	9.556.843.788,00	85,32
5	Kepegawaian	8.174.956.540,00	7.216.173.675,00	88,27
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.174.956.540,00	7.216.173.675,00	88,27
6	Sekretariat DPRD	43.758.576.174,00	40.941.981.284,00	93,56
	Sekretariat DPRD	43.758.576.174,00	40.941.981.284,00	93,56
7	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	38.887.031.080,00	37.071.228.559,00	95,33
	Kecamatan Seruyan Hilir	8.159.966.332,00	7.964.941.884,00	97,61
	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2.928.202.186,00	2.784.892.313,00	95,11
	Kecamatan Danau Sembuluh	2.852.614.054,00	2.805.605.620,00	98,35
	Kecamatan Seruyan Raya	3.029.814.132,00	2.913.638.189,00	96,17
	Kecamatan Danau Seluluk	2.681.259.843,00	2.427.266.428,00	90,53
	Kecamatan Hanau	4.041.176.560,00	3.993.063.020,00	98,81
	Kecamatan Batu Ampar	2.688.563.785,00	2.578.522.487,00	95,91
	Kecamatan Seruyan Tengah	5.958.465.304,00	5.246.812.463,00	88,06
	Kecamatan Seruyan Hulu	3.434.142.441,00	3.394.887.087,00	98,86
	Kecamatan Suling Tambun	3.112.826.443,00	2.961.599.068,00	95,14
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.127.091.573,00	5.804.713.705,00	94,74
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.127.091.573,00	5.804.713.705,00	94,74



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2022, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian / realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan data anggaran dan realisasi APBD TA 2022.

Analisa capaian kinerja keuangan digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Dari gambaran realisasi APBD TA 2022 Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Seruyan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, tergambar pada table berikut :

Tabel 3.1
Realisasi APBD TA 2022

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52	1.113.153.187.993,89
2	Belanja Daerah	1.296.879.680.318,00	1.071.565.463.005,51	82,63	1.107.681.472.520,82
3	Surplus/Defisit	(132.455.332.425,00)	40.676.508.237,04	(30,71)	5.471.715.473,07
4	Penerimaan Pembiayaan	145.417.832.425,00	154.189.478.543,31	106,03	161.680.263.070,24
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100	12.962.500.000,00
6	Pembiayaan Netto	132.455.332.425,00	141.226.978.543,31	106,62	148.717.763.070,24

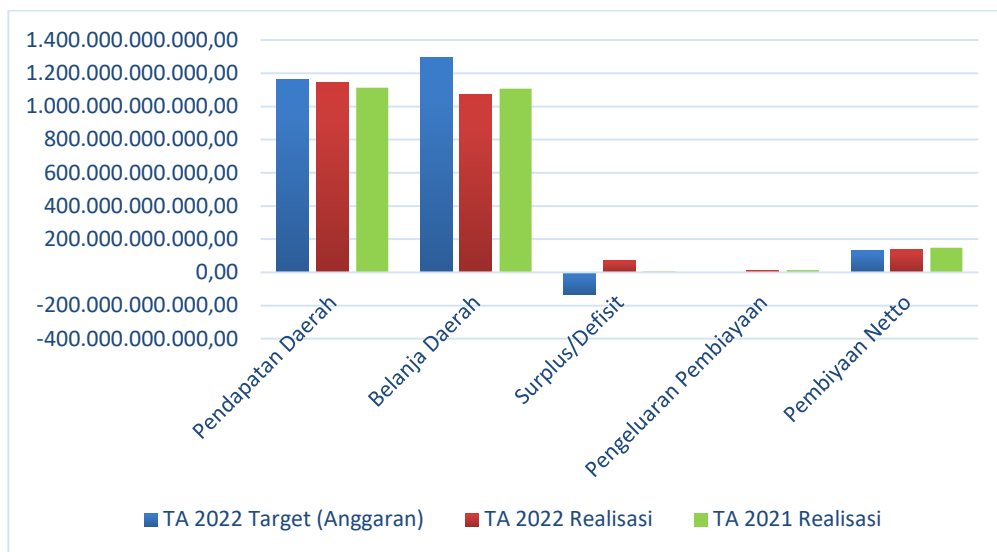
Dimana terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp911.216.751,34 atau menurun sebesar 0,08% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya, begitu juga dengan target belanja tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp53.415.558.872,33 tetapi realisasi belanja menurun sebesar Rp36.116.009.515,31 atau sebesar 3,26% dari realisasi belanja tahun anggaran 2021. Seiring dengan menurunnya realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 mengakibatkan, terjadi surplus anggaran sebesar Rp40.676.508.237,04



ini terjadi karena realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1

Realisasi APBD TA 2022 dan TA 2021



3.1.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan target pendapatan sebesar Rp51.897.234.841,33 tetapi tidak diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan, karena pada tahun anggaran 2022 realisasi pendapatan menurun sebesar Rp911.216.751,34 atau menurun sebesar 0,08%.

Realisasi pendapatan daerah juga ada beberapa yang melebihi target, pendapatan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan lain-lain PAD dimana realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp3.965.546.783,92 atau 107,91% dari target pendapatan, Pendapatan transfer antar daerah meningkat sebesar Rp5.861.273.398,76 atau 112,76% dari target sebesar Rp45.947.198.486,00, serta didorong oleh realisasi lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar Rp215.274.640 atau 102,09% dari target pendapatan sebesar Rp10.276.841.735,00, realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dalam table di bawah.

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan TA 2022

No.	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
	PENDAPATAN DAERAH	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52	1.113.153.187.993,89
1	Pendapatan Asli Daerah	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64	83.036.151.308,92
2	Pendapatan Transfer	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10	1.004.973.554.262,97

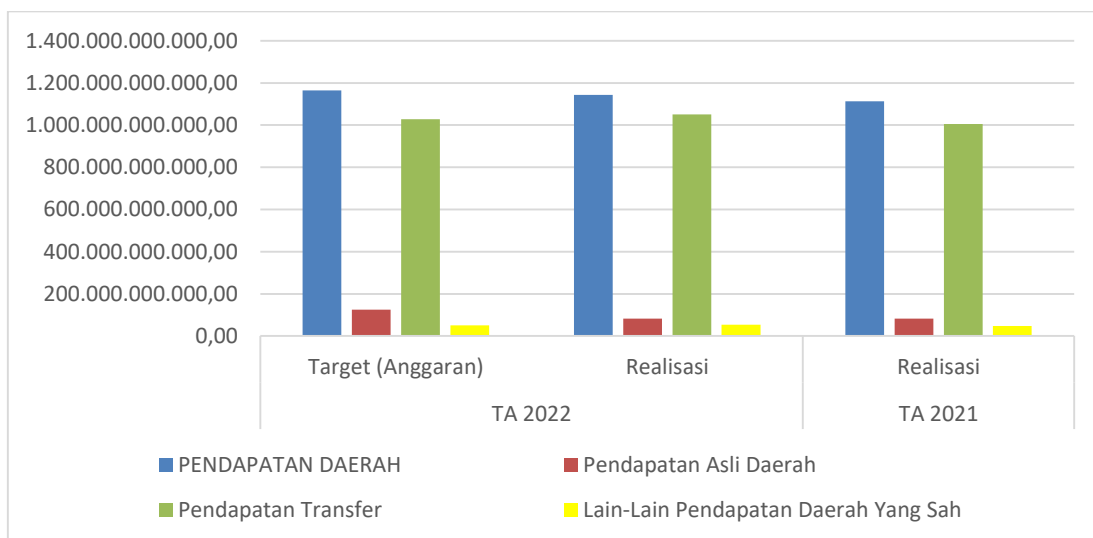


3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09	25.143.482.422,00
---	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------

Peningkatan pendapatan tahun anggaran 2022 dapat kita lihat sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.2

Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021



3.1.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.296.879.680.318,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.071.565.463.005,51 atau 82,63%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022

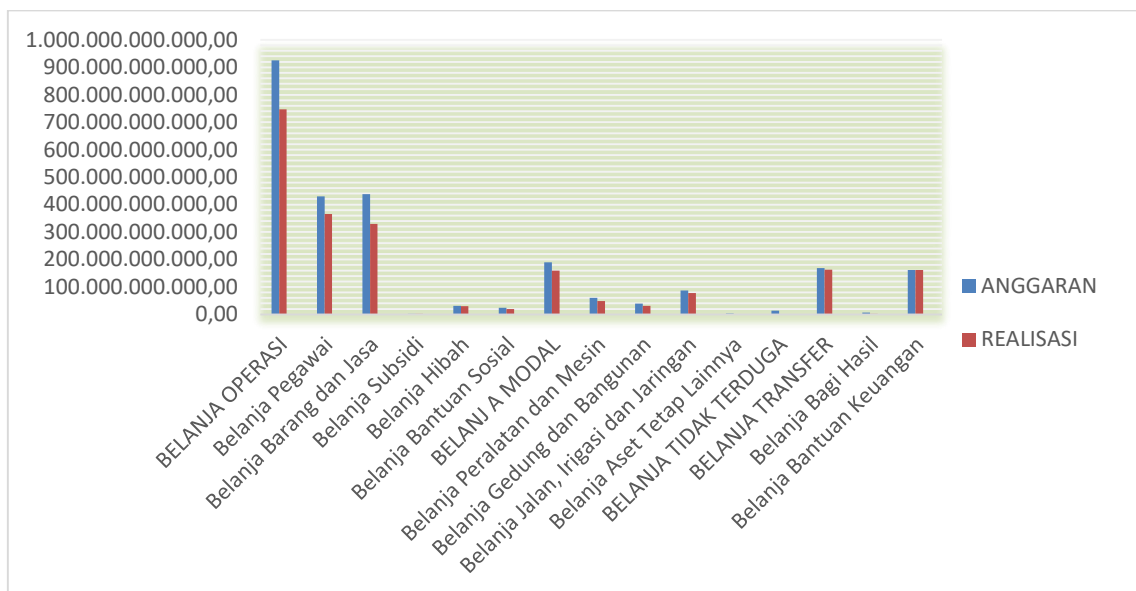
No	Jenis Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	924.737.016.839,00	747.007.671.583,31	80,78
2	BELANJA MODAL	189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.830.269.792,00	1.357.580.146,00	9,82
4	BELANJA TRANSFER	168.567.409.233,00	163.496.476.192,00	96,99
JUMLAH		1.296.879.680.318,00	1.071.565.463.005,51	82,63

Pencapaian kinerja belanja daerah, dan kenaikan dan penurunan kinerja belanja daerah dapat kita baca pada laju grafik dibawah ini :



Grafik 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022



3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Corona Virus Disease 2019 atau sering dikenal sebagai covid-19 yang merebak di Wuhan akhir Desember 2019 dengan tingkat penularan yang cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat semua negara menerapkan berbagai kebijakan termasuk menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran secara masif covid-19, termasuk Indonesia di beberapa daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebarannya. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya covid-19 tidak hanya pada masalah kesehatan saja, akan tetapi hampir mempengaruhi seluruh sektor terutama sektor ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan menghadapi covid-19 dengan mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 karena ketiadaan anggaran. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah kewenangannya. Dengan dikeluarkannya peraturan



Menteri Keuangan beserta peraturan turunannya, Pemerintah Daerah didorong untuk segera menyusun langkah yang akan dilakukan untuk penanganan Covid-19.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 48).

Penyesuaian dan perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 diprioritaskan pada 3 aspek yaitu penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, Penyediaan Sosial *Safety Net*/Jaringan Pengaman Sosial. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja dalam rangka penanggulangan Covid 19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2022

No	Prioritas	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1.	Penanganan Bidang Kesehatan	1.136.425.960,00	1.127.541.796,00	99,22%
2.	Penanganan Dampak Ekonomi	753.350.000	593.759.750	78,82%
3.	Penyediaan <i>Social Safety Net</i> / Jaringan Pengaman Sosial	-	-	-
JUMLAH		74.798.720.292,46	1.889.775.960,00	1.721.301.546,00

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dalam APBD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2022 tersebut digunakan pada 3 (tiga) sektor prioritas dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.5
Rincian Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(c)
I. BIDANG KESEHATAN				
A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19				
1.	Pencegahan Covid-19 (Belanja Jasa Tenaga Trantibmas)	539.500.000	539.345.000	99,97%
2.	Penanganan Covid-19	-	-	0,00%
	Sub Total	539.500.000	539.345.000	99,97%
B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH				
1.	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	85.256.000,00	83.701.000	98,18%
2.	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	-	-	0,00%
3.	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	-	-	0,00%
4.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	414.824.000,00	407.704.996	98,28%
5.	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	96.845.960,00	96.790.800	99,94%
6.	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	-	-	0,00%
7.	Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis	-	-	0,00%
	Sub Total	596.925.960,00	588.196.796,00	98,54%
TOTAL BIDANG KESEHATAN		1.136.425.960,00	1.127.541.796,00	99,22%
II. PENANGANAN DAMPAK/DUKUNGAN EKONOMI				
1.	DUKUNGAN EKONOMI			
2.	A. PEMBERDAYAAN UMKM			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	520.000.000	501.595.000	96,46%
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	89.320.000	88.814.750	99,43%
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	140.680.000	-	0,00%
	TOTAL PENANGANAN DAMPAK/ DUKUNGAN EKONOMI	753.350.000	593.759.750	78,82%
TOTAL BANTUAN SOSIAL				
JUMLAH TOTAL		1.889.775.960,00	1.721.301.546,00	91,08%

Bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meanggarkan belanja wajib perlindungan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2022 telah meanggarkan belanja



wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.375.202.000,00, atau 2% dari DTU yang diperhitungkan sebesar Rp218.760.075.600,00.

Alokasi anggaran sebesar Rp4.375.202.000,00 di alokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial sebesar Rp1.712.956.000,00 untuk Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan Langsung Tunai).
2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang digunakan untuk :
 - a. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan penting lainnya sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - b. Bantuan/Stimulus Usaha bagi UMKM sebesar Rp1.562.246.000,00.

Adapun untuk penyesuaian dan perubahan rincian anggaran dan realisasi belanja dalam rangka pengendalian inflasi dan perlindungan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perlindungan Sosial TA.2022

No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
I.	BANTUAN SOSIAL				
a.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
	- Bantuan Langsung Tunai BBM	Belanja Bantuan Sosial	1.465.200.000,00	1.465.200.000,00	100
	- Dana Pendamping	Belanja Barang dan Jasa	247.756.000,00	171.202.100,00	69,10
	Sub Total BANTUAN SOSIAL		1.712.956.000,00	1.636.402.100,00	95,53
II.	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA				
a.			-	-	-
b.			-	-	-
	Sub Total PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		-	-	-
III.	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI				
a.			-	-	-
b.			-	-	-
	Sub Total SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI			-	-
IV.	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA				
a.	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan penting lainnya				
	- Penyelenggaraan Pasar Murah	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	950.000.000,00	100
	- Dana Pendamping	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.109.600,00	99,4
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				
	- Bantuan/Stimulus Usaha bagi UMKM	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100
	- Dana Pendamping		212.246.000,00	211.977.234,00	99,87
	Sub Total PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		2.662.246.000,00	2.661.086.834,00	99,96



No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		4.375.202.000,00	4.297.488.934,00	98,22

Berdasarkan data capaian realisasi kinerja belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rendah serapan anggaran / realisasi belanja yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu anggaran pada APBD Perubahan 2022 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) dan keterbatasan waktu untuk dapat merealisasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan mengingat penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada bulan November Tahun 2022 sehingga hanya tersisa waktu efektif kurang dari 2 (dua) bulan untuk pelaksanaan program kegiatan. Adapun dasar penggunaan anggaran dan belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07 /2022 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/ 2022 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 untuk penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR), sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Realisasi 2022	Percentase
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.673.330.000,00	43.673.330.000,00	23.584.116.512,00	54%
2.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	15.000.000.000,00	56.290.924.328,00	9.263.042.760,00	16%
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	-	6.226.245.000,00	3.586.854.586,00	58%
4.	Dinas Sosial	-	5.355.000.000,00	463.771.900,00	9%
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	-	3.466.105.000,00	84.730.000,00	2%
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1.250.000.000,00	-	0%



7.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	-	1.000.000.000,00	146.387.040,00	15%
	JUMLAH	58.673.330.000,00	117.261.604.328,00	37.128.902.798,00	32%

Dalam pelaksanaan APBD TA.2022 tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022 dalam kaitannya untuk pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan bidang dan fungsi sebagai berikut :

A. Bidang Sosial

1. Fungsi Pendidikan

- Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan secara merata pada setiap jenjang pendidikan;
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dalam kegiatan pendidikan;
- Masih terdapat sebagian tenaga pendidik belum bersertifikat pendidik;
- Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
- Sebaran ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.

2. Fungsi Kesehatan

- Masih rendahnya penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk dan rendahnya pelayanan gizi masyarakat;
- Masih terbatasnya tenaga kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah yang terpencil;
- Masih terbatasnya peralatan kesehatan, logistik dan sarana penunjang pelayanan.sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di desa terutama Pustu dan Poskesdes/Polindes serta kurangnya peralatan dan logistik kesehatan penunjang pelayanan;
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pencapaian pembangunan berwawasan kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu untuk menolong kesehatannya.

3. Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- Masih minimnya data terpilah gender;
- Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan;
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Belum tersedianya fasilitas pengaduan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penanganannya lambat;
- Masih ada terjadinya kasus perdagangan perempuan;
- Pelaksanaan P2TP2A belum maksimal karena belum terbentuknya UPT;



- g. Data tentang keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 tidak selalu update;
- h. Masih minimnya kualitas tenaga PLKB yang ada dilapangan;
- i. Kekurangan tenaga PKB;
- j. Rendahnya partisipasi laki-laki untuk ber-KB.

4. Fungsi Kependudukan

- a. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif;
- b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;
- c. Database administrasi kependudukan belum sepenuhnya akurat.

5. Fungsi Transmigrasi

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung transmigran;
- b. Kurang tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi;
- c. Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi;
- d. Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi;
- e. Terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran;
- f. Lahan usaha yang kurang subur (marginal) karena rendahnya pH tanah sehingga mengakibatkan produktivitas lahan masih rendah;
- g. Keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK);
- h. Tumpang tindih lahan transmigrasi dengan Perusahaan Perkebunan.

B. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

1. Fungsi Pekerjaan Umum

- a. Kurangnya penyediaan data yang akurat dan cepat sehingga lambat dalam pelayanan/penyampaian informasi;
- b. Kabupaten Seruyan memiliki luas wilayah yang cukup besar sehingga konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak merata;
- c. Jaringan jalan belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal;
- d. Jaringan irigasi belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal;
- e. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menjaga lingkungan permukiman yang sehat dan bersih.



2. Fungsi Perhubungan

- a. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kelayakan sarana angkutan;
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan / kelaikan kendaraan;
- c. Sarana dan prasarana Gedung yang belum lengkap (papan nama unit pengujian, rambu-rambu petunjuk);
- d. Adanya armada milik CV, Koperasi, dan PT yang memang tidak mau melakukan Kirk karena tidak adanya penindakan di jalan oleh aparat terkait (penertiban periodik);
- e. Regulasi yang mengatur tentang ketetapan besaran retribusi yang dapat dipungut masih belum ditetapkan yang berakibat tidak adanya payung hukum yang dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi;
- f. Adanya Sebagian kapal yang melakukan bongkar muat dilokasi Pelabuhan Segintung yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).

3. Fungsi Lingkungan Hidup

- a. Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem;
- b. Permukaan air sungai pada saat musim kemarau dan musim hujan sangat fluktuatif dan mulai tercemar, karena fungsi hutan yang mengatur kuantitas dan kualitas aliran air mengalami penurunan;
- c. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek penebangan liar dan konversi lahan;
- d. Sepanjang pinggir sungai mulai mengalami gangguan erosi;
- e. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang pencemaran air;
- f. Banyaknya pertambangan liar yang dilakukan masyarakat akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia;
- g. Fungsi hutan bakau disepanjang wilayah pesisir/pantai mulai terganggu dan terjadinya pendangkalan;
- h. Semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) namun sebagian besar sampah



yang ada belum diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air;

- i. Potensi sumberdaya hayati dan sumberdaya genetik hutan semakin menurun, akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali, lemahnya koordinasi antar sektor dan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum.

C. Bidang Ekonomi

1. Fungsi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- a. Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas dan masih belum dapat dikembangkan secara optimal;
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendah profesionalisme para pengelola koperasi dan sektor usaha lainnya;
- c. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM;
- d. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM;
- e. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.

2. Fungsi Pertanian

- a. Permasalahan utama yang mempengaruhi capaian kinerja bidang pertanian adalah rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utamanya padi. Rendahnya angka produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya penerapan teknologi budaya, panen dan pasca panen, belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air, infrastruktur pertanian belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana pratanam, tanam, panen, pasca panen dan pengolahan, belum berkembangnya kelembagaan petani, belum optimalnya kinerja kelembagaan pertanian, dan keterbatasan akses permodalan bagi petani;
- b. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan global tidak hanya lingkup Seruyan dan Kalimantan Tengah tetapi juga dalam skala nasional dan internasional. Pemicu utamanya adalah berkembangnya komoditas-komoditas yang lebih komersial dan tingginya harga komoditas tersebut di pasar dunia sehingga mendorong peralihan fungsi lahan yang pada awalnya adalah lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan sawit, karet dan komoditas



perkebunan lainnya. Peralihan lahan ini juga berdampak pada terjadinya migrasi tenaga kerja ke sub sektor lain baik di wilayah bersangkutan maupun wilayah sekitar. Secara signifikan, alih fungsi lahan dan tenaga kerja ini menurunkan luas tanam padi dan komoditas pangan lainnya di beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Seruyan. Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan ikut mempercepat laju konversi lahan ini;

- c. Agribisnis perberasan belum berkembang optimal. Namun, pengembangan agroindustri perberasan lokal seringkali menemui permasalahan dalam hal kontinuitas bahan baku;
- d. Belum ada fokus komoditas daerah yang bersinergi dengan pengembangan pemasaran. Selain beras, Kabupaten Seruyan memiliki keunggulan dari segi produksi untuk beberapa komoditas hortikultura, namun pengembangan pemasarannya masih bersinergi. Upaya-upaya peningkatan nilai tambahnya masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan belum adanya fokus komoditas yang jelas untuk pengembangan pemasarannya. Kondisi yang ada, pengembangan pemasaran justru diarahkan pada komoditas yang tidak memiliki keunggulan secara komparatif dengan daerah lainnya;
- e. Permasalahan-permasalahan umum lainnya sebagaimana yang menjadi permasalahan bidang pertanian yang juga dihadapi secara nasional antara lain penurunan minat generasi muda terhadap pekerjaan bidang pertanian, dan kemiskinan yang terjadi di wilayah kantong produksi yang disinyalir disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan penanganan secara multisektoral dan tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian semata.

3. Fungsi Perikanan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sarana prasarana perikanan;
- b. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sarana prasarana perikanan oleh masyarakat;
- c. Banyaknya asset yang sudah mengalami penyusutan sehingga menurunkan nilai ekonomisnya;
- d. Keterbatasan jumlah pemungut lapangan;
- e. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.



4. Fungsi Ketahanan Pangan

- a. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah;
- b. Adopsi inovasi teknologi (pertanian, perikanan dan kehutanan) pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah;
- c. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten;
- f. Rendahnya adopsi teknologi olahan pangan nonberas;
- g. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi;
- h. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh pertanian;
- i. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan;
- j. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- k. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk lokal cenderung menurun;
- l. Peranan penyuluh dalam pendampingan petani belum optimal.

5. Fungsi Peternakan

- a. Ada kecenderungan penurunan populasi ternak khususnya sapi potong setiap tahun akibat tingginya tingkat migrasi ternak;
- b. Rendahnya peningkatan populasi dan produksi ternak untuk mendukung target swasembada daging di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Luasan dan sebaran lahan potensial untuk pengembangan ternak belum terdata status dan kepemilikannya;
- d. Belum maksimalnya penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) baik secara terjadwal maupun sinkronisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan angka kelahiran ternak sapi;
- e. Masih tingginya pemotongan betina produktif;
- f. Masih tingginya tingkat kendala peternak dalam pengembangan budidaya ternak terhadap ketersediaan bibit, pakan dan pemasaran;
- g. Belum tertatanya sistem data informasi dalam menunjang pengembangan usaha peternakan di setiap kecamatan;
- h. Masih belum kondusifnya lembaga keuangan yang mudah dan murah diakses oleh para peternak dalam penyediaan sumber pembiayaan usaha peternakan;
- i. Belum optimalnya lembaga pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan teknis peternakan maupun bibit ternak;



- j. Terbatasnya jumlah tenaga medis, paramedis dan petugas teknis di lapangan sehingga kegiatan pelayanan belum optimal;
- k. Terbatasnya sarana dan prasarana bidang peternakan;
- l. Belum berkembangnya kelembagaan petani peternak/pemberian status kelompok ternak.

D. Bidang Pemerintah

1. Fungsi Pengawasan Pembangunan

- a. Sumber daya manusia auditor dan PNS yang ada baik dari sisi kualitatif dan kuantitatif.
- b. Belum adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja pengawasan yang wajar;
- c. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak tepat waktu;
- d. Kualitas sarana dan prasarana penunjang pengawasan yang belum memadai;
- e. Belum tersedia sistem dan prosedur pengawasan yang memadai;
- f. Belum tercapai Kategori “A” terhadap tingkat akuntabilitas (LAKIP) oleh KEMENPAN dan RB;
- g. Masih rendahnya upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan TPTGR tepat waktu oleh objek pemeriksaan;
- h. Belum diterapkannya SPIP secara formal dalam setiap unit kerja;
- i. Cepatnya perubahan regulasi menuntut setiap aparatur pengawasan dapat mengikuti perubahan tersebut.

2. Fungsi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- a. Kebijakan Perencanaan di Perangkat Daerah belum mengacu pada dokumen perencanaan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Kepatuhan SKPD di Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian (pelaporan pembangunan) masih belum dapat sepenuhnya memenuhi jadwal yang telah ditentukan;
- c. Masih belum optimalnya koordinasi antar lembaga, dinas, badan dan DPRD terkait dengan agenda perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik;
- e. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja serta kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi;



- f. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, yang mendukung fungsi perencanaan dan pengendalian Perangkat Daerah yang mendukung peningkatan kinerja perencanaan;
- g. Fungsi pengendalian dalam pemanfaatan ruang belum optimal;
- h. Pemanfaatan data (informasi) statistik dan pembangunan belum optimal serta data belum ter update dengan baik.

3. Fungsi Kepegawaian

- a. Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur di masing-masing unit kerja;
- b. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
- c. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum dilaksanakan secara optimal;
- d. Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;
- e. Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- f. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas kualitas, distribusi dan komposisi penyebaran sumber daya aparatur, khususnya tenaga guru dan kesehatan;
- g. Budaya kerja aparatur belum optimal.

4. Fungsi Pelayanan Perijinan

- a. Kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan;
- b. Media sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Pelayanan perijinan yang banyak berhubungan dengan instansi teknis menyebabkan layanan perijinan menjadi kurang efisien.

5. Fungsi Keamanan dan Ketertiban

- a. Belum tertatanya pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang emperan yang menjajakan dagangan di bahu jalan;
- b. Belum tertatanya bangunan di sepanjang jalan-jalan utama di Ibukota Kabupaten.

6. Arsip dan Perpustakaan

- a. Kurangnya kesiapan Perangkat Daerah sehingga banyak arsip yang memiliki nilai informasi penting belum sesuai dengan standar kearsipan;
- b. Belum optimalnya pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan yang disebabkan oleh kurangnya SDM (arsiparis);
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan;



- d. Kurangnya khazanah arsip karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;
- e. Belum terwujudnya Depo Arsip yang representatif;
- f. Kurangnya minat baca masyarakat/rendahnya budaya membaca masyarakat;
- g. Masih rendahnya kualitas perpustakaan yang disebabkan oleh : terbatasnya tenaga pustakawan, belum optimalnya pengelolaan perpustakaan, terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan, dan Bahan pustaka/buku yang kurang bervariasi.

Pada Tahun Anggaran 2022, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) d.h.i. Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mencakup 41 Perangkat Daerah (PD) yaitu :

No.	Kode PD	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1	1.01.01	Dinas Pendidikan
2	1.02.01	Dinas Kesehatan
3	1.02.02	Rsud Kuala Pembuang
4	1.02.03	Rsud Hanau
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
7	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
9	1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	1.06.01	Dinas Sosial
11	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
12	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
13	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
14	2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
15	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
16	2.09.01	Dinas Perhubungan
17	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
18	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
19	2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan
21	2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
22	3.01.01	Dinas Perikanan



No.	Kode PD	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
23	3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
24	4.01.01	Sekretariat Daerah
25	4.02.01	Inspektorat
26	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
28	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
29	4.05.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	4.08.01	Sekretariat Dprd
31	4.11.01	Kecamatan Seruyan Hilir
32	4.11.02	Kecamatan Seruyan Hilir Timur
33	4.11.03	Kecamatan Danau Sembuluh
34	4.11.04	Kecamatan Seruyan Raya
35	4.11.05	Kecamatan Danau Seluluk
36	4.11.06	Kecamatan Hanau
37	4.11.07	Kecamatan Batu Ampar
38	4.11.08	Kecamatan Seruyan Tengah
39	4.11.09	Kecamatan Seruyan Hulu
40	4.11.10	Kecamatan Suling Tambun
41	4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK SKPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan LKPD adalah LRA, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

1. Selain menyerang dari sisi Kesehatan masyarakat pandemi Covid-19 juga menyerang sisi perekonomian, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah tentu juga berdampak dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;



2. Begitu juga dengan realisasi belanja menurun dari target yang diharapkan walaupun secara angka masih melebihi target belanja tahun sebelumnya, menurunnya target belanja karena dampak *recofussing* APBD yang terus menerus, sehingga belanja yang sudah ditargetkan tercapai di tahun 2021 sebagian ada yang tidak dilaksanakan karena *recofussing* anggaran;
3. Pengurangan Dana Alokasi Umum juga mempengaruhi pencapaian target kinerja pemerintah daerah, karena keterbatasan dana sehingga diputuskan untuk melaksanakan belanja yang dianggap prioritas dan tentunya menambah anggaran pada penanganan *Corona Virus Disease-19*;
4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah pedoman atau ketentuan yang dipilih berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, dan tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan anggaran dan antar periode.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan tidak termasuk perusahaan daerah. Dimana entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan lampiran yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO dan Basis akrual



untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan



untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.2.3.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria aset lancar tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



Investasi jangka panjang sebagaimana disebut diatas merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.2.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban, umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Seruyan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seruyan atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



4.2.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.2.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Seruyan selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

4.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan



akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran Unsur Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Basis Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruhi oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.3.2 Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

5.1.1 Pendapatan - LRA

31 Desember 2022
1.112.241.971.242,55

31 Desember 2021
1.113.153.187.993,89

Realisasi Pendapatan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.112.241.971.242,55 atau 95,52% dari pagu anggaran Rp1.164.424.347.893,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.113.153.187.993,89, maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp911.216.751,34. Atau 0,08%, Pendapatan Kabupaten Seruyan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Perimbangan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Asli Daerah	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64	83.036.151.308,92	(603.119.605,13)
Pendapatan Transfer	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10	1.004.973.554.262,97	14.343.268.900,79
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09	25.143.482.422,00	(14.651.366.047,00)
Jumlah	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52	1.113.153.187.993,89	(911.216.751,34)

Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2022
82.433.031.703,79

31 Desember 2021
83.036.151.308,92

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.433.031.703,79 atau 65,64% dari anggaran Rp125.575.856.854,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp83.036.151.308,92, maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp603.119.605,13 atau 0,73%. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	59.640.559.941,00	14.379.211.257,19	24,11	23.335.087.158,77	(8.955.875.901,58)
Pendapatan Retribusi Daerah	4.973.482.385,00	3.126.459.134,68	62,86	2.329.982.648,19	796.476.486,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.802.806.489,00	10.802.806.489,00	100,00	9.301.907.557,00	1.500.898.932,00
Lain-lain PAD yang Sah	50.159.008.039,00	54.124.554.822,92	107,91	48.069.173.944,96	6.055.380.877,96
Jumlah	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64	83.036.151.308,92	(603.119.605,13)

5.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah **31 Desember 2022**
14.379.211.257,19 **31 Desember 2021**
23.335.087.158,77

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.379.211.257,19 atau 24,11% dari anggaran Rp59.640.559.941,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp23.335.087.158,77, maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.955.875.901,58 atau 38,38%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Hotel	56.695.750,00	54.443.600,00	96,03	47.228.200,00	7.215.400,00
Pajak Restoran	1.882.890.188,00	894.860.094,00	47,53	780.528.048,00	114.332.046,00
Pajak Hiburan	14.600.000,00	10.587.800,00	72,52	0,00	10.587.800,00
Pajak Reklame	256.052.336,00	194.760.800,52	76,06	201.004.393,42	(6.243.592,90)
Pajak Penerangan Jalan	8.784.067.434,00	8.837.667.691,32	100,61	11.345.191.089,20	(2.507.523.397,88)
Pajak Air Tanah	213.640.446,00	183.192.585,84	85,75	201.600.751,55	(18.408.165,71)
Pajak Sarang Burung Walet	373.480.000,00	10.806.250,00	2,89	18.235.000,00	(7.428.750,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.864.245.595,00	952.291.732,51	51,08	1.437.023.112,10	(484.731.379,59)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.492.772.604,00	2.775.018.295,00	37,04	3.575.269.204,00	(800.250.909,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah	38.702.115.588,00	465.582.408,00	1,20	5.729.007.360,50	(5.263.424.952,50)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
dan Bangunan (BPHTB)					
Jumlah	59.640.559.941,00	14.379.211.257,19	24,11	23.335.087.158,77	(8.955.875.901,58)

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	59.640.559.941,00	14.379.211.257,19	24,11	23.335.087.158,77	(8.955.875.901,58)
Pajak Hotel	56.695.750,00	54.443.600,00	96,03	47.228.200,00	7.215.400,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	56.695.750,00	54.443.600,00	96,03	47.228.200,00	7.215.400,00
Pajak Restoran	1.882.890.188,00	894.860.094,00	47,53	780.528.048,00	114.332.046,00
Pajak Rumah Makan dan	46.885.000,00	12.400.300,00	26,45	17.101.000,00	(4.700.700,00)
Pajak Jasa Boga/Katering dan	1.836.005.188,00	882.459.794,00	48,06	763.427.048,00	119.032.746,00
Pajak Hiburan	14.600.000,00	10.587.800,00	72,52	0	10.587.800,00
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	14.600.000,00	10.587.800,00	72,52	0	10.587.800,00
Pajak Reklame	256.052.336,00	194.760.800,52	76,06	201.004.393,42	(6.243.592,90)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	154.266.680,00	151.595.903,52	98,27	113.831.118,92	37.764.784,60
Pajak Reklame Kain	101.785.656,00	43.164.897,00	42,41	82.534.194,50	(39.369.297,50)
Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	4.639.080,00	(4.639.080,00)
Pajak Penerangan Jalan	8.784.067.434,00	8.837.667.691,32	100,61	11.345.191.089,20	(2.507.523.397,88)
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	3.277.954.991,00	3.276.122.152,32	99,94	6.587.773.086,20	(3.311.650.933,88)
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	5.506.112.443,00	5.561.545.539,00	101,01	4.757.418.003,00	804.127.536,00
Pajak Air Tanah	213.640.446,00	183.192.585,84	85,75	201.600.751,55	(18.408.165,71)
Pajak Air Tanah	213.640.446,00	183.192.585,84	85,75	201.600.751,55	(18.408.165,71)
Pajak Sarang Burung Walet	373.480.000,00	10.806.250,00	2,89	18.235.000,00	(7.428.750,00)
Pajak Sarang Burung Walet	373.480.000,00	10.806.250,00	2,89	18.235.000,00	(7.428.750,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.864.245.595,00	952.291.732,51	51,08	1.437.023.112,10	(484.731.379,59)
Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya	1.864.245.595,00	952.291.732,51	51,08	1.437.023.112,10	(484.731.379,59)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.492.772.604,00	2.775.018.295,00	37,04	3.575.269.204,00	(800.250.909,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.492.772.604,00	2.775.018.295,00	37,04	3.575.269.204,00	(800.250.909,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.702.115.588,00	465.582.408,00	1,20	5.729.007.360,50	(5.263.424.952,50)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak	38.702.115.588,00	465.582.408,00	1,20	5.729.007.360,50	(5.263.424.952,50)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	59.640.559.941,00	14.379.211.257,19	24,11	23.335.087.158,77	(8.955.875.901,58)

Rincian Pendapatan Pajak Daerah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2022</u> 3.126.459.134,68	<u>31 Desember 2021</u> 2.329.982.648,19
---	---	---

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.126.459.134,68 atau 62,86% dari anggaran Rp4.973.482.385,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp2.329.982.648,19, maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp796.476.486,49 atau 34,18%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	960.104.190,00	990.530.700,00	103,17	883.729.500,00	106.801.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.000.000,00	10.455.000,00	31,68	7.055.000,00	3.400.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	300.485.000,00	285.187.000,00	94,91	257.400.000,00	27.787.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	103.079.200,00	95.898.250,00	93,03	61.297.600,00	34.600.650,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	286.650.000,00	172.560.000,00	60,20	204.340.000,00	(31.780.000,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	40.670.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.325.000,00	79.995.000,00	128,35	0,00	79.995.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	192.774.793,00	48,19	0,00	192.774.793,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	718.895.980,00	563.731.767,70	78,42	337.298.310,00	226.433.457,70
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.805.000,00	500.000,00	17,83	0,00	500.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	(3.790.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	61.050.000,00	47.802.000,00	78,30	40.568.000,00	7.234.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00	192.035.000,00	96,02	120.670.000,00	71.365.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	494.989.623,98	0,00	396.774.078,19	98.215.545,79
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	36.240.000,00	0,00	0,00	17.060.160,00	(17.060.160,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.768.177.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.973.482.385,00	3.126.459.134,68	62,86	2.329.982.648,19	796.476.486,49

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
10.802.806.489,00 **9.301.907.557,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.802.806.489,00 atau 100% dari anggaran Rp10.802.806.489,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp9.301.907.557,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.898.932,00 atau 16,14%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-JAMKRIDA	0,00	0,00	0,00	51.473.472,00	(51.473.472,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – Bank Kalteng	10.802.806.489,00	10.802.806.489,00	100	9.250.434.085,00	1.552.372.404,00
Jumlah	10.802.806.489,00	10.802.806.489,00	100	9.301.907.557,00	1.500.898.932,00



Jika dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Bank Kalteng TA 2021 sebesar Rp9.250.434.085,00, maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.552.372.404,00 atau 16,78%.

5.1.1.d. Lain-lain PAD Yang Sah

31 Desember 2022

54.124.554.822,92

31 Desember 2021

48.069.173.944,96

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.124.554.822,92 atau 107,91% dari anggaran sebesar Rp50.159.008.039,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp48.069.173.944,96 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.055.380.877,96 atau 12,60%.

Tabel 5.7
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.647.088.316,00	1.659.728.815,00	100,77	0,00	1.659.728.815,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	690.000.000,00	473.320.274,57	68,60	0,00	473.320.274,57
Jasa Giro	5.609.522.257,00	4.325.980.973,60	77,12	6.994.507.201,01	(2.668.526.227,41)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.307.812.990,00	191.116.520,04	8,28	203.133.836,71	(12.017.316,67)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.324.042.254,00	2.584.690.192,19	195,29	2.828.034.733,59	(243.344.541,40)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.000.000,00	253.504.193,45	487,51	32.173.081,00	221.331.112,45
Pendapatan Denda Pajak Daerah	42.121.364,00	81.481.046,41	193,44	2.967.170.185,65	(2.885.689.139,24)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	155.478,66	-	340.371,00	(184.892,34)
Pendapatan dari Pengembalian	73.280.527,00	716.856.932,00	978,24	122.368.015,00	594.488.917,00
Pendapatan BLUD	38.413.140.331,00	43.837.720.397,00	114,12	34.921.446.521,00	8.916.273.876,00
Jumlah	50.159.008.039,00	54.124.554.822,92	107,91	48.069.173.944,96	6.055.380.877,96

Rincian Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Lain-Lain PAD yang Sah	50.159.008.039,00	54.124.554.822,92	107,91	48.069.173.944,96	6.055.380.877,96
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.647.088.316,00	1.659.728.815,00	100,77	0,00	1.659.728.815,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.647.088.316,00	1.659.728.815,00	100,77	0,00	1.659.728.815,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.647.088.316,00	1.659.728.815,00	100,77	0,00	1.659.728.815,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	690.000.000,00	473.320.274,57	68,60	0,00	473.320.274,57
Hasil Sewa BMD	690.000.000,00	473.320.274,57	68,60	0,00	473.320.274,57
Jasa Giro	5.609.522.257,00	4.325.980.973,60	77,12	6.994.507.201,01	(2.668.526.227,41)
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.609.456.927,00	4.325.915.643,60	77,12	6.994.500.766,01	(2.668.585.122,41)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	65.330,00	65.330,00	100,00	6.435,00	58.895,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.307.812.990,00	191.116.520,04	8,28	203.133.836,71	(12.017.316,67)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.307.812.990,00	191.116.520,04	8,28	203.133.836,71	(12.017.316,67)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.324.042.254,00	2.584.690.192,19	195,21	2.828.034.733,59	(242.344.541,40)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.324.042.254,00	2.584.690.192,19	195,21	2.828.034.733,59	(242.344.541,40)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.000.000,00	253.504.193,45	487,51	2.173.081,00	221.331.112,45
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.000.000,00	253.504.193,45	487,51	32.173.081,00	221.331.112,45
Pendapatan Denda Pajak Daerah	42.121.364,00	81.481.046,41	193,44	2.967.170.185,65	(2.885.689.139,24)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	77.000,00	77.000,00	100,00	0,00	77.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.506.873,00	1.727.193,99	114,62	785.283,80	941.910,19
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	20.000.000,00	58.071.191,92	290,36	2.952.874.445,48	(2.894.803.253,56)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	531.491,00	531.491,50	100,00	2.879.890,21	(2.348.398,71)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.000.000,00	21.068.169,00	105,34	10.630.566,16	10.437.602,84
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	155.478,66	0,00	340.371,00	(184.892,34)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	32.175,00	(32.175,00)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	155.478,66	0,00	308.196,00	(152.717,34)
Pendapatan dari Pengembalian	73.280.527,00	716.856.932,00	978,24	122.368.015,00	590.928.717,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.134.727,00	99.015.886,00	977,00	26.903.862,00	68.551.824,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	63.145.800,00	617.841.046,00	978,44	95.464.153,00	522.376.893,00
Pendapatan BLUD	38.413.140.331,00	43.837.720.397,00	114,02	34.921.446.521,00	8.916.273.876,00
Pendapatan BLUD	38.413.140.331,00	43.837.720.397,00	114,02	34.921.446.521,00	8.916.273.876,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	50.159.008.039,00	54.124.554.822,92	107,91	48.069.173.944,96	6.055.380.877,96



Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Pendapatan Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	1.019.316.823.163,76	1.004.973.554.262,97

Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.019.316.823.163,76 atau 99,10 % dari anggaran Rp1.028.571.649.304,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.004.973.554.262,97 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.343.268.900,79 atau 1,43%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.624.450.818,00	967.508.351.279,00	98,46	971.033.500.596,00	(3.525.149.317,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.947.198.486,00	51.808.471.884,76	112,76	33.940.053.666,97	17.868.418.217,79
Jumlah	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10	1.004.973.554.262,97	14.343.268.900,79

5.1.1.e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	967.508.351.279,00	971.033.500.596,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp967.508.351.279,00 atau 98,46% dari anggaran Rp982.624.450.818,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp971.033.500.596,00 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.525.149.317,00, atau 0,36%. Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Dana Perimbangan	884.335.761.818,00	869.303.514.879,00	98,30	850.871.006.597,00	18.432.508.282,00
Dana Insentif Daerah	9.687.181.000,00	9.687.181.000,00	100,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00
Dana Desa	88.601.508.000,00	88.517.655.400,00	99,91	111.355.805.999,00	(22.838.150.599,00)
Jumlah	982.624.450.818,00	967.508.351.279,00	98,46	971.033.500.596,00	(3.525.149.317,00)



5.1.1.e.1 Dana Perimbangan

31 Desember 2022

869.303.514.879,00

31 Desember 2021

850.871.006.597,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp869.303.514.879,00 atau 98,30% dari anggaran Rp884.335.761.818,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp850.871.006.597,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.432.508.282,00 atau 2,17%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	169.742.775.719,00	173.867.865.713,00	102,43	167.709.708.682,00	6.158.157.031,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	560.402.241.000,00	559.137.113.257,00	99,77	559.646.545.000,00	(509.431.743,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.802.515.099,00	69.566.378.292,00	95,55	81.506.618.100,00	(11.940.239.808,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.388.230.000,00	66.732.157.617,00	81,99	42.008.134.815,00	24.724.022.802,00
Jumlah	884.335.761.818,00	869.303.514.879,00	98,30	850.871.006.597,00	18.432.508.282,00

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
DANA PERIMBANGAN	884.335.761.818,00	869.303.514.879,00	98,30	850.871.006.597,00	18.432.508.282,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	169.742.775.719,00	173.867.865.713,00	102,43	167.709.708.682,00	6.158.157.031,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	68.092.074.079,00	67.925.886.884,00	99,76	94.023.229.734,00	(26.097.342.850,00)
DBH PPh Pasal 21	5.831.523.322,00	4.556.697.000,00	78,14	5.196.928.000,00	(640.231.000,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	131.136.739,00	57.848.000,00	44,11	55.514.400,00	2.333.600,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	52,00	0,00	0,00	3.120.103,00	(3.120.103,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	19.496.000,00	0,00	1.082.600,00	18.413.400,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	184.534.000,00	0,00	111.954.409,00	72.579.591,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	301.701.000,00	0,00	1.061.603.250,00	(759.902.250,00)



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	86.093.541.589,00	82.973.581.829,00	96,38	36.036.582.522,00	46.936.999.307,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.809.661.862,00	15.889.810.000,00	203,46	29.213.966.038,00	(13.324.156.038,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	648.108.476,00	(648.108.476,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.357.619.150,00	600.691.850,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	560.402.241.000,00	559.137.113.257,00	99,77	559.646.545.000,00	(509.431.743,00)
DAU	560.402.241.000,00	559.137.113.257,00	99,77	559.646.545.000,00	(509.431.743,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.802.515.099,00	69.566.378.292,00	95,55	81.506.618.100,00	(11.940.239.808,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.312.659.000,00	1.309.653.600,00	99,77	748.721.500,00	560.932.100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.127.083.000,00	10.020.634.800,00	98,95	11.000.205.489,00	(979.570.689,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.660.443.000,00	6.638.925.800,00	99,68	2.698.548.500,00	3.940.377.300,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	380.000.000,00	361.565.333,00	95,15	98.900.000,00	262.665.333,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	3.664.755.914,00	(3.664.755.914,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	14.677.407.880,00	(14.677.407.880,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.217.302.000,00	2.106.259.092,00	94,99	995.031.117,00	1.111.227.975,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	12.471.853.211,00	11.243.090.200,00	90,15	0,00	11.243.090.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	762.482.688,00	733.244.672,00	96,17	0,00	733.244.672,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	815.128.000,00	798.372.450,00	97,94	1.047.196.800,00	(248.824.350,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	1.107.772.000,00	1.047.800.000,00	94,59	0,00	1.047.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.279.451.000,00	(5.279.451.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.447.125.000,00	12.384.280.000,00	99,50	16.085.571.720,00	(3.701.291.720,00)
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	11.491.549.400,00	(11.491.549.400,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	559.418.280,00	(559.418.280,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.763.332.000,00	5.734.034.500,00	99,49	5.047.934.500,00	686.100.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.212.495.000,00	4.600.821.000,00	88,27	1.965.714.000,00	2.635.107.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	13.524.840.200,00	12.587.696.845,00	93,07	0,00	12.587.696.845,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.562.965.000,00	(3.562.965.000,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.583.247.000,00	(2.583.247.000,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.388.230.000,00	66.732.157.617,00	81,99	42.008.134.815,00	24.724.022.802,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.232.650.000,00	26.336.140.507,00	90,09	0,00	26.336.140.507,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	28.486.286.000,00	26.477.428.555,00	92,95	28.366.530.000,00	(1.889.101.445,00)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.791.000.000,00	1.087.287.500,00	60,71	1.592.500.000,00	(505.212.500,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.171.002.000,00	5.663.974.445,00	78,98	5.637.603.000,00	26.371.445,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.113.400.000,00	3.058.467.000,00	98,24	3.225.900.000,00	(167.433.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	607.800.000,00	607.800.000,00	100,00	838.550.000,00	(230.750.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.200.060.000,00	0,00	0,00	50.132.702,00	(50.132.702,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	249.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.633.627.000,00	2.633.627.000,00	100,00	0,00	2.633.627.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.673.036.113,00	(1.673.036.113,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	412.352.000,00	391.242.610,00	94,88	381.383.000,00	9.859.610,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	431.000.000,00	416.190.000,00	96,56	242.500.000,00	173.690.000,00
Jumlah Dana Perimbangan	884.335.761.818,00	869.303.514.879,00	98,30	850.871.006.597,00	18.432.508.282,00



5.1.1.e.2	Dana Insentif Daerah	<u>31 Desember 2022</u> 9.687.181.000,00	<u>31 Desember 2021</u> 8.806.688.000,00
------------------	-----------------------------	---	---

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.687.181.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp9.687.181.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp8.806.688.000,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp880.493.000,00 atau 9,99%. Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dana Insentif Daerah (DID)	9.687.181.000,00	9.687.181.000,00	100,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00
Jumlah	9.687.181.000,00	9.687.181.000,00	100,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00

5.1.1.e.3	Dana Desa	<u>31 Desember 2022</u> 88.517.655.400,00	<u>31 Desember 2021</u> 111.355.805.999,00
------------------	------------------	--	---

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.517.655.400,00 atau 99,91% dari anggaran Rp88.601.508.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2021 sebesar Rp111.355.805.999,00 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.838.150.599,00 atau 20,51%. Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dana Desa	88.601.508.000,00	88.517.655.400,00	99,91	111.355.805.999,00	(22.838.150.599,00)
Jumlah	88.601.508.000,00	88.517.655.400,00	99,91	111.355.805.999,00	(22.838.150.599,00)

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terkait Dana Desa pada masing-masing desa di Kabupaten Seruyan TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.f.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>31 Desember 2022</u> 51.808.471.884,76	<u>31 Desember 2021</u> 33.940.053.666,97
-----------------	---	--	--

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.808.471.884,76 atau 112,76% dari anggaran Rp45.947.198.486,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp33.940.053.666,97 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.868.418.217,79 atau 52,65%. Rincian anggaran dan realisasi



Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil	45.947.198.486,00	51.808.471.884,76	112,76	33.940.053.666,97	17.868.418.217,79
Jumlah	45.947.198.486,00	51.808.471.884,76	112,76	33.940.053.666,97	17.868.418.217,79

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil

No	Kode Rekening	Uraian	Kredit
1	4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.170.381.513,98
2	4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.126.082.087,08
3	4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.108.709.920,22
4	4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	71.800.192,48
5	4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.331.498.171,00
Jumlah			51.808.471.884,76

5.1.1.g. Lain-lain Pendapatan yang Sah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
10.492.116.375,00 **25.143.482.422,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.492.116.375,00 atau 102,09% dari anggaran Rp10.276.841.735,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp25.143.482.422,00 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.651.366.047,00 atau 58,27%. Rincian anggaran dan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.17
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari:					
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.596.704.000,00	5.596.704.000,00	100	0,00	5.596.704.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS terdiri dari:					
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	20.265.142.897,00	(20.265.142.897,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.680.137.735,00	4.895.412.375,00	104,60	4.878.339.525,00	17.072.850,00
Jumlah	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09	25.143.482.422,00	-14.651.366.047,00

5.1.2.	Belanja	<u>31 Desember 2022</u> 1.071.565.463.005,51	<u>31 Desember 2021</u> 1.107.681.472.520,82
---------------	----------------	---	---

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.071.565.463.005,51 atau 82,63% dari pagu anggaran sebesar Rp1.296.879.680.318,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp1.107.681.472.520,82 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.116.009.515,31 atau 3,26%. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.18
Rincian Belanja

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Operasi	924.737.016.839,00	747.007.671.583,31	80,78	714.898.922.758,30	32.108.748.825,01
Belanja Modal	189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17	213.378.390.790,52	(53.674.655.706,32)
Belanja Tak Terduga	13.830.269.792,00	1.357.580.146,00	9,82	1.089.774.712,00	267.805.434,00
Belanja Transfer	168.567.409.233,00	163.496.476.192,00	96,99	178.314.384.260,00	(14.817.908.068,00)
Jumlah	1.296.879.680.318,00	1.071.565.463.005,51	82,63	1.107.681.472.520,82	(36.116.009.515,31)

Belanja Operasi	<u>31 Desember 2022</u> 747.007.671.583,31	<u>31 Desember 2021</u> 714.898.922.758,30
------------------------	---	---

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp747.007.671.583,31 atau 80,78% dari anggaran Rp924.737.016.839,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp714.898.922.758,30 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.108.748.825,01 atau 4,49%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai	429.527.013.024,54	366.213.212.937,00	85,26	329.783.903.018,82	36.429.309.918,18
Belanja Barang dan Jasa	438.242.296.438,46	329.372.640.412,31	75,16	317.828.524.792,48	11.544.115.619,83
Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.996.003,00	100,00	1.999.995.172,00	831,00
Belanja Hibah	31.035.029.375,00	29.943.448.031,00	96,48	52.584.982.175,00	(22.641.534.144,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Bantuan Sosial	23.932.678.001,00	19.478.374.200,00	81,39	12.701.517.600,00	6.776.856.600,00
Jumlah	924.737.016.839,00	747.007.671.583,31	80,78	714.898.922.758,30	32.108.748.825,01

5.1.2.a.	Belanja Pegawai	<u>31 Desember 2022</u> 366.213.212.937,00	<u>31 Desember 2021</u> 329.783.903.018,82
-----------------	------------------------	---	---

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp366.213.212.937,00 atau 85,26% dari anggaran Rp429.527.013.024,54. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp329.783.903.018,82 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp36.429.309.918,18 atau 11,05%. Anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20
Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	226.384.727.974,24	197.971.357.637,00	87,45	189.840.346.487,00	8.131.011.150,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	161.941.843.353,30	128.352.096.295,00	79,26	100.454.590.430,00	27.897.505.865,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.869.081.922,00	7.887.810.923,00	88,94	15.277.756.938,25	(7.389.946.015,25)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.332.853.861,00	12.273.808.158,00	99,52	13.734.583.378,00	(1.460.775.220,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	319.635.956,00	247.959.756,00	77,58	356.340.412,57	(108.380.656,57)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	697.600.000,00	601.600.000,00	86,24	712.480.000,00	(110.880.000,00)
Belanja Pegawai BLUD	18.981.269.958,00	18.878.580.168,00	99,46	9.407.805.373,00	9.470.774.795,00
	429.527.013.024,54	366.213.212.937,00	85,26	329.783.903.018,82	36.429.309.918,18

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :



Tabel 5.21
Rincian Belanja Pegawai

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1	Belanja Pegawai	429.527.013.024,54	366.213.212.937,00	85,26
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	226.384.727.974,24	197.971.357.637,00	87,45
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	161.808.368.138,74	146.085.176.596,00	90,28
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	147.036.625.138,74	141.200.614.196,00	96,03
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.771.743.000,00	4.884.562.400,00	33,07
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.572.234.023,00	13.892.401.582,00	83,83
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.505.923.048,00	13.456.556.402,00	92,77
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.066.310.975,00	435.845.180,00	21,09
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.951.867.917,00	6.291.523.209,00	90,50
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.951.867.917,00	6.291.523.209,00	90,50
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.368.055.388,00	8.904.560.000,00	85,88
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.743.537.387,00	8.379.251.000,00	95,83
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.624.518.001,00	525.309.000,00	32,34
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.313.760.403,00	2.060.357.000,00	62,18
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.504.670.403,00	2.055.177.000,00	82,05
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	809.090.000,00	5.180.000,00	0,64
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.056.356.423,00	9.273.176.356,00	83,87
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.618.674.582,00	8.947.793.296,00	93,03
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.437.681.841,00	325.383.060,00	22,63
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	550.356.259,00	349.956.072,00	63,59
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	547.856.258,00	349.956.072,00	63,88
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.500.001,00	0	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.709.762,50	2.186.848,00	9,63
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.244.533,50	2.138.328,00	9,61
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	465.229,00	48.520,00	10,43
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.938.414.102,00	9.906.984.521,00	71,08
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.225.135.087,00	9.622.786.692,00	72,76
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	713.279.015,00	284.197.829,00	39,84
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	530.780.098,00	301.486.487,00	56,80



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	495.358.655,00	291.849.457,00	58,92
5.1.1.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	35.421.443,00	9.637.030,00	27,21
5.1.1.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.269.605.460,00	903.548.966,00	71,17
5.1.1.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.162.983.582,00	874.482.149,00	75,19
5.1.1.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	106.621.878,00	29.066.817,00	27,26
5.1.1.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.220.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.040.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	180.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	161.941.843.353,30	128.352.096.295,00	79,26
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	52.410.559.514,80	37.249.999.381,00	71,07
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.472.764.519,80	36.032.890.719,00	81,02
5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.937.794.995,00	1.217.108.662,00	15,33
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	10.449.196.320,00	6.244.689.032,00	59,76
5.1.1.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	8.474.783.371,00	5.844.389.505,00	68,96
5.1.1.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	1.974.412.949,00	400.299.527,00	20,27
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.622.006.937,00	2.632.352.280,00	72,68
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.622.006.937,00	2.632.352.280,00	72,68
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	219.507.085,00	77.910.442,00	35,49
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	219.507.085,00	77.910.442,00	35,49
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	95.240.573.496,50	82.147.145.160,00	86,25
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	95.157.113.537,50	82.072.737.224,00	86,25
5.1.1.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	83.459.959,00	74.407.936,00	89,15



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.869.081.922,00	7.887.810.923,00	88,94
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	616.775.015,00	368.505.496,00	59,75
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.807.177,00	1.130.173,00	62,54
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	32.094.133,00	13.710.854,00	42,72
5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	408.000,00	408.000,00	100,00
5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.882.224,00	6.483.409,00	59,58
5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	373.322.865,00	279.992.151,00	75,00
5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.079.719,00	6.809.790,00	75,00
5.1.1.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.380.935,00	127.500,00	5,36
5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	59.422.828,00	12.077.193,00	20,32
5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	127.377.134,00	47.766.426,00	37,50
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.311.821,00	86.286.917,00	86,02
5.1.1.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.603.321,00	30.603.321,00	100,00
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	561.000,00	175.313,00	31,25
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.108.245,00	5.108.245,00	100,00
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.285.650,00	2.076.367,00	63,20
5.1.1.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.873.050,00	4.873.050,00	100,00
5.1.1.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.648.813,00	2.648.813,00	100,00
5.1.1.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	18.686.584,00	10.162.600,00	54,38



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah			
5.1.1.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	17.881,00	17.881,00	100,00
5.1.1.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	240.750,00	0	0,00
5.1.1.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.945.969,00	1.945.969,00	100,00
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.500.000,00	6.375.000,00	75,00
5.1.1.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	15.500.358,00	15.500.358,00	100,00
5.1.1.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.540.200,00	0	0,00
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	156.763.324,00	82.258.760,00	52,47
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	156.763.324,00	82.258.760,00	52,47
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	6.550.905.000,00	6.174.128.750,00	94,25
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.550.905.000,00	6.174.128.750,00	94,25
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.444.326.762,00	1.176.631.000,00	81,47
5.1.1.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.000.000,00	0	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.420.326.762,00	1.176.631.000,00	82,84
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.332.853.861,00	12.273.808.158,00	99,52
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	104.188.361,00	71.118.600,00	68,26
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	104.188.361,00	71.118.600,00	68,26
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	77.344.560,00	89,00
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	77.344.560,00	89,00
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
5.1.1.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.571.500,00	98.749.350,00	99,17
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.571.500,00	98.749.350,00	99,17
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.160.500.000,00	3.160.500.000,00	100,00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.160.500.000,00	3.160.500.000,00	100,00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	585.000,00	462.264,00	79,02
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	585.000,00	462.264,00	79,02
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.709.700.000,00	2.694.228.384,00	99,43
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	65.000.000,00	49.607.712,00	76,32
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00	1.155.168,00	96,26
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.500.000,00	3.465.504,00	99,01
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	100,00
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	100,00
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	100,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	319.635.956,00	247.959.756,00	77,58
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.579.038,00	54.600.000,00	84,55
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.579.038,00	54.600.000,00	84,55
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.528.000,00	3.528.000,00	63,82
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.528.000,00	3.528.000,00	63,82
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	107.540.000,00	98.280.000,00	91,39
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	107.540.000,00	98.280.000,00	91,39
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.345.200,00	3.476.160,00	65,03



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.345.200,00	3.476.160,00	65,03
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.180.796,00	1.902.192,00	87,22
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.180.796,00	1.902.192,00	87,22
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	101.920,00	1.200,00	1,18
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	101.920,00	1.200,00	1,18
5.1.1.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.382.720,00	5.362.560,00	84,02
5.1.1.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.382.720,00	5.362.560,00	84,02
5.1.1.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	604.640,00	112.320,00	18,58
5.1.1.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	604.640,00	112.320,00	18,58
5.1.1.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	844.640,00	336.960,00	39,89
5.1.1.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	844.640,00	336.960,00	39,89
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	103.798.100,00	65.030.371,00	62,65
5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	318.914,00	199.442,00	62,54
5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	5.663.670,00	2.419.560,00	42,72
5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	96.000,00	72.000,00	75,00
5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.920.392,00	1.144.127,00	59,58
5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	65.880.506,00	49.410.378,00	75,00
5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.602.303,00	1.201.727,00	75,00
5.1.1.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	420.165,00	22.500,00	5,36
5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.486.381,00	2.131.268,00	20,32
5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.409.769,00	8.429.369,00	48,42



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	22.730.902,00	15.329.993,00	67,44
5.1.1.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	7.200.781,00	5.400.586,00	75,00
5.1.1.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	99.000,00	30.937,00	31,25
5.1.1.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.301.940,00	901.455,00	69,24
5.1.1.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	579.821,00	366.417,00	63,19
5.1.1.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	1.146.600,00	859.950,00	75,00
5.1.1.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	623.250,00	467.437,00	75,00
5.1.1.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.600.000,00	1.200.000,00	75,00
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	4.043.790,00	1.793.396,00	44,35
5.1.1.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.207,00	3.155,00	74,99
5.1.1.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	26.750,00	0	0,00
5.1.1.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	457.875,00	343.406,00	75,00
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.500.000,00	1.125.000,00	75,00
5.1.1.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	3.875.088,00	2.838.254,00	73,24
5.1.1.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-	271.800,00	0	0,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing			
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	697.600.000,00	601.600.000,00	86,24
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	297.600.000,00	201.600.000,00	67,74
5.1.1.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	297.600.000,00	201.600.000,00	67,74
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	18.981.269.958,00	18.878.580.168,00	99,46
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	18.981.269.958,00	18.878.580.168,00	99,46
5.1.1.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	18.981.269.958,00	18.878.580.168,00	99,46
Jumlah		429.527.013.024,54	366.213.212.937,00	85,26

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Belanja Pegawai pada SKPD

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan /Penurunan
Dinas Pendidikan	184.470.646.803,00	140.970.771.789,00	76,42	139.540.382.676,00	1.430.389.113,00
Dinas Kesehatan	46.920.308.338,54	43.845.200.109,00	93,45	34.816.745.454,08	9.028.454.654,92
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	25.006.854.546,00	23.217.871.630,00	92,85	15.271.372.557,00	7.946.499.073,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	14.444.702.817,00	14.374.157.228,00	99,51	10.454.982.801,00	3.919.174.427,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.317.138.063,00	8.015.631.822,00	86,03	7.246.953.834,00	768.677.988,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	4.142.116.304,00	4.014.717.213,00	96,92	3.044.913.153,00	969.804.060,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.165.306.609,00	2.857.075.527,00	90,26	3.532.540.133,00	(675.464.606,00)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.300.819.409,00	1.815.714.668,00	78,92	0	1.815.714.668,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.067.670.298,00	2.757.071.173,00	89,88	2.501.649.201,00	255.421.972,00
Dinas Sosial	3.351.674.779,00	3.296.132.083,00	98,34	2.730.484.432,00	565.647.651,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.862.785.102,00	3.660.234.691,00	94,76	3.256.329.391,00	403.905.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.237.410.175,00	3.913.175.359,00	92,35	3.412.422.076,00	500.753.283,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan /Penurunan
Dinas Lingkungan Hidup	3.683.176.766,00	2.875.145.825,00	78,06	2.863.576.820,00	11.569.005,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.096.897.052,00	3.339.015.179,00	81,50	3.177.402.096,00	161.613.083,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.577.283.940,00	2.513.150.756,00	97,51	2.306.968.812,00	206.181.944,00
Dinas Perhubungan	4.159.730.012,00	4.057.350.082,00	97,54	3.546.532.095,00	510.817.987,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	3.167.798.633,00	2.681.006.055,00	84,63	2.593.398.561,00	87.607.494,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	3.389.997.681,00	2.702.013.249,00	79,71	2.189.131.979,00	512.881.270,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.111.403.055,00	3.071.654.567,00	98,72	2.643.172.001,00	428.482.566,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	3.212.041.493,00	2.939.846.062,00	91,53	2.667.690.886,00	272.155.176,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.558.356.060,00	2.392.674.316,00	93,52	1.873.848.534,00	518.825.782,00
Dinas Perikanan	4.032.438.828,00	3.725.417.027,00	92,39	2.875.919.532,00	849.497.495,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8.352.486.854,00	7.413.336.917,00	88,76	6.828.460.360,00	584.876.557,00
Sekretariat Daerah	15.589.272.348,00	14.126.792.953,00	90,62	11.986.234.065,00	2.140.558.888,00
Inspektorat Daerah	4.381.499.824,00	4.265.626.607,00	97,36	3.619.349.832,00	646.276.775,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.360.120.654,00	3.891.937.747,00	89,26	3.451.907.711,00	440.030.036,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7.722.336.511,00	5.901.377.781,00	76,42	5.428.535.828,00	472.841.953,00
Badan Pendapatan Daerah	6.123.955.600,00	4.789.124.342,00	78,20	4.986.184.940,74	(197.060.598,74)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.631.300.159,00	3.071.704.325,00	84,59	2.679.815.429,00	391.888.896,00
Sekretariat DPRD	16.481.755.606,00	16.051.018.971,00	97,39	17.016.855.127,00	(965.836.156,00)
Kecamatan Seruyan Hilir	3.609.511.022,00	3.459.517.606,00	95,84	3.136.609.914,00	322.907.692,00
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.581.796.144,00	1.513.322.944,00	95,67	1.340.103.396,00	173.219.548,00
Kecamatan Danau Sembuluh	1.984.682.614,00	1.965.584.100,00	99,04	1.618.537.088,00	347.047.012,00
Kecamatan Seruyan Raya	2.100.681.096,00	2.033.294.407,00	96,79	1.661.746.272,00	371.548.135,00
Kecamatan Danau Seluluk	1.598.759.603,00	1.508.401.890,00	94,35	1.356.930.421,00	151.471.469,00
Kecamatan Hanau	2.671.335.641,00	2.649.095.362,00	99,17	2.265.893.222,00	383.202.140,00
Kecamatan Batu Ampar	1.257.120.463,00	1.247.295.119,00	99,22	1.289.358.397,00	(42.063.278,00)
Kecamatan Seruyan Tengah	2.797.902.800,00	2.506.457.154,00	89,58	2.457.401.365,00	49.055.789,00
Kecamatan Seruyan Hulu	2.347.319.544,00	2.331.841.548,00	99,34	2.046.775.580,00	285.065.968,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan /Penurunan
Kecamatan Suling Tambun	1.828.345.419,00	1.738.630.017,00	95,09	1.693.098.302,00	45.531.715,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.830.274.359,00	2.713.826.737,00	95,89	2.373.688.745,00	340.137.992,00
Jumlah	429.527.013.024,54	366.213.212.937,00	85,26	329.783.903.018,82	36.429.309.918,18

5.1.2.b. Belanja Barang dan Jasa **31 Desember 2022**
329.372.640.412,31 **31 Desember 2021**
317.828.524.792,48

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp329.372.640.412,31 atau 75,16% dari anggaran Rp438.242.296.438,46. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp317.828.524.792,48 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.544.115.619,83 atau 3,63%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Barang	101.679.578.607,70	54.392.166.115,00	53,49	47.679.073.065,75	6.713.093.049,25
Belanja Jasa	173.329.250.935,76	148.068.240.787,42	85,43	153.866.528.325,24	(5.798.287.537,82)
Belanja Pemeliharaan	18.438.474.251,00	12.352.040.944,00	66,99	20.924.058.929,62	(8.572.017.985,62)
Belanja Perjalanan Dinas	77.978.271.042,00	62.942.748.932,87	80,72	61.805.807.221,00	1.136.941.711,87
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.057.570.000,00	9.822.401.560,00	39,20	5.232.455.000,00	4.589.946.560,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.292.650.000,00	22.765.418.496,19	112,19	16.323.230.397,59	6.442.188.098,60
Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.466.501.602,00	19.029.623.576,83	88,65	11.997.371.853,28	7.032.251.723,55
Jumlah	438.242.296.438,46	329.372.640.412,31	75,16	317.828.524.792,48	11.544.115.619,83

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.242.296.438,46	329.372.640.412,31	75,16
5.1.2.01	Belanja Barang	101.679.578.607,70	54.392.166.115,00	53,49
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.673.278.607,70	54.385.866.115,00	53,49
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.128.411.648,00	915.862.470,00	11,27
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.136.960.540,00	2.061.745.403,00	16,99
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.269.220.681,00	6.600.576.996,00	79,82
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	207.612.500,00	66.445.000,00	32,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	22.570.785.628,00	2.415.171.847,00	10,70
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.132.700,00	8.155.800,00	73,26
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	165.300.000,00	152.929.000,00	92,52
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.438.892.250,00	1.323.902.100,00	92,01
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.126.690.030,00	1.095.063.565,00	97,19
5.1.2.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	400.534.725,00	397.458.000,00	99,23
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	642.400,00	200.000,00	31,13
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	623.687.700,00	303.409.090,00	48,65
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	630.000,00	630.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.309.336.330,00	1.212.915.213,00	92,64
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.808.867.500,00	1.697.739.635,00	93,86
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.864.135.262,00	4.918.037.529,00	83,87
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	578.490.000,00	563.536.000,00	97,41
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	932.452.000,00	840.592.685,00	90,15
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.351.242.455,00	1.256.190.013,00	92,97
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	551.905.000,00	523.784.000,00	94,90
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.108.000,00	25.020.000,00	99,65
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	921.172.000,00	842.207.900,00	91,43
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	676.801.000,00	611.970.650,00	90,42
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.461.487.885,70	1.346.723.061,00	92,15
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.229.936.171,00	2.116.039.083,00	94,89
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.195.771.478,00	1.817.224.807,00	56,86
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.157.472.400,00	4.645.990.340,00	90,08
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	64.020.000,00	63.935.400,00	99,87
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.993.679.000,00	5.027.629.319,00	62,90
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.343.979.000,00	2.263.343.340,00	96,56



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	307.731.000,00	278.876.000,00	90,62
5.1.2.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.999.145.000,00	1.484.969.160,00	74,28
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	64.750.000,00	64.702.500,00	99,93
5.1.2.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.000.000,00	17.814.000,00	98,97
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	278.250.000,00	271.994.630,00	97,75
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	423.795.000,00	415.429.794,00	98,03
5.1.2.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.250.000,00	61.216.500,00	99,95
5.1.2.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	5.109.375.000,00	5.011.112.525,00	98,08
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	900.000,00	900.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	109.818.000,00	109.074.400,00	99,32
5.1.2.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	20.600.000,00	18.946.875,00	91,98
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	174.532.000,00	173.859.255,00	99,61
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	438.165.000,00	418.465.550,00	95,50
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	964.565.000,00	788.584.890,00	81,76
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	136.696.324,00	136.141.790,00	99,59
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	173.329.250.935,76	148.068.240.787,42	85,43
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	133.471.807.707,76	115.590.086.317,57	86,60
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.600.000,00	2.620.575.000,00	68,06
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.197.230.000,00	1.544.582.500,00	70,30
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	88.600.000,00	17.350.000,00	19,58
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.644.180.000,00	3.527.000.000,00	96,78
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	37.200.000,00	19.200.000,00	51,61
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.200.000,00	15.600.000,00	41,94
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	151.600.000,00	89.000.000,00	58,71
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	286.800.000,00	277.500.000,00	96,76
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.730.150.000,00	15.791.700.000,00	89,07
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.948.061.157,00	27.063.010.017,57	93,49
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.515.250.000,00	1.411.250.000,00	93,14



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.245.300.000,00	5.116.595.000,00	97,55
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.289.900.000,00	2.121.830.000,00	92,66
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.687.750.000,00	9.875.000,00	0,59
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.2.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	183.600.000,00	161.100.000,00	87,75
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.065.050.000,00	21.343.650.000,00	92,54
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	833.025.000,00	779.649.000,00	93,59
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	561.400.000,00	531.190.000,00	94,62
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.468.100.000,00	5.203.950.000,00	95,17
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.242.200.000,00	4.007.900.000,00	94,48
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.302.100.000,00	3.003.822.500,00	90,97
5.1.2.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	471.000.000,00	459.000.000,00	97,45
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	105.700.000,00	86.700.000,00	82,02
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.500.000,00	58.200.000,00	63,61
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	302.210.000,00	256.888.300,00	85,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	56.334.000,00	3.037.204,00	5,39
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	207.531.000,00	176.361.350,00	84,98
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.400.000,00	398.700,00	16,61
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	365.000.000,00	282.514.000,00	77,40
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	189.800.000,00	178.191.500,00	93,88
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	87.192.400,00	87.103.500,00	99,90
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.534.200.000,00	4.168.746.000,00	91,94
5.1.2.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.375.000,00	0	0,00
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	60.000.000,00	37.043.511,00	61,74
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	74.500.000,00	31.700.000,00	42,55
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	33.830.000,00	8.919.213,00	26,36
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	679.321.137,76	425.743.853,00	62,67
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.147.037.604,60	4.033.062.171,00	78,36
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.823.780.000,00	6.721.540.800,00	98,50



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.163.086.408,40	2.688.251.695,00	84,99
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	105.125.000,00	58.226.050,00	55,39
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	746.970.000,00	352.703.457,00	47,22
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	2.875.600.000,00	0	0,00
5.1.2.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	1.429.552.000,00	407.704.996,00	28,52
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	405.467.000,00	273.721.000,00	67,51
5.1.2.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.573.831.980,00	17.870.124.757,85	96,21
5.1.2.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	996.078.636,00	990.011.592,00	99,39
5.1.2.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	15.302.700.000,00	15.202.425.400,00	99,34
5.1.2.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	1.271.760.000,00	1.174.768.300,00	92,37
5.1.2.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	254.617.030,00	182.202.302,00	71,56
5.1.2.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	588.676.314,00	235.464.435,00	40,00
5.1.2.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	160.000.000,00	85.252.728,85	53,28
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	831.190.000,00	693.053.752,00	83,38
5.1.2.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	144.200.000,00	143.550.000,00	99,55
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	381.000.000,00	294.124.920,00	77,20
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.750.000,00	20.750.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi	15.645.000,00	15.395.000,00	98,40
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	25.480.000,00	25.480.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	94.000.000,00	80.000.000,00	85,11
5.1.2.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	26.779.000,00	89,26
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.000.000,00	0	0,00
5.1.2.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	51.615.000,00	23.080.000,00	44,72
5.1.2.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	42.600.000,00	38.994.832,00	91,54
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.695.690.000,00	641.094.600,00	37,81
5.1.2.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.2.02.05.0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.800.000,00	75.675.000,00	47,36



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	17.700.000,00	11.450.000,00	64,69
5.1.2.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	65.500.000,00	41.750.000,00	63,74
5.1.2.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.000.000,00	53.513.600,00	99,10
5.1.2.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	101.700.000,00	99.700.000,00	98,03
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.242.990.000,00	305.006.000,00	24,54
5.1.2.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	17.700.000,00	98,33
5.1.2.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	18.000.000,00	17.700.000,00	98,33
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.232.569.248,00	9.659.872.535,00	67,87
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	53.550.000,00	52.980.500,00	98,94
5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.603.118.136,00	3.032.221.605,00	84,16
5.1.2.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	368.701.000,00	366.441.150,00	99,39
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.086.830.450,00	818.994.820,00	75,36
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	4.050.000.000,00	1.879.515.755,00	46,41
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000,00	19.730.250,00	98,65
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.918.514.953,00	1.480.059.880,00	77,15
5.1.2.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.161.165.000,00	925.276.820,00	79,69
5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	466.100.709,00	463.989.505,00	99,55
5.1.2.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	20.000.000,00	1.976.000,00	9,88
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.484.589.000,00	618.686.250,00	41,67
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	198.731.625,00	99,37
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	99.386.625,00	99,39
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.287.662.000,00	3.382.577.200,00	78,89
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	370.000.000,00	325.000.000,00	87,84
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.103.500.000,00	2.245.575.200,00	72,36
5.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	806.512.000,00	804.352.000,00	99,73
5.1.2.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.500.000,00	15.000.000,00	81,08
5.1.2.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	18.500.000,00	15.000.000,00	81,08
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	18.438.474.251,00	12.352.040.944,00	66,99
5.1.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	575.000.000,00	74.800.000,00	13,01
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	250.000.000,00	0	0,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	250.000.000,00	0	0,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.606.985.100,00	7.518.363.991,00	70,88
5.1.2.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Pompa	65.000.000,00	39.520.000,00	60,80
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.242.250.000,00	2.013.231.353,00	62,09
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.254.254.000,00	2.626.661.103,00	80,71
5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.331.010.000,00	786.985.955,00	59,13
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.011.230.500,00	594.126.435,00	58,75
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85.000.000,00	51.790.000,00	60,93
5.1.2.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.200.000,00	55.167.000,00	99,94
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	140.000.000,00	110.109.000,00	78,65



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	131.500.000,00	125.725.350,00	95,61
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.350.000,00	12.973.900,00	84,52
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	434.120.000,00	409.172.499,00	94,25
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.400.000,00	18.385.500,00	99,92
5.1.2.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	66.580.000,00	27.415.000,00	41,18
5.1.2.03.02.0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.2.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	480.846.900,00	427.120.223,00	88,83
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	242.743.700,00	186.885.673,00	76,99
5.1.2.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.000.000,00	15.600.000,00	97,50
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.827.346.122,00	1.854.439.694,00	48,45
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.729.921.122,00	1.558.323.294,00	90,08
5.1.2.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	4.650.000,00	4.340.000,00	93,33
5.1.2.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	183.500.000,00	182.973.900,00	99,71
5.1.2.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.662.000.000,00	61.800.000,00	3,72
5.1.2.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	47.275.000,00	47.002.500,00	99,42
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	200.000.000,00	0	0,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.342.650.770,00	2.295.945.000,00	98,01



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	248.187.500,00	247.850.000,00	99,86
5.1.2.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	130.000.000,00	129.500.000,00	99,62
5.1.2.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	630.000.000,00	626.404.000,00	99,43
5.1.2.03.04.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	199.955.770,00	199.300.000,00	99,67
5.1.2.03.04.0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	200.000.000,00	199.341.000,00	99,67
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	934.507.500,00	893.550.000,00	95,62
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.086.492.259,00	608.492.259,00	56,01
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	1.086.492.259,00	608.492.259,00	56,01
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	77.978.271.042,00	62.942.748.932,87	80,72
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.978.271.042,00	62.942.748.932,87	80,72
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.109.846.042,00	54.770.142.187,87	84,12
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.318.405.000,00	905.013.900,00	68,64
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.480.455.000,00	7.216.842.845,00	62,86
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.265.000,00	13.750.000,00	52,35
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.300.000,00	37.000.000,00	85,45
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.057.570.000,00	9.822.401.560,00	39,20
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.539.770.000,00	6.379.467.000,00	97,55
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	211.500.000,00	151.450.000,00	71,61
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	167.250.000,00	121.750.000,00	72,80
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.811.020.000,00	4.756.267.000,00	98,86
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.517.800.000,00	3.442.934.560,00	18,59
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	181.180.000,00	150.680.000,00	83,17
5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18.336.620.000,00	3.292.254.560,00	17,95
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.292.650.000,00	22.765.418.496,19	112,19
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.292.650.000,00	22.765.418.496,19	112,19



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.292.650.000,00	22.765.418.496,19	112,19
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.466.501.602,00	19.029.623.576,83	88,65
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.466.501.602,00	19.029.623.576,83	88,65
5.1.2.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.466.501.602,00	19.029.623.576,83	88,65
Jumlah		438.242.296.438,46	329.372.640.412,31	75,16

Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Belanja Barang dan Jasa pada SKPD

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dinas Pendidikan	62.331.619.819,00	59.271.890.947,19	95,09	46.877.109.388,59	12.394.781.558,60
Dinas Kesehatan	51.052.020.165,46	45.073.665.083,57	88,29	47.776.816.350,05	(2.703.151.266,48)
Rumah Sakit Umum Daerah	20.069.211.347,00	16.723.357.098,00	83,33	15.286.734.429,00	1.436.622.669,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	18.086.084.893,00	17.656.929.795,83	97,63	14.167.407.294,28	3.489.522.501,55
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	22.320.910.796,00	20.141.866.726,67	90,24	33.300.080.951,98	(13.158.214.225,31)
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	3.956.988.360,00	3.614.198.796,00	91,34	5.710.645.645,00	(2.096.446.849,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	5.030.984.179,00	4.842.642.430,00	96,26	8.208.514.162,00	(3.365.871.732,00)
Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan	3.472.867.086,00	3.251.377.073,00	93,62	0,00	3.251.377.073,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.368.342.680,00	12.602.440.451,00	46,05	12.332.715.394,00	269.725.057,00
Dinas Sosial	3.076.370.718,00	2.249.124.817,00	73,11	2.806.745.214,00	(557.620.397,00)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.082.552.936,00	1.930.642.626,00	92,71	1.883.855.470,00	46.787.156,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.483.587.878,00	4.608.724.948,00	84,05	3.759.114.262,00	849.610.686,00
Dinas Lingkungan Hidup	67.540.313.596,00	18.793.123.880,20	27,83	10.557.563.465,00	8.235.560.415,20
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.794.328.960,00	2.631.340.686,00	94,17	3.359.460.568,00	(728.119.882,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.303.691.330,00	4.239.360.278,00	98,51	5.174.624.926,00	(935.264.648,00)
Dinas Perhubungan	2.321.868.568,00	2.105.571.663,00	90,68	4.131.916.875,00	(2.026.345.212,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.424.902.756,00	3.150.984.144,00	92,00	2.988.140.643,00	162.843.501,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	8.762.946.304,00	8.464.622.731,00	96,60	2.524.579.368,00	5.940.043.363,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.207.461.640,00	2.142.877.841,00	97,07	2.229.483.874,00	(86.606.033,00)



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	7.163.596.480,00	3.704.996.748,00	51,72	2.621.500.879,00	1.083.495.869,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.293.795.432,00	1.178.666.572,00	91,10	1.319.080.900,00	(140.414.328,00)
Dinas Perikanan	2.340.768.035,00	2.172.952.429,00	92,83	3.875.184.520,00	(1.702.232.091,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.510.762.679,00	4.806.476.649,00	87,22	6.523.967.787,00	(1.717.491.138,00)
Sekretariat Daerah	21.666.786.896,00	20.711.623.569,00	95,59	18.833.615.144,00	1.878.008.425,00
Inspektorat Daerah	5.134.406.096,00	3.975.666.740,00	77,43	3.277.524.056,00	698.142.684,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	3.925.497.436,00	3.380.293.581,00	86,11	3.476.913.246,00	(96.619.665,00)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	24.253.824.106,00	8.802.032.581,85	36,29	5.905.139.467,21	2.896.893.114,64
Badan Pendapatan Daerah	4.385.869.370,00	4.092.266.106,00	93,31	3.178.904.807,00	913.361.299,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.543.656.381,00	4.144.469.350,00	91,21	3.680.145.978,00	464.323.372,00
Sekretariat DPRD	24.832.480.568,00	22.466.423.091,00	90,47	24.692.935.344,37	(2.226.512.253,37)
Kecamatan Seruyan Hilir	4.124.787.310,00	4.090.004.278,00	99,16	4.311.116.839,00	(221.112.561,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.339.386.042,00	1.264.549.369,00	94,41	1.339.847.701,00	(75.298.332,00)
Kecamatan Danau Sembuluh	851.432.440,00	823.971.520,00	96,77	780.977.564,00	42.993.956,00
Kecamatan Seruyan Raya	929.133.036,00	880.343.782,00	94,75	822.754.128,00	57.589.654,00
Kecamatan Danau Seluluk	1.057.696.240,00	894.139.288,00	84,54	1.004.026.728,00	(109.887.440,00)
Kecamatan Hanau	1.369.840.919,00	1.343.967.658,00	98,11	1.281.383.925,00	62.583.733,00
Kecamatan Batu Ampar	1.318.357.322,00	1.218.603.368,00	92,43	1.049.577.204,00	169.026.164,00
Kecamatan Seruyan Tengah	2.534.032.504,00	2.147.821.309,00	84,76	1.940.727.480,00	207.093.829,00
Kecamatan Seruyan Hulu	1.017.551.897,00	993.920.289,00	97,68	1.280.698.673,00	(286.778.384,00)
Kecamatan Suling Tambun	1.181.981.024,00	1.120.738.051,00	94,82	974.988.608,00	145.749.443,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.779.600.214,00	1.663.972.068,00	93,50	2.582.005.534,00	(918.033.466,00)
JUMLAH	438.242.296.438,46	329.372.640.412,31	75,16	317.828.524.792,48	11.544.115.619,83

5.1.2.c. Belanja Bunga **31 Desember 2022**
0,00 **31 Desember 2021**
0,00

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

5.1.2.d. Belanja Subsidi **31 Desember 2022**
1.999.996.003,00 **31 Desember 2021**
1.999.995.172,00

Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.999.996.003,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp1.999.995.172,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp831,00 atau 0,000042%.



Belanja Subsidi diberikan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Tabel 5.26
Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.996.003,00	99,99	1.999.995.172,00	831,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.999.996.003,00	99,99	1.999.995.172,00	831,00

5.1.2.e.	Belanja Hibah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		29.943.448.031,00	52.584.982.175,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.943.448.031,00 atau 96,48% dari pagu anggaran sebesar Rp31.035.029.375,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp52.584.982.175,00 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.641.534.144,00 atau 43,06%. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.27
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.900.000.000,00	9.805.285.210,00	99,04	7.581.999.700,00	2.223.285.510,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	3.883.062.100,00	(3.883.062.100,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.504.812.375,00	19.507.945.821,00	95,14	40.489.703.375,00	(20.981.757.554,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00	630.217.000,00	0,00
Jumlah	31.035.029.375,00	29.943.448.031,00	96,48	52.584.982.175,00	(22.641.534.144,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.28
Rincian Belanja Hibah

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.5	Belanja Hibah	31.035.029.375,00	29.943.448.031,00	96,48
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.900.000.000,00	9.805.285.210,00	99,04
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.500.000.000,00	9.406.750.900,00	99,02
5.1.5.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.500.000.000,00	9.406.750.900,00	99,02
5.1.5.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	400.000.000,00	398.534.310,00	99,63
5.1.5.01.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	400.000.000,00	398.534.310,00	99,63
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.504.812.375,00	19.507.945.821,00	95,14
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.271.512.375,00	14.656.426.761,00	95,97
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.129.029.500,00	4.726.515.656,00	92,15
5.1.5.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.142.482.875,00	9.929.911.105,00	97,90
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.998.093.000,00	1.726.718.060,00	86,42
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	994.255.000,00	778.750.000,00	78,32
5.1.5.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	703.838.000,00	699.359.760,00	99,36
5.1.5.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	248.608.300,00	82,87
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.235.207.000,00	3.124.801.000,00	96,59
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.235.207.000,00	3.124.801.000,00	96,59
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
Jumlah		31.035.029.375,00	29.943.448.031,00	96,48



Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.29

Rincian Belanja Hibah pada SKPD

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan	1.914.413.000,00	1.910.370.200,00	99,79	4.716.691.000,00	(2.806.320.800,00)
Dinas Kesehatan	400.000.000,00	249.750.000,00	62,44	324.325.000,00	(74.575.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	17.717.569.875,00	17.396.027.665,00	98,19	27.532.460.395,00	(10.136.432.730,00)
Dinas Sosial	174.029.500,00	174.029.500,00	100,00	23.407.000,00	150.622.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	700.000.000,00	399.893.228,00	57,13	680.607.000,00	(280.713.772,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	25.248.000,00	(25.248.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.080.207.000,00	1.079.709.350,00	99,95	1.125.207.000,00	(45.497.650,00)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	2.125.878.200,00	(2.125.878.200,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	149.600.000,00	(149.600.000,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	3.070.000.000,00	3.070.000.000,00	100,00	3.883.062.100,00	(813.062.100,00)
Dinas Perikanan	495.920.000,00	493.079.760,00	99,43	8.476.713.480,00	(7.983.633.720,00)
Sekretariat Daerah	3.689.255.000,00	3.499.282.928,00	94,85	1.675.875.000,00	1.823.407.928,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Kecamatan Seruyan Hilir	216.168.000,00	214.700.000,00	99,32	121.691.000,00	93.009.000,00
Kecamatan Seruyan Tengah	121.250.000,00	90.680.000,00	74,79	0,00	90.680.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.456.217.000,00	1.365.925.400,00	93,80	1.624.217.000,00	(258.291.600,00)
Jumlah	31.035.029.375,00	29.943.448.031,00	96,48	52.584.982.175,00	(22.641.534.144,00)

5.1.2.f.	Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2022</u> 19.478.374.200,00	<u>31 Desember 2021</u> 12.701.517.600,00
-----------------	-------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.478.374.200,00 atau 81,39% dari anggaran sebesar Rp23.932.678.001,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp12.701.517.600,00, maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.776.856.600,00 atau 53,35%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:



Tabel 5.30
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.526.023.001,00	5.165.063.050,00	54,22	12.507.417.600,00	(7.342.354.550,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	14.383.005.000,00	14.313.311.150,00	99,52	194.100.000,00	14.119.211.150,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	23.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	23.932.678.001,00	19.478.374.200,00	81,39	12.701.517.600,00	6.776.856.600,00

Rincian Penerima Bantuan Sosial TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.932.678.001,00	19.478.374.200,00	81,39
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.526.023.001,00	5.165.063.050,00	54,22
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.270.273.001,00	4.910.700.000,00	52,97
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.270.273.001,00	4.910.700.000,00	52,97
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	255.750.000,00	254.363.050,00	99,46
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	255.750.000,00	254.363.050,00	99,46
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	14.383.005.000,00	14.313.311.150,00	99,52
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	318.715.000,00	318.708.250,00	100,00
5.1.6.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	318.715.000,00	318.708.250,00	100,00
5.1.6.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.064.290.000,00	13.994.602.900,00	99,50
5.1.6.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.064.290.000,00	13.994.602.900,00	99,50
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	23.650.000,00	0,00	0,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada	23.650.000,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	23.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah		23.932.678.001,00	19.478.374.200,00	81,39

Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Belanja Bantuan Sosial pada SKPD

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.064.290.000,00	13.994.602.900,00	99,50	10.181.517.600,00	3.813.085.300,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	3.123.715.000,00	3.103.708.250,00	99,36	2.347.000.000,00	756.708.250,00
Dinas Sosial	6.064.600.000,00	1.715.063.050,00	28,28	0,00	1.715.063.050,00
Sekretariat Daerah	680.073.001,00	665.000.000,00	97,78	173.000.000,00	492.000.000,00
Jumlah	23.932.678.001,00	19.478.374.200,00	81,39	12.701.517.600,00	6.776.856.600,00

5.1.2.g. Belanja Modal **31 Desember 2022**
159.703.735.084,20 **31 Desember 2021**
213.378.390.790,52

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.703.735.084,20 atau 84,17% dari anggaran Rp189.744.984.454,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp213.378.390.790,52, maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp53.674.655.706,32 atau 25,15%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.33
Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.943.808.988,00	48.875.920.215,00	81,54	74.927.643.949,91	(26.051.723.734,91)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.778.870.347,00	31.520.633.822,00	79,24	40.971.060.481,47	(9.450.426.659,47)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.943.705.119,00	77.887.865.307,20	89,58	96.672.379.004,14	(18.784.513.696,94)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.078.600.000,00	1.419.315.740,00	46,10	807.307.355,00	612.008.385,00
Jumlah	189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17	213.378.390.790,52	(53.674.655.706,32)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Belanja Modal

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.943.808.988,00	48.875.920.215,00	81,54
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	10.488.500.000,00	7.656.640.386,00	73,00
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.500.000.000,00	2.771.833.578,00	79,20
5.2.2.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	3.500.000.000,00	2.771.833.578,00	79,20
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.988.500.000,00	4.884.806.808,00	69,90
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.016.000.000,00	949.860.550,00	93,49
5.2.2.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	2.972.500.000,00	2.862.700.000,00	96,31
5.2.2.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	3.000.000.000,00	1.072.246.258,00	35,74
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	18.208.276.916,00	14.084.138.624,00	77,35
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.041.276.916,00	10.926.905.174,00	72,65
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.333.150.000,00	1.328.400.000,00	99,64
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	347.161.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.589.826.328,00	2.180.100.000,00	60,73
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.896.139.588,00	2.305.905.174,00	79,62
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.875.000.000,00	5.112.500.000,00	74,36
5.2.2.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	3.105.000.000,00	3.095.234.400,00	99,69
5.2.2.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.105.000.000,00	3.095.234.400,00	99,69
5.2.2.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	62.000.000,00	61.999.050,00	100,00
5.2.2.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	62.000.000,00	61.999.050,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	375.874.117,00	370.816.120,00	98,65
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	114.000.000,00	113.670.000,00	99,71
5.2.2.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.2.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	110.000.000,00	109.670.000,00	99,70



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	258.920.000,00	257.146.120,00	99,31
5.2.2.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	133.420.000,00	133.101.120,00	99,76
5.2.2.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	125.500.000,00	124.045.000,00	98,84
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.954.117,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03.0006	Belanja Modal Oscilloscope	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	954.117,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.005.180.060,00	4.705.960.003,00	94,02
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.226.995.910,00	1.113.484.427,00	90,75
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	303.320.250,00	297.950.475,00	98,23
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	923.675.660,00	815.533.952,00	88,29
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.088.796.150,00	2.909.639.705,00	94,20
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.038.142.000,00	1.003.413.615,00	96,65
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	226.750.000,00	169.053.000,00	74,55
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	574.647.500,00	562.622.850,00	97,91
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	89.040.000,00	85.014.340,00	95,48
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.159.196.650,00	1.088.515.900,00	93,90
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	689.388.000,00	682.835.871,00	99,05
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	113.121.000,00	108.750.770,00	96,14
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	170.666.000,00	170.182.770,00	99,72
5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	123.984.000,00	123.673.442,00	99,75
5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	52.176.000,00	51.829.000,00	99,33
5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	201.841.000,00	201.052.889,00	99,61
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.600.000,00	27.347.000,00	99,08
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	413.908.000,00	371.220.000,00	89,69
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	357.608.000,00	316.820.000,00	88,59
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.176.000,00	5.106.000,00	98,65
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	106.482.000,00	67.844.000,00	63,71



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2.2.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	223.950.000,00	222.104.000,00	99,18
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	22.000.000,00	21.766.000,00	98,94
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.150.000,00	10.400.000,00	93,27
5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	11.150.000,00	10.400.000,00	93,27
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	6.150.000,00	6.000.000,00	97,56
5.2.2.06.03.0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	39.000.000,00	38.000.000,00	97,44
5.2.2.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	39.000.000,00	38.000.000,00	97,44
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.829.985.152,00	9.191.433.445,00	84,87
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.362.356.012,00	8.737.823.445,00	84,32
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	728.560.890,00	639.825.500,00	87,82
5.2.2.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	47.930.056,00	45.767.850,00	95,49
5.2.2.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	231.000.000,00	216.790.907,00	93,85
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.707.276.244,00	2.243.081.113,00	82,85
5.2.2.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	359.959.555,00	329.503.485,00	91,54
5.2.2.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.070.900.000,00	1.063.177.781,00	99,28
5.2.2.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	100.000.000,00	90.775.300,00	90,78
5.2.2.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	620.607.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	940.000.000,00	843.334.000,00	89,72
5.2.2.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	150.200.000,00	149.668.305,00	99,65
5.2.2.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	701.000.000,00	457.775.956,00	65,30
5.2.2.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	12.100.000,00	10.387.000,00	85,84
5.2.2.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.692.822.267,00	2.647.736.248,00	98,33
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	467.629.140,00	453.610.000,00	97,00
5.2.2.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	467.629.140,00	453.610.000,00	97,00
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.855.128.360,00	4.586.605.769,00	94,47
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.122.423.660,00	3.853.927.069,00	93,49
5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	800.000.000,00	538.664.879,00	67,33



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2.2.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	1.322.423.660,00	1.320.390.190,00	99,85
5.2.2.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	2.000.000.000,00	1.994.872.000,00	99,74
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.450.000,00	4.424.000,00	99,42
5.2.2.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	4.450.000,00	4.424.000,00	99,42
5.2.2.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	728.254.700,00	728.254.700,00	100,00
5.2.02.08.05.0001	Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	728.254.700,00	728.254.700,00	100,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	7.570.895.383,00	7.230.836.868,00	95,51
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.955.023.474,00	5.831.028.918,00	97,92
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	300.000.000,00	299.743.000,00	99,91
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.243.644.774,00	4.126.777.068,00	97,25
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.411.378.700,00	1.404.508.850,00	99,51
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.615.871.909,00	1.399.807.950,00	86,63
5.2.2.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.009.383.909,00	909.734.750,00	90,13
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	605.488.000,00	489.073.200,00	80,77
5.2.2.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.500.000.000,00	0	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Modal Sumur	1.500.000.000,00	0	0,00
5.2.2.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	1.500.000.000,00	0	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	669.000.000,00	652.750.000,00	97,57
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontoha	669.000.000,00	652.750.000,00	97,57
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	669.000.000,00	652.750.000,00	97,57
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	25.561.000,00	25.519.000,00	99,84
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	25.561.000,00	25.519.000,00	99,84
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	25.561.000,00	25.519.000,00	99,84
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.778.870.347,00	31.520.633.822,00	79,24
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.328.373.600,00	30.309.780.822,00	79,08
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.185.471.000,00	24.235.205.272,00	75,30
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.897.820.500,00	2.273.602.800,00	46,42
5.2.3.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	900.000.000,00	149.699.999,00	16,63
5.2.3.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	863.000.000,00	859.295.000,00	99,57
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.170.734.000,00	7.126.948.700,00	99,39
5.2.3.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	199.867.500,00	99,93



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2.3.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.052.390.500,00	1.545.463.223,00	30,59
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.304.000.000,00	7.213.082.050,00	98,76
5.2.3.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	150.000.000,00	149.680.000,00	99,79
5.2.3.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.700.000.000,00	2.693.765.000,00	99,77
5.2.3.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.069.443.000,00	1.065.199.000,00	99,60
5.2.3.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	950.000.000,00	947.103.000,00	99,70
5.2.3.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	928.083.000,00	11.499.000,00	1,24
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.142.902.600,00	6.074.575.550,00	98,89
5.2.3.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.394.962.500,00	1.390.464.500,00	99,68
5.2.3.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	4.747.940.100,00	4.684.111.050,00	98,66
5.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Menara	148.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	148.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	148.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.302.496.747,00	1.210.853.000,00	92,96
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.302.496.747,00	1.210.853.000,00	92,96
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.302.496.747,00	1.210.853.000,00	92,96
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.943.705.119,00	77.887.865.307,20	89,58
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.242.124.119,00	46.017.870.684,20	86,43
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	50.544.284.523,00	44.515.591.184,20	88,07
5.2.4.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.300.018.955,00	36.443.003.185,20	86,15
5.2.4.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	6.792.928.100,00	6.635.029.499,00	97,68
5.2.4.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	123.300.000,00	123.000.000,00	99,76
5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.328.037.468,00	1.314.558.500,00	98,99
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.697.839.596,00	1.502.279.500,00	55,68
5.2.4.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.896.566.500,00	827.556.000,00	43,63
5.2.4.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	782.500.000,00	674.723.500,00	86,23
5.2.4.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	18.773.096,00	0,00	0,00
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.025.581.000,00	22.961.266.500,00	99,72
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.506.820.000,00	15.501.709.000,00	99,97
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	15.506.820.000,00	15.501.709.000,00	99,97
5.2.4.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.313.761.000,00	4.280.582.000,00	99,23



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5.2.4.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.113.761.000,00	2.101.097.000,00	99,40
5.2.4.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.200.000.000,00	2.179.485.000,00	99,07
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.205.000.000,00	3.178.975.500,00	99,19
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.905.000.000,00	2.879.730.500,00	99,13
5.2.4.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	300.000.000,00	299.245.000,00	99,75
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	9.550.000.000,00	7.816.786.523,00	81,85
5.2.4.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	8.800.000.000,00	7.816.786.523,00	88,83
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.600.000.000,00	796.786.523,00	49,80
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	7.200.000.000,00	7.020.000.000,00	97,50
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	750.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	750.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.126.000.000,00	1.091.941.600,00	96,98
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.126.000.000,00	1.091.941.600,00	96,98
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.126.000.000,00	1.091.941.600,00	96,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.078.600.000,00	1.419.315.740,00	46,10
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.500.000.000,00	907.157.725,00	36,29
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.500.000.000,00	907.157.725,00	36,29
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.500.000.000,00	907.157.725,00	36,29
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	55.100.000,00	55.100.000,00	100,00
5.2.5.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
5.2.5.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
5.2.5.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
5.2.5.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	523.500.000,00	457.058.015,00	87,31
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	523.500.000,00	457.058.015,00	87,31
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	523.500.000,00	457.058.015,00	87,31
Jumlah		189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17

Rincian Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.35
Belanja Modal pada SKPD

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan	31.518.489.347,00	26.974.704.121,00	85,58	25.763.354.676,29	1.211.349.444,71
Dinas Kesehatan	21.490.339.468,00	20.231.215.597,00	94,14	3.881.357.515,00	16.349.858.082,00
Rumah Sakit Umum Daerah	12.271.643.384,00	9.385.146.280,00	76,48	9.942.270.607,00	(557.124.327,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	5.450.011.160,00	5.367.458.996,00	98,49	8.819.158.946,00	(3.451.699.950,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	72.010.593.185,00	68.229.747.104,20	94,75	96.936.725.351,30	(28.706.978.247,10)
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.095.278.100,00	1.088.798.900,00	99,41	1.573.101.527,00	(484.302.627,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	104.030.000,00	101.124.920,00	97,21	0,00	101.124.920,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.999.056.500,00	14.852.485.278,00	55,01	32.434.058.000,00	(17.581.572.722,00)
Dinas Sosial	77.000.000,00	73.080.000,00	94,91	8.990.000,00	64.090.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	90.727.500,00	87.926.500,00	96,91	45.560.000,00	42.366.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	906.000.000,00	885.753.800,00	97,77	1.037.169.200,00	(151.415.400,00)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	4.092.222.328,00	1.497.349.496,00	36,59	27.080.000,00	1.470.269.496,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	445.111.509,00	443.989.000,00	99,75	629.852.800,00	(185.863.800,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	34.750.000,00	34.700.000,00	99,86	0,00	34.700.000,00
Dinas Perhubungan	83.578.096,00	64.180.000,00	76,79	1.497.265.000,00	(1.433.085.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	475.465.000,00	474.413.000,00	99,78	150.850.000,00	323.563.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.824.143.617,00	415.771.400,00	14,72	11.470.264.800,00	(11.054.493.400,00)
Dinas Penanaman	129.025.000,00	129.025.000,00	100,00	132.125.000,00	(3.100.000,00)



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	137.851.150,00	74.216.000,00	53,84	235.412.000,00	(161.196.000,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	677.986.000,00	658.129.583,00	97,07	394.717.930,00	263.411.653,00
Dinas Perikanan	1.807.000,00	1.807.000,00	100,00	1.837.702.800,00	(1.835.895.800,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	25.470.000,00	23.725.000,00	93,15	4.160.255.234,00	(4.136.530.234,00)
Sekretariat Daerah	772.348.360,00	769.402.950,00	99,62	4.353.593.600,00	(3.584.190.650,00)
Inspektorat Daerah	248.213.000,00	244.507.407,00	98,51	149.580.000,00	94.927.407,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	338.704.250,00	335.313.990,00	99,00	682.682.000,00	(347.368.010,00)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3.200.998.000,00	3.064.432.200,00	95,73	603.620.000,00	2.460.812.200,00
Badan Pendapatan Daerah	690.842.500,00	675.453.340,00	97,77	215.947.000,00	459.506.340,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	655.413.000,00	(655.413.000,00)
Sekretariat DPRD	2.444.340.000,00	2.424.539.222,00	99,19	4.159.409.103,93	(1.734.869.881,93)
Kecamatan Seruyan Hilir	209.500.000,00	200.720.000,00	95,81	570.867.500,00	(370.147.500,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00	23.712.000,00	(16.692.000,00)
Kecamatan Danau Sembuluh	16.499.000,00	16.050.000,00	97,28	0,00	16.050.000,00
Kecamatan Seruyan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Danau Seluluk	24.804.000,00	24.725.250,00	99,68	44.440.000,00	(19.714.750,00)
Kecamatan Hanau	0,00	0,00	0,00	122.239.500,00	(122.239.500,00)
Kecamatan Batu Ampar	113.086.000,00	112.624.000,00	99,59	14.400.000,00	98.224.000,00
Kecamatan Seruyan Tengah	505.280.000,00	501.854.000,00	99,32	586.447.500,00	(84.593.500,00)
Kecamatan Seruyan Hulu	69.271.000,00	69.125.250,00	99,79	24.497.000,00	44.628.250,00
Kecamatan Suling Tambun	102.500.000,00	102.231.000,00	99,74	49.766.200,00	52.464.800,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.000.000,00	60.989.500,00	99,98	144.505.000,00	(83.515.500,00)
Jumlah	189.744.984.454,00	159.703.735.084,20	84,17	213.378.390.790,52	(53.674.655.706,32)



5.1.2.h.	Belanja Tidak Terduga	<u>31 Desember 2022</u> 1.357.580.146,00	<u>31 Desember 2021</u> 1.089.774.712,00
-----------------	------------------------------	---	---

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.357.580.146,00 atau 9,82% dari anggaran Rp13.830.269.792,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp1.089.774.712,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp267.805.434,00 atau 24,57%.

Tabel 5.36
Belanja Tak Terduga

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Tak Terduga	13.830.269.792,00	1.357.580.146,00	9,82	1.089.774.712,00	267.805.434,00
Jumlah	13.830.269.792,00	1.357.580.146,00	9,82	1.089.774.712,00	267.805.434,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan disalurkan berdasarkan permohonan penyaluran oleh dinas teknis dalam hal ini Bantuan Sosial Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Bantuan Sosial Kebakaran oleh Dinas Sosial, Bantuan Duka Cita oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesra, serta Darurat Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/420/2022 tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Seruyan Tahun 2022, Tanggal 03 September 2022 digunakan untuk membiayai Korban Banjir di wilayah Kabupaten Seruyan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan untuk santunan korban kebakaran	182.000.000,00
2	Bantuan untuk santunan uang duka	392.500.000,00
3	Bantuan berobat	375.582.710,00
4	BTT banjir	407.497.436,00
Jumlah		1.357.580.146,00

5.1.2.i.	Belanja Transfer	<u>31 Desember 2022</u> 163.496.476.192,00	<u>31 Desember 2021</u> 178.314.384.260,00
-----------------	-------------------------	---	---

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.496.476.192,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp168.567.409.233,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp178.314.384.260,00, maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.817.908.068,00 atau 8,30%, Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:



Tabel 5.38
Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Bagi Hasil	6.461.404.233,00	1.479.323.792,00	22,89	2.357.934.761,00	(878.610.969,00)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi	490.000.000,00	485.000.000,00	98,98	245.000.000,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	161.616.005.000,00	161.532.152.400,00	99,95	175.711.449.499,00	(14.179.297.099,00)
Jumlah	168.567.409.233,00	163.496.476.192,00	96,99	178.314.384.260,00	(14.817.908.068,00)

- Bagi Hasil Daerah**

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.479.323.792,00 atau sebesar 22,89% dari anggaran sebesar Rp6.461.404.233,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp2.357.934.761,00 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp878.610.969,00 atau 37,267%.

Untuk rincian alokasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi**

Realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp485.000.000,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp490.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Dalam Rangka Renovasi Anjungan Provinsi Kalteng di TMII dengan Pagu Anggaran Rp240.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.000.000,00 atau 100% serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Teransponder TVRI dengan Pagu Anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.000.000,00 atau 98,00%.

Tabel 5.39
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Dalam Rangka Renovasi Anjungan Provinsi Kalteng di TMII	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Teransponder TVRI	250.000.000,00	245.000.000,00	98,00
Jumlah	490.000.000,00	485.000.000,00	99,95

- Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Kepada Pemerintah Desa pada Tahun 2022 sebesar Rp161.532.152.400,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp161.616.005.000,00 yang terdiri dari Transfer Alokasi Dana Desa dengan Pagu Anggaran Rp73.014.497.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.014.497.000,00 atau 100% serta Transfer Dana Desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp88.601.508.000,00 dan Realisasi sebesar Rp88.517.655.400,00 atau 99,91%.



Tabel 5.40
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Alokasi Dana Desa	73.014.497.000,00	73.014.497.000,00	100,00
Dana Desa	88.601.508.000,00	88.517.655.400,00	99,91
Jumlah	161.616.005.000,00	161.532.152.400,00	99,95

5.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp154.189.478.543,31 dan Rp161.680.263.070,24, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.41
Pembiayaan Netto

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SiLPA	145.417.832.425,00	154.189.478.543,31	106,03	161.680.263.070,24	(7.490.784.526,93)
Pengeluaran Pembiayaan					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	132.455.332.425,00	141.226.978.543,31	106,62	148.717.763.070,24	(7.490.784.526,93)

5.1.3.a.	Penerimaan Pembiayaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		154.189.478.543,31	161.680.263.070,24

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.189.478.543,31 dari pagu anggaran sebesar Rp145.417.832.425,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan TA 2021 sebesar Rp161.680.263.070,24, maka penerimaan pembiayaan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.490.784.527 atau 4,63%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari SiLPA Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran dan menutupi defisit TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SiLPA	145.417.832.425,00	154.189.478.543,31	106,03	161.680.263.070,24	(7.490.784.527)
Jumlah	145.417.832.425,00	154.189.478.543,31	106,03	161.680.263.070,24	(7.490.784.527)



5.1.3.b.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>31 Desember 2022</u> 12.962.500.000,00	<u>31 Desember 2021</u> 12.962.500.000,00
-----------------	-------------------------------	--	--

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.962.500.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp12.962.500.000,00. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan TA 2021 sebesar Rp12.962.500.000,00, maka pengeluaran pembiayaan TA 2022 tidak ada kenaikan dan penurunan atau 0%.

Tabel 5.43
Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pengeluaran Pembiayaan					
Penyertaan Modal Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00
Jumlah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 sebesar Rp12.962.500.000,00 berupa penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 5.44
Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	00654/SP2D/LS/5.02.01/03/2022	08 Maret 2022	12.962.500.000,00
Jumlah			12.962.500.000,00

5.1.4.	Pembiayaan Netto	<u>31 Desember 2022</u> 141.226.978.543,31	<u>31 Desember 2021</u> 148.717.763.070,24
---------------	-------------------------	---	---

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.226.978.543,31 atau 106,62% dari pagu anggaran sebesar Rp132.455.332.425,00. Jika dibandingkan dengan pembiayaan netto TA 2021 sebesar Rp148.717.763.070,24, maka pembiayaan netto TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.490.784.526,93 atau 5,03%.

5.1.5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>31 Desember 2022</u> 181.903.486.780,35	<u>31 Desember 2021</u> 154.189.478.543,31
---------------	---	---	---

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Lalu Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31, sebagai berikut:



Tabel 5.45
SiLPA Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan dan Belanja:				
Realisasi Pendapatan	1.112.241.971.242,55	1.113.153.187.993,89	(0,08)	(911.216.751,34)
Realisasi Belanja	1.071.565.463.005,51	929.367.088.260,82	15,30	142.198.374.744,69
Surplus (Defisit) Anggaran	40.676.508.237,04	5.471.715.473,07	643,40	35.204.792.763,97
Pembiayaan:				
Penerimaan Pembiayaan	154.189.478.543,31	161.680.263.070,24	(4,63)	(7.490.784.526,93)
Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	141.226.978.543,31	148.717.763.070,24	(5,04)	(7.490.784.526,93)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	17,97	27.714.008.237,04

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Lalu Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.46
Rincian SiLPA Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	170.205.279.326,08	138.401.219.000,45
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	10.869.794.528,89	13.373.663.504,72
Kas Dana BOS	338.448.675,66	1.458.964.225,85
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	489.964.249,72	955.631.812,29
Kas Lainnya	-	-
Jumlah	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal SILPA/SIKPA, Koreksi dan SAL Akhir. Berikut adalah rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Tabel 5.47
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Saldo Anggaran Lebih Awal	154.189.478.543,31	161.680.263.070,24	(7.490.784.526,93)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	154.189.478.543,31	161.680.263.070,24	(7.490.784.526,93)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp154.189.478.543,31 dan Rp161.680.263.070,24

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp154.189.478.543,31 dan Rp161.680.263.070,24.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta dan aset sebesar Rp3.149.918.226.452,09, Kewajiban sebesar Rp5.774.095.442,60 dan Ekuitas sebesar Rp3.144.144.131.009,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Neraca

Aset	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Aset	3.149.918.226.452,09	3.350.345.723.865,29	(200.427.497.413,20)	(5,98)
Kewajiban	5.774.095.442,60	23.671.598.173,87	(17.897.502.731,27)	(75,61)
Ekuitas	3.144.144.131.009,49	3.326.674.125.691,42	(182.529.994.681,93)	(5,49)

5.3.1 ASET

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	3.149.918.226.452,09	3.350.345.723.865,29

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.149.918.226.452,09 dan Rp3.350.345.723.865,29 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.49

Aset

Aset	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	286.947.066.987,98	277.230.451.561,13	9.716.615.426,85	3,5
Investasi Jangka Panjang	80.443.980.424,00	68.873.300.627,00	11.570.679.797,00	16,8
Aset Tetap	2.664.992.574.990,09	2.910.579.781.119,87	(245.587.206.129,78)	(8,44)
Aset Lainnya	117.534.604.050,02	93.662.190.557,29	23.872.413.492,73	25,49
Jumlah	3.149.918.226.452,09	3.350.345.723.865,29	(200.427.497.413,20)	(5,98)

Berdasarkan rincian pada tabel dia atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp200.427.497.413,20 atau 5,98%.

5.3.1.a.

Aset Lancar

31 Desember 2022

286.947.066.987,98

31 Desember 2021

277.230.451.561,13

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan Aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp286.947.066.987,98 dan Rp277.230.451.561,13.

Tabel 5.50

Rincian Aset Lancar

Aset	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	170.205.279.326,08	138.401.219.000,45	31.804.060.325,63	22,98
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	10.869.794.528,89	13.373.663.504,72	(2.503.868.975,83)	(18,72)
Kas Dana BOS	338.448.675,66	1.458.964.225,85	(1.120.515.550,19)	(76,80)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	489.964.249,72	955.631.812,29	(465.667.562,57)	(48,73)
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	6.323.708.469,58	7.315.118.609,58	(991.410.140,00)	(13,55)
Piutang Retribusi Daerah	159.041.400,00	282.497.260,00	(123.455.860,00)	(43,70)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.197.053.698,02	17.886.627.834,16	(16.689.574.136,14)	(93,31)
Piutang Transfer Antar Daerah	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86	(2.579.664.055,98)	(16,94)
Piutang Lainnya	44.910.000,00	0,00	44.910.000,00	100,00
Penyisihan Piutang	(2.905.935.607,91)	(3.508.424.013,51)	602.488.405,60	17,17
Beban Dibayar Dimuka	267.838.607,52	231.848.745,16	35.989.862,36	15,52
Persediaan	87.307.378.974,54	85.604.055.860,57	1.703.323.113,97	1,99
Jumlah	286.947.066.987,98	277.230.451.561,13	9.716.615.426,85	3,50



Saldo Aset lancar pada Tahun 2022 sebesar Rp286.947.066.987,98 mengalami kenaikan sebesar Rp9.716.615.426,85 atau 3,50% dari tahun 2021 sebesar Rp277.230.451.561,13 terdiri dari:

Kas dan Setara Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31 terdiri dari:

Tabel 5.51
Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	170.205.279.326,08	138.401.219.000,45	31.804.060.325,63	22,98
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	489.964.249,72	955.631.812,29	(465.667.562,57)	(48,73)
Kas Dana BOS	338.448.675,66	1.458.964.225,85	(1.120.515.550,19)	(76,80)
Kas di Bendahara BLUD	10.869.794.528,89	13.373.663.504,72	(2.503.868.975,83)	(18,72)
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04	17,97

5.3.1.a.1	Kas di Kas Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		170.205.279.326,08	138.401.219.000,45

Merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terdapat pada beberapa Bank sebagai berikut:

Tabel 5.52
Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Jenis Rek	Nomor Rek	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bank Kalteng	Giro	301-010-1000051	170.204.279.326,08	20.332.615.075,76	149.871.664.250,32	737,10
2	Bank Mandiri	Giro	159-00-0300002-2	0,00	248,69	(248,69)	(100,00)
3	Bank BNI	Giro	007-9928266	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Bank BRI	Giro	0163-01-001165-30-2	0,00	67.603.676,00	(67.603.676,00)	(100,00)
Total Giro				170.205.279.326,08	20.401.219.000,45	149.804.060.325,63	734,29
5	Bank Kalteng	Deposito	301-0301-00098-0	0,00	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
6	Bank Kalteng	Deposito	301-0301-00015-9	0,00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	(100,00)
7	Bank BNI	Deposito	952432846	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank BNI	Deposito	1329014118	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
9	Bank BRI	Deposito	0163-01-002639-40-1	0,00	14.000.000.000,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
10	Bank BRI	Deposito	0163-01-002634-40-1	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Nama Bank	Jenis Rek	Nomor Rek	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Bank BRI	Deposito	0163-01-001989-40-5	0,00	35.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)	(100,00)
Total Deposito				0,00	118.000.000.000,00	(118.000.000.000,00)	(100,00)
Total Saldo Bank				170.205.279.326,08	138.401.219.000,45	31.804.060.325,63	22,98
Saldo Kas Daerah (Buku)				170.205.279.326,08	138.401.219.000,45	31.804.060.325,63	22,98
Selisih/Perbedaan				0,00	0,00	0,00	0,00

Selisih/perbedaan saldo Kas Daerah Tahun 2022 di Bank dengan Saldo Buku sebesar 0,00. Kas yang dibatasi penggunaannya (Kas Dana Desa) tahun 2021 dicatat pada Akun Aset Lainnya sebesar Rp710.619.238,00 direklas ke Kas Daerah pada Tahun 2022. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-50/PK/PK.II/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Pemberitahuan Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Atas Sisa Dana Desa TA 2015 sampai dengan 2019 di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota bahwa dilakukan pemotongan penyaluran DAU/DBH TA 2022 sebesar SiLPA tersebut dan atas pelaksanaan pemotongan penyaluran tersebut, maka sisa dana desa yang tercatat pada RKUD dapat digunakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

5.3.1.a.2	Kas di Bendahara Penerimaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.a.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.a.4	Kas di Bendahara BLUD	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		10.869.794.528,89	13.373.663.504,72

Saldo Kas di Bendahara BLUD Tahun 2022 sebesar Rp10.869.794.528,89 dan kas pada bendahara BLUD Tahun 2021 sebesar Rp13.373.663.504,72, kas ini merupakan saldo kas Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dan RSUD Hanau. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan data saldo kas yang disampaikan oleh direktur RSUD Kuala Pembuang dan RSUD Hanau kepada BKAD dalam rangka permohonan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B). Rincian kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.53
Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di BLUD RSUD Kuala Pembuang	8.130.928.915,00	11.263.258.430,00	(3.132.329.515,00)	(27,81)
Kas di BLUD RSUD Hanau	2.738.865.613,89	2.110.405.074,72	628.460.539,17	29,78
Jumlah	10.869.794.528,89	13.373.663.504,72	(2.503.868.975,83)	(18,72)



Pada tahun 2022 Kas di Bendahara BLUD mengalami penurunan sebesar Rp2.503.868.975,83 atau 18,72% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara BLUD tahun 2021 sebesar 13.373.663.504,72.

5.3.1.a.5	Kas Dana BOS	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		338.448.675,66	1.458.964.225,85

Saldo Kas Dana BOS Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp338.448.675,66 dan Rp1.458.964.225,85, merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 yang dikelola secara langsung oleh Bendahara BOS pada SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan data belanja yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam bentuk permohonan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) yang dikeluarkan oleh BKAD selaku BUD.

Tabel 5.54
Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas Dana BOS	338.448.675,66	1.458.964.225,85	(1.120.515.550,19)	(76,80)
Jumlah	338.448.675,66	1.458.964.225,85	(1.120.515.550,19)	(76,80)

Saldo Kas Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp338.448.675,66 mengalami penurunan sebesar Rp1.120.515.550,19 atau 76,80% jika dibandingkan dengan saldo Kas Dana BOS Tahun 2021. Rincian saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.a.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		489.964.249,72	955.631.812,29

Saldo Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp489.964.249,72 dan Rp955.631.812,29. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 yang dikelola secara langsung oleh Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diseluruh Kabupaten Seruyan yang berjumlah 12 Puskesmas serta merupakan bagian dari Kas Daerah. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan lampiran data-data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada BKAD dalam bentuk permohonan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) yang dikeluarkan oleh BKAD selaku BUD. Dimana rincian saldo kas di rekening JKN dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.a.7	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, begitu juga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Piutang Pendapatan Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	20.374.298.233,48	40.713.492.425,60



Saldo Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.374.298.233,48. Ada penurunan sebesar Rp20.339.194.192,12 atau 49,96% dari tahun 2021 sebesar Rp40.713.492.425,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Piutang Pendapatan Daerah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pajak Daerah	6.323.708.469,58	7.315.118.609,58	(991.410.140,00)	(13,55)
Piutang Retribusi Daerah	159.041.400,00	282.497.260,00	(123.455.860,00)	(43,70)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.197.053.698,02	17.886.627.834,16	(16.689.574.136,14)	(93,31)
Piutang Transfer	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86	(2.579.664.055,98)	(16,94)
Piutang Lainnya	44.910.000,00	0,00	44.910.000,00	100,00
Jumlah Piutang Pendapatan	20.374.298.233,48	40.713.492.425,60	(20.339.194.192,12)	(49,96)

5.3.1.a.8 Piutang Pajak Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
6.323.708.469,58 **7.315.118.609,58**

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.323.708.469,58. Ada penurunan sebesar Rp991.410.140,00 atau 13,55% dari tahun 2021 sebesar Rp7.315.118.609,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pajak Reklame	26.054.860,96	39.506.940,96	(13.452.080,00)	(34,05)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	372.978.535,47	372.978.535,47	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	412.542.668,15	404.081.827,15	8.460.841,00	2,09
Piutang PBB P2	5.498.532.405,00	6.484.951.306,00	(986.418.901,00)	(15,21)
Piutang BPHTB	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak Daerah	6.323.708.469,58	7.315.118.609,58	(991.410.140,00)	(13,55)

5.3.1.a.8.1 Piutang Pajak Reklame **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
26.054.860,96 **39.506.940,96**

Piutang Pajak Reklame merupakan Piutang Pajak Reklame melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang merupakan Pajak Reklame yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.054.860,96 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp39.506.940,96 dengan rincian piutang pajak reklame disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57
Piutang Pajak Reklame

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pajak Reklame	26.054.860,96	39.506.940,96	(13.452.080,00)	34,05

Rincian Piutang Pajak Reklame disajikan per tahun sebagai berikut:



Tabel 5.58
Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi tambah & (kurang)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2022	0,00	0,00	3.142.860,00	0,00	3.142.860,00
2	2021	5.352.940,00	0,00	0,00	(5.352.940,00)	0,00
3	2020	13.797.000,00	0,00	0,00	(11.242.000,00)	2.555.000,00
4	2019	21.006,96	0,00	0,00	0,00	21.006,96
5	2017-2018	20.335.994,00	0,00	0,00	0,00	20.335.994,00
	Saldo	39.506.940,96	0,00	3.142.860,00	(16.594.940,00)	26.054.860,96

Mutasi Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.59
Mutasi Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	39.506.940,96	42.489.264,96
2	Penambahan	3.142.860,00	5.533.827,00
3	Koreksi tambah nilai saldo awal piutang	0,00	0,00
4	Pembayaran (Pengurangan)	(16.594.940,00)	(8.516.151,00)
	Saldo Akhir	26.054.860,96	39.506.940,96

5.3.1.a.8.2 Piutang Pajak Penerangan Jalan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
372.978.535,47 **372.978.535,47**

Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp372.978.535,47 dari tahun 2017-2018 dengan rincian piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60
Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	372.978.535,47	372.978.535,47	0,00	0,00

Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi tambah & (kurang)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2017-2018	372.978.535,47	0,00	0,00	0,00	372.978.535,47
	Saldo	372.978.535,47	0,00	0,00	0,00	372.978.535,47

Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.62
Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	372.978.535,47	372.978.535,47
2	Penambahan	-	-
3	Pembayaran (Pengurangan)	-	-
	Saldo Akhir	372.978.535,47	372.978.535,47

5.3.1.a.8.3 Piutang Pajak Air Tanah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
412.542.668,15 **404.081.827,15**

Piutang Pajak Air Tanah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang merupakan Pajak Air Tanah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp412.542.668,15 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp404.081.827,15 dengan rincian piutang Pajak Air Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63
Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pajak Air Tanah	412.542.668,15	404.081.827,15	8.460.841,00	2,09

Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi tambah & (kurang)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2022	0,00	0,00	8.958.545,00	0,00	8.958.545,00
2	2021	498.017,00	0,00	0,00	(497.704,00)	313,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15
5	2017-2018	403.583.799,00	0,00	0,00	0,00	403.583.799,00
	Saldo	404.081.827,15	0,00	8.958.545,00	(497.704,00)	412.542.668,15

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.65
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	404.081.827,15	410.470.176,15
2	Penambahan	8.958.545,00	1.100.869,00
3	Pembayaran (Pengurangan)	(497.704,00)	(7.489.218,00)
	Saldo Akhir	412.542.668,15	404.081.827,15



5.3.1.a.8.4 Piutang PBB P2

31 Desember 2022
5.498.532.405,00

31 Desember 2021
6.484.951.306,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.498.532.405,00 dengan perbandingan tahun 2021 Rp6.484.951.306,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66
Piutang PBB-P2

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang PBB P2	5.498.532.405,00	6.484.951.306,00	(986.418.901,00)	(15,21)

Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Piutang Pajak PBBP2

No	Uraian	Saldo Awal 2022 (Rp)	Koreksi tambah & (kurang)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2014	785.215.487,00	0	0	363.654.275,00	421.561.212,00
2	2015	648.623.280,00	0	0	460.890.579,00	187.732.701,00
3	2016	610.912.243,00	0	0	567.039.596,00	43.872.647,00
4	2017	573.495.878,00	0	0	1.495.922,00	571.999.956,00
5	2018	680.138.070,00	0	0	5.188.431,00	674.949.639,00
6	2019	900.463.998,00	0	0	13.180.899,00	887.283.099,00
7	2020	1.130.451.062,00	0	0	6.395.840,00	1.124.055.222,00
8	2021	1.155.651.288,00	0	0	148.723.382,00	1.006.927.906,00
9	2022	0	0	3.180.183.844,00	2.600.033.821,00	580.150.023,00
Saldo		6.484.951.306,00	0	3.180.183.844,00	4.166.602.745,00	5.498.532.405,00

Mutasi Piutang PBB P2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.68
Mutasi Piutang PBB-P2

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	6.484.951.306,00	7.960.493.349,00
2	Penambahan Piutang PBB P2	3.180.183.844,00	1.155.651.288,00
3	Pembayaran	(4.166.602.745,00)	(264.546.236,00)
4	Penghapusan Piutang	0,00	(2.366.647.095,00)
5	Koreksi	0,00	0,00
	Saldo Akhir	5.498.532.405,00	6.484.951.306,00



5.3.1.a.8.5 Piutang BPHTB

31 Desember 2022

13.600.000,00

31 Desember 2021

13.600.000,00

Piutang BPHTB melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan pajak BPHTB yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.600.000,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp13.600.000,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.69
Piutang BPHTB

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang BPHTB	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00

Mutasi Piutang BPHTB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.70
Mutasi Piutang BPHTB

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	13.600.000,00	13.600.000,00
2	Penambahan	-	-
3	Pembayaran (Pengurangan)	-	-
	Saldo Akhir	13.600.000,00	13.600.000,00

5.3.1.a.9. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2022

159.041.400,00

31 Desember 2021

282.497.260,00

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp159.041.400,00 dan Rp282.497.260,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.71
Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	66.895.250,00	237.494.460,00	(170.599.210,00)	(71,83)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.760.000,00	300.000,00	22.460.000,00	7.486,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.386.150,00	44.702.800,00	24.683.350,00	55,22
Jumlah Piutang Retribusi	159.041.400,00	282.497.260,00	(123.455.860,00)	(43,70)

Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 mencatatkan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya dari Dinas Kesehatan, karena pada tahun 2022 RSUD Hanau sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/85/2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hanau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.



5.3.1.a.9.1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		66.895.250,00	237.494.460,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp66.895.250,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp237.494.460,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.72
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	66.895.250,00	237.494.460,00	(170.599.210,00)	(71,83)

Mutasi Piutang Retribusi Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.73
Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	237.494.460,00	239.340.413,00
2	Penambahan	66.895.250,00	8.066.400,00
3	Pengurangan	(237.494.460,00)	(9.912.353,00)
	Saldo Akhir	66.895.250,00	237.494.460,00

Pengurang sebesar Rp237.494.460,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan TA 2021 pada Dinas Kesehatan karena kesalahan pencatatan sehingga dilakukan koreksi atas pencatatan piutang tersebut, serta ada konfirmasi dari pihak BPJS Kesehatan yang hanya membayarkan klaim yang tidak lebih dari 6 bulan dan menurut pihak BPJS Kesehatan tidak ada tagihan yang belum dibayar untuk tahun 2017-2020, sesuai dengan surat dari BPJS Kesehatan Nomor 296/VIII-07/0223 tanggal 16 Februari 2023.

5.3.1.a.9.2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		22.760.000,00	300.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.760.000,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp300.000,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.74
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.760.000,00	300.000,00	22.460.000,00	7.486,67

Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.75
Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	300.000,00	-
2	Penambahan	22.760.000,00	300.000,00
3	Pembayaran (Pengurangan)	(300.000,00)	-
	Saldo Akhir	22.760.000,00	300.000,00

5.3.1.a.9.3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
69.386.150,00 **44.702.800,00**

Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.386.150,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp44.702.800,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Bertambah/ (berkurang)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.386.150,00	44.702.800,0000	24.683.350,00	55,22

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.77
Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	44.702.800,00	51.893.700,00
2	Penambahan	31.025.517,70	11.036.500,00
3	Pembayaran (Pengurangan)	(6.342.167,70)	(18.227.400,00)
	Saldo Akhir	69.386.150,00	44.702.800,00

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 per Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78
Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 per SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	5.468.400,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	54.717.750,00
3	Badan Pendapatan Daerah	9.200.000,00
	JUMLAH	69.386.150,00



5.3.1.a.10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		1.197.053.698,02	17.886.627.834,16

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, RSUD Kuala Pembuang (BLUD), RSUD Hanau (BLUD), Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan merupakan Lain-Lain PAD yang Sah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.197.053.698,02 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp17.886.627.834,16 disajikan pada tabel berikut. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.79
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Jasa Giro	0,00	196.827.397,24	(196.827.397,24)	(100,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.449.277,10	0,00	7.449.277,10	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	424.412.467,92	493.682.467,92	(69.270.000,00)	(14,03)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	87.514,00	0,00	87.514,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.252.513,00	699.828,00	552.685,00	78,97
Pendapatan BLUD	667.896.104,00	17.099.374.805,00	(16.431.478.701,00)	(96,09)
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	95.955.822,00	96.043.336,00	(87.514,00)	(0,09)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.197.053.698,02	17.886.627.834,16	(16.689.574.136,14)	(93,31)

Dari realisasi piutang pada tabel diatas, ada penambahan piutang bunga pada Tahun Anggaran 2022, ini diakibatkan oleh adanya kebijakan Kementerian Keuangan yang telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda, dimana saldo renumerasi pada TDF-TKD sebesar Rp7.449.277,10. Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-392/WPB.18/2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

5.3.1.a.10.1	Piutang Pendapatan Jasa Giro	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		0,00	196.827.397,24

Pada tahun 2022 Piutang Pendapatan Jasa Giro melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD Kabupaten Seruyan tidak mempunyai piutang dari pendapatan jasa giro dikarenakan sebelum tanggal 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Bendahara Umum Daerah telah melakukan penarikan giro di beberapa rekening bank dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp196.827.397,24 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.80
Piutang Pendapatan Jasa Giro

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan Jasa Giro	0,00	196.827.397,24	(196.827.397,24)	(100,00)

Mutasi Piutang Pendapatan Jasa Giro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.81
Mutasi Piutang Pendapatan Jasa Giro

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	196.827.397,24	276.643.835,62
2	Penambahan	0,00	196.827.397,24
3	Pembayaran (Pengurangan)	(196.827.397,24)	(276.643.835,62)
	Saldo Akhir	0,00	196.827.397,24

5.3.1.a.10.2 Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
7.449.277,10	0,00

Pada tahun 2022 terdapat Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD Kabupaten Seruyan senilai Rp7.449.277,10 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp0,00. Pada akhir tahun 2022 Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-226/PB.3/2023 Tanggal 10 Februari 2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan merupakan dasar Pemerintah Kabupaten Seruyan mencatat kebijakan akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai renumerasi pada rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.449.277,10, Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-392/WPB.18/2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

5.3.1.a.10.3 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
424.412.467,92	493.682.467,92

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan merupakan Bagian Lancar yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp424.412.467,92 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp493.682.467,92 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.82

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	424.412.467,92	493.682.467,92	(69.270.000,00)	(14,03)

Mutasi Piutang Bagian Lancar TGR disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.83

Mutasi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	493.682.467,92	375.322.939,98
2	Penambahan	0,00	493.682.467,92
3	Pembayaran (Pengurangan)	(69.270.000,00)	(375.322.939,98)
	Saldo Akhir	424.412.467,92	493.682.467,92

5.3.1.a.10.4 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

31 Desember 2022
87.514,00

31 Desember 2021
00,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pendapatan dari denda retribusi pelayanan pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.514,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp0,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	87.514,00	0,00	87.514,00	100,00

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.85

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Penambahan	87.514,00	0,00
3	Pembayaran (Pengurangan)	0,00	0,00
	Saldo Akhir	87.514,00	0,00



5.3.1.a.10.5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		1.252.513,00	699.828,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.252.513,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp699.828,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.252.513,00	699.828,00	552.685,00	(78,97)

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.87
Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	699.828,00	787.342,00
2	Penambahan	1.252.513,00	220.682,00
3	Pembayaran (Pengurangan)	(699.828,00)	(308.196,00)
	Saldo Akhir	1.252.513,00	699.828,00

5.3.1.a.10.6	Piutang Pendapatan BLUD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		667.896.104,00	17.099.374.805,00

Pendapatan BLUD melalui RSUD Kuala Pembuang dan RSUD Hanau Kabupaten Seruyan merupakan Pendapatan BLUD yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp667.896.104,00 dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp17.099.374.805,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.88
Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan BLUD	667.896.104,00	17.099.374.805,00	(16.431.478.701,00)	(96,09)

Mutasi Piutang Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.89
Mutasi Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	17.099.374.805,00	2.646.268.000,00
2	Penambahan	661.993.747,00	
3	Koreksi tambah saldo awal piutang	0,00	100,00
4	Pembayaran (Pengurangan)	(17.093.472.448,00)	(2.647.521.310,00)
	Saldo Akhir	667.896.104,00	17.099.374.805,00

5.3.1.a.10.7 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021
95.955.822,00 96.043.336,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp95.955.822,00 dan ada saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2021 bersaldo (Rp87.514,00) sehingga dengan perbandingan tahun 2021 sebesar Rp96.043.336,00 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.90
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	95.955.822,00	96.043.336,00	(87.514,00)	(0,09)

Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	96.043.336,00	96.043.436,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Koreksi saldo awal piutang	0,00	(100,00)
4	Pembayaran (Pengurangan)	(87.514,00)	0,00
	Saldo Akhir	95.955.822,00	96.043.336,00

5.3.1.a.11. Piutang Transfer 31 Desember 2022 31 Desember 2021
12.649.584.665,88 15.229.248.721,86

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 senilai Rp12.649.584.665,88 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.229.248.721,86. Piutang Transfer berasal dari Bagi Hasil Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi hasil dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak daerah Provinsi



Kalimantan Tengah. Rincian Piutang transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.92
Daftar Rincian Piutang Transfer

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.864.434.207,43	2.840.724.373,61	(976.290.166,18)	(34,37)
2	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.459.242.453,88	3.145.583.532,08	5.313.658.921,80	168,92
3	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.228.847.122,57	7.832.384.967,12	(5.603.537.844,55)	(71,54)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.060.882,00	24.451.865,05	72.609.016,95	296,95
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.386.103.984,00	(1.386.103.984,00)	(100,00)
	Piutang Transfer	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86	(2.579.664.055,98)	(16,94)

Mutasi Piutang Transfer disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.93
Mutasi Piutang Transfer

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Awal	15.229.248.721,86	11.676.363.740,10
2	Penambahan	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86
3	Pembayaran (Pengurangan)	(15.229.248.721,86)	(11.676.363.740,10)
4	Koreksi	0,00	-
	Saldo Akhir	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86

5.3.1.a.12.	Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		44.910.000,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 senilai Rp44.910.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Piutang Lainnya berasal dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.a.13.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(2.905.935.607,91)	(3.508.424.013,51)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp2.905.935.607,91) dan (Rp3.508.424.013,51) merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan, "Penilaian Kualitas Piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik



piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya”.

Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.94
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.782.976.457,03)	(3.336.600.684,86)	553.624.227,83	(16,59)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(11.728.489,98)	(63.660.075,45)	51.931.585,47	(81,58)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	(98.234.900,83)	(108.163.253,20)	9.928.352,37	(9,18)
4	Penyisihan Piutang Transfer	(5.838.181,87)	0,00	(5.838.181,87)	100,00
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(7.135.123,20)	0,00	(7.135.123,20)	100,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	(22.455,00)	0,00	(22.455,00)	100,00
	Jumlah Penyisihan	(2.905.935.607,91)	(3.508.424.013,51)	602.488.405,60	(17,17)

Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021 Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.95
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang pada SKPD

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	(2.798.014.638,91)	(3.341.200.684,86)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(10.435.571,91)	(11.552.474,17)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(186.489.267,74)	(186.489.267,73)
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(201.796.415,65)	(201.792.149,62)
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(2.383.293.383,61)	(2.929.966.793,34)
	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(6.800.000,00)	(6.800.000,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(9.200.000,00)	(4.600.000,00)
2	Dinas Pendidikan	0,00	(546.840,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(546.840,00)
3	Dinas Kesehatan	(33.450,00)	(56.702.839,20)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(33.450,00)	(56.702.839,20)
4	Dinas Perhubungan	(96.054.716,00)	(96.043.486,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(150,00)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(96.054.716,00)	(96.043.336,00)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	(5.856.630,37)	(1.866.037,59)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.710.811,38)	(1.810.246,25)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(145.818,99)	(55.791,34)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	RSUD Kuala Pembuang (BLUD)	(327.883,65)	(4.371.541,50)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(327.883,65)	(4.371.541,50)
7	RSUD HANAU (BLUD)	(5.838.040,22)	(7.347.329,43)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.509.289,21	(7.347.329,43)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(7.347.329,43)	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(22.455,00)	
	Penyisihan Piutang Lainnya – Uang Muka	(22.455,00)	0
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	212.206,24	(345.254,93)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	(345.254,93)
	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.708.397,72	-
	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.346.405,02	-
	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.782.879,14	-
	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	500,00	-
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(5.838.181,87)	
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	212.206,23	
	Jumlah Penyisihan	(2.905.935.607,91)	(3.508.424.013,51)

5.3.1.a.14. Beban Dibayar Dimuka **31 Desember 2022**
267.838.607,52 **31 Desember 2021**
231.848.745,16

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp267.838.607,52 dan Rp231.848.745,16 merupakan Beban Dibayar Dimuka atas pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas dan atau operasional baik roda dua maupun roda empat yang dibayar pada tahun 2022 akan tetapi masa berlakunya sampai dengan tahun 2023.

5.3.1.a.15. Persediaan **31 Desember 2022**
87.307.378.974,54 **31 Desember 2021**
85.604.055.860,57

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp87.307.378.974,54 dan Rp85.604.055.860,57 merupakan nilai saldo persediaan yang dimiliki oleh SKPD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, BLUD RSUD Hanau dan Persediaan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Rincian jenis Persediaan tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.96

Persediaan

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2022	Persediaan per 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	Barang Pakai Habis	87.307.378.974,54	85.604.055.860,57	1.703.323.113,97	1,99
1	Bahan	760.517.705,20	586.819.935,75	173.697.769,45	29,60



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2022	Persediaan per 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
2	Suku Cadang	6.970.900,00	7.695.600,00	(724.700,00)	(9,42)
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.263.822.565,74	2.429.689.364,65	(165.866.798,91)	(6,83)
4	Obat Obatan	9.081.409.984,60	8.841.378.951,17	240.031.033,43	2,71
5	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	75.194.657.819,00	73.736.510.009,00	1.458.147.810,00	1,98
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga – Jaga	-	-	0,00	0,00
7	Natura dan Pakan	0,00	1.962.000,00	(1.962.000,00)	(100,00)
8	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Komponen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		87.307.378.974,54	85.604.055.860,57	1.703.323.113,97	1,99

Rincian persediaan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.97
Persediaan pada SKPD

No	SKPD	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	14.585.000,00	10.859.000,00	3.726.000,00	34,31
2	Dinas Kesehatan	5.705.309.879,31	3.615.828.831,30	2.089.481.048,01	57,79
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	1.588.624.378,22	3.221.722.746,85	(1.633.098.368,63)	(50,69)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	1.997.883.811,77	2.377.315.316,77	(379.431.505,00)	(15,96)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	74.616.428.084,00	72.962.852.722,00	1.653.575.362,00	2,27
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.469.000,00	13.146.000,00	(10.677.000,00)	(81,22)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.022.663,00	0,00	2.022.663,00	100,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	355.000,00	2.440.963,00	(2.085.963,00)	(85,46)
9	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas	3.220.800,00	3.243.350,00	(22.550,00)	(0,70)
10	Dinas Sosial	6.218.000,00	2.764.000,00	3.454.000,00	124,96
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.694.500,00	1.625.500,00	69.000,00	4,24
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	183.982.915,00	77.658.355,00	106.324.560,00	136,91



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	SKPD	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.641.000,00	14.939.500,00	(10.298.500,00)	(68,93)
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.063.000,00	2.121.000,00	(58.000,00)	(2,73)
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	865.782.082,50	1.061.368.764,00	(195.586.681,50)	(18,43)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	1.631.000,00	4.355.000,00	(2.724.000,00)	(62,55)
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persendian	1.116.000,00	586.000,00	530.000,00	90,44
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	2.130.000,00	2.763.750,00	(633.750,00)	(22,93)
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.543.000,00	2.296.250,00	246.750,00	10,75
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	710.000,00	73.100,00	636.900,00	871,27
22	Dinas Perpustakaan, Dan Kearsipan	7.385.000,00	9.908.500,00	(2.523.500,00)	(25,47)
23	Dinas Perikanan	3.645.000,00	3.730.750,00	(85.750,00)	(2,30)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.667.000,00	2.044.000,00	(377.000,00)	(18,44)
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	380.728.400,00	387.975.600,00	(7.247.200,00)	(1,87)
26	Badan Pendapatan Daerah	308.072.035,50	153.392.900,00	154.679.135,50	100,84
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.196.000,00	809.500,00	386.500,00	47,75
28	Sekretariat DPRD	62.516.981,24	189.281.424,65	(126.764.443,41)	(66,97)
29	Sekretariat Daerah	1.219.171.419,00	1.271.242.287,00	(52.070.868,00)	(4,10)
30	Inspektorat Kabupaten	29.506.750,00	15.983.000,00	13.523.750,00	84,61
31	Kecamatan Seruyan Tengah	707.000,00	2.542.000,00	(1.835.000,00)	(72,19)
32	Kecamatan Danau Sembuluh	497.000,00	854.000,00	(357.000,00)	(41,80)
33	Kecamatan Hanau	711.000,00	308.000,00	403.000,00	130,84
34	Kecamatan Seruyan Hilir	12.450.000,00	4.657.900,00	7.792.100,00	167,29
35	Kecamatan Seruyan Hulu	846.000,00	1.245.000,00	(399.000,00)	(32,05)
36	Kecamatan Batu Ampar	634.000,00	413.000,00	221.000,00	53,51
37	Kecamatan Seruyan Raya	408.000,00	444.000,00	(36.000,00)	(8,11)
38	Kecamatan Danau Seluluk	1.425.000,00	802.000,00	623.000,00	77,68
39	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Suling Tambun	444.000,00	466.000,00	(22.000,00)	(4,72)
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	269.943.675,00	177.981.250,00	91.962.425,00	51,67
JUMLAH		87.307.378.974,54	85.604.055.860,57	1.703.323.113,97	1,99



5.3.1.b.	Investasi Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		80.443.980.424,00	68.873.300.627,00

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp80.443.980.424,00 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp0,00 dan investasi Permanen sebesar Rp80.443.980.424,00. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp68.873.300.627,00 terdapat peningkatan sebesar Rp11.570.679.797,00 atau 16,80%.

Tabel 5.98
Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	80.443.980.424,00	68.873.300.627,00	11.570.679.797,00	16,80
Jumlah	80.443.980.424,00	68.873.300.627,00	11.570.679.797,00	16,80

5.3.1.b.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.b.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		80.443.980.424,00	68.873.300.627,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp80.443.980.424,00 dan Rp68.873.300.627,00. Jika dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.873.300.627,00, maka Investasi Jangka Panjang Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp11.570.679.797,00 atau 16,80%. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 merupakan investasi dalam saham pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, penyertaan saham pada PT JAMKRIDA dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	64.925.000.000,00	51.962.500.000,00	12.962.500.000,00	24,95
PT. JAMKRIDA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	12.518.980.424,00	13.910.800.627,00	(1.391.820.203,00)	(10,01)
Jumlah	80.443.980.424,00	68.873.300.627,00	11.570.679.797,00	16,80



5.3.1.c.	Aset Tetap	<u>31 Desember 2022</u> 2.664.992.574.990,09	<u>31 Desember 2021</u> 2.910.579.781.119,87
-----------------	-------------------	---	---

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.664.992.574.990,09 dan Rp2.910.579.781.119,87 merupakan saldo aset tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Aset Tetap

No	JENIS ASET	Saldo		Kenaikan/ Penurunan	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Tanah	201.272.227.716,26	201.458.424.716,26	(186.197.000,00)	(0,09)
2	Peralatan dan Mesin	507.663.213.180,63	514.226.303.872,31	(6.563.090.691,68)	(1,28)
3	Gedung dan Bangunan	957.633.320.268,76	945.497.500.064,39	12.135.820.204,37	1,28
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.117.629.265.576,59	3.045.121.811.922,39	72.507.453.654,20	2,38
5	Aset Tetap Lainnya	42.001.641.793,00	41.759.860.748,00	241.781.045,00	0,58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.011.558.945,68	116.014.427.181,68	5.997.131.764,00	5,17
7	Akumulasi Penyusutan	(2.283.218.652.490,83)	(1.953.498.547.385,16)	(329.720.105.105,67)	16,88
Jumlah		2.664.992.574.990,09	2.910.579.781.119,87	(245.587.206.129,78)	(8,44)

Dari tabel diatas aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp245.587.206.129,78 atau 8,44%. Nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.664.992.574.990,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Nilai Buku Aset Tetap

No	Jenis Aset	Saldo 31 Desember 2022	Penyusutan 31 Desember 2022	Nilai Buku
1	Tanah	201.272.227.716,26	0,00	201.272.227.716,26
2	Peralatan dan Mesin	507.663.213.180,63	339.750.324.681,44	167.912.888.499,19
3	Gedung dan Bangunan	957.633.320.268,76	185.106.902.877,00	772.526.417.391,76
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.117.629.265.576,59	1.758.361.424.932,39	1.359.267.840.644,20
5	Aset Tetap Lainnya	42.001.641.793,00	0,00	42.001.641.793,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.011.558.945,68	0,00	122.011.558.945,68
Jumlah		4.948.211.227.480,92	2.283.218.652.490,83	2.664.992.574.990,09

5.3.1.c.1.	Tanah	<u>31 Desember 2022</u> 201.272.227.716,26	<u>31 Desember 2021</u> 201.458.424.716,26
-------------------	--------------	---	---

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp201.272.227.716,26 dan Rp201.458.424.716,26 mengalami penurunan sebesar Rp186.197.000,00 atau 0,09%. Rincian penambahan dan pengurangan saldo aset tanah sebagai berikut:



Tabel 5.102
Rincian Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		201.458.424.716,26
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2022	-	
	Hibah	62.059.000,00	
	Mutasi Antar SKPD	264.481.000,00	
	Jumlah Pertambahan		326.540.000,00
3	Pengurangan		
	Mutasi Antar SKPD	264.481.000,00	
	Aset kondisi rusak berat, dalam penuluruhan dan sebab lainnya	248.256.000,00	
	Jumlah Pengurangan		512.737.000,00
4	Saldo Akhir		201.272.227.716,26

Saldo aset Tanah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 sebesar Rp201.272.227.716,26 yang berasal dari Penambahan Aset Tanah berupa hibah sebesar Rp62.059.000,00, Mutasi antar SKPD (Masuk) Sebesar Rp.264.481.000,00 dan pengurangan yang berasal dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp264.481.000,00 dan aset kondisi rusak berat, dalam penuluruhan dan sebab lainnya sebesar Rp248.256.000,00.

Pemerintah Kabupaten Seruyan masih mencatat Tanah sebanyak 796 bidang tanah. Dimana tercatat 165 bidang tanah telah bersertifikat dan 631 bidang tanah belum bersertifikat, sehubungan dengan permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan identifikasi tanah yang akan diusulkan sertifikat yang tidak termasuk dalam wilayah yang tidak termasuk dalam hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Dari hasil identifikasi tanah tersebut, terdapat 168 bidang tanah yang rencananya akan di usulkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk dilakukan sertifikasi.

Rincian mutasi Aset Tanah pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.c.2.	Peralatan Dan Mesin	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		507.663.213.180,63	514.226.303.872,31

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp507.663.213.180,63 dan Rp514.226.303.872,31 mengalami penurunan sebesar Rp6.563.090.691,68 atau 1,28% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:



Tabel 5.103
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		514.226.303.872,31
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal	47.225.334.105,96	
	Reklas/Pindah Dari Gedung Dan Bangunan	747.363.834,39	
	Reklas/Pindah Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan	796.786.523,00	
	Reklas/Pindah Dari Aset Tetap Lainnya	343.816.175,00	
	Reklasifikasi Masuk Dari Barang Jasa	667.576.500,00	
	Hibah (Masuk)	478.870.464,00	
	Mutasi Antar Skpd (Masuk)	11.507.179.473,76	
	Jumlah Pertambahan		61.766.927.076,11
3	Pengurangan		
	Reklas/Pindah Ke Gedung Dan Bangunan	2.146.452.000,00	
	Reklas/Pindah Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.920.000,00	
	Reklas/Pindah Ke Ekstra Kompatabel	3.668.036.488,85	
	Reklas/Pindah Ke Barang Dan Jasa	101.471.960,00	
	Mutasi Antar Skpd (Keluar)	11.507.179.473,76	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penuluruhan Dan Sebab Lainnya	50.901.957.845,18	
	Jumlah Pengurangan		68.330.017.767,79
4	Saldo Akhir		507.663.213.180,63

Rincian mutasi Aset Peralatan dan Mesin pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.c.3. Gedung dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
957.633.320.268,76 **945.497.500.064,39**

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp957.633.320.268,76 dan Rp945.497.500.064,39 mengalami kenaikan sebesar Rp12.135.820.204,37 atau 1,28%, dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		945.497.500.064,39
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal	31.197.695.722,00	
	Reklas/Pindah Dari Peralatan Dan Mesin	2.146.452.000,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas/Pindah Dari Gedung Dan Bangunan	128.853.240,00	
	Reklas/Pindah Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan	2.224.097.000,00	
	Reklasifikasi Masuk Dari Barang Jasa	5.597.392.039,00	
	Hibah (Masuk)	1.490.714.690,00	
	Mutasi Antar Skpd (Masuk)	5.439.855.400,00	
	Jumlah Pertambahan		48.225.060.091,00
3	Pengurangan		
	Reklas/Pindah Ke Peralatan Dan Mesin	747.363.834,39	
	Reklas/Pindah Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.280.953.999,00	
	Reklas/Pindah Ke Ekstra Kompatabel	11.499.000,00	
	Reklas/Pindah Ke Barang Dan Jasa	362.950.000,00	
	Mutasi Antar Skpd (Keluar)	5.439.855.400,00	
	Pengembalian/ Sts/Pembayaran Utang	194.416.500,00	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penuluruhan Dan Sebab Lainnya	27.052.201.153,24	
	Jumlah Pengurangan		36.089.239.886,63
4	Saldo Akhir		957.633.320.268,76

Rincian mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.c.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2022</u> 3.117.629.265.576,59	<u>31 Desember 2021</u> 3.045.121.811.922,39
-------------------	------------------------------------	---	---

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.117.629.265.576,59 dan Rp3.045.121.811.922,39 mengalami kenaikan sebesar Rp72.507.453.654,20 atau 2,38% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.045.121.811.922,39
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal	77.887.865.307,20	
	Reklasifikasi Masuk Dari Barang Jasa	5.476.504.920,00	
	Hibah (Masuk)	916.857.750,00	
	Jumlah Pertambahan		84.281.227.977,20
3	Pengurangan		
	Reklas/Pindah Ke Peralatan Dan Mesin	796.786.523,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas/Pindah Ke Gedung Dan Bangunan	2.229.950.240,00	
	Reklas/Pindah Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan	123.000.000,00	
	Reklas/Pindah Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.813.000.000,00	
	Reklas/Pindah Ke Barang Dan Jasa	44.910.000,00	
	Pengembalian/ Sts/Pembayaran Utang	5.062.044.500,00	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penuluruhan Dan Sebab Lainnya	704.083.060,00	
	Jumlah Pengurangan		11.773.774.323,00
4	Saldo Akhir		3.117.629.265.576,59

Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.c.5.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		42.001.641.793,00	41.759.860.748,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp42.001.641.793,00 dan Rp41.759.860.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp241.781.045,00 atau 0,58% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		41.759.860.748,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal	916.465.060,00	
	Reklas / Pindah Dari Peralatan Dan Mesin	4.920.000,00	
	Jumlah Pertambahan		921.385.060,00
3	Pengurangan		
	Reklas/Pindah Ke Peralatan Dan Mesin	343.816.175,00	
	Reklas/Pindah Ke Aset Tidak Berujud	199.737.840,00	
	Reklas/Pindah Ke Ekstra Kompatibel	4.590.000,00	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penuluruhan Dan Sebab Lainnya	131.460.000,00	
	Jumlah Pengurangan		679.604.015,00
4	Saldo Akhir		42.001.641.793,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



5.3.1.c.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2022 122.011.558.945,68	31 Desember 2021 116.014.427.181,68
-------------------	------------------------------------	--	--

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp122.011.558.945,68 dan Rp116.014.427.181,68 mengalami kenaikan sebesar Rp5.997.131.764,00 atau 5,17% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		116.014.427.181,68
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Dari Gedung Dan Bangunan	2.280.953.999,00	
	Reklas / Pindah Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan	2.813.000.000,00	
	Reklasifikasi Masuk Dari Barang Jasa	903.177.765,00	
	Jumlah Pertambahan		5.997.131.764,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Dari Gedung Dan Bangunan	0,00	
	Reklas / Pindah Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		122.011.558.945,68

Rincian jumlah Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan tahun pengadaan sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Tahun Pengadaan

TAHUN KDP	JUMLAH
2012	13.009.507.850,00
2013	50.481.299.000,00
2014	1.214.111.000,00
2015	998.088.000,00
2016	6.460.255.700,00
2017	9.289.795.500,00
2018	8.727.325.431,00
2019	4.232.430.975,68
2020	2.008.611.800,00
2021	19.593.001.925,00
2022	5.997.131.764,00
JUMLAH	122.011.558.945,68



Rincian mutasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.c.7.	Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		2.283.218.652.490,83	1.953.498.547.385,16

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.283.218.652.490,83 dan Rp1.953.498.547.385,16. Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	339.750.324.681,45	321.892.157.154,98	17.858.167.526,47	5,55
3	Gedung dan Bangunan	185.106.902.877,00	151.471.944.569,65	33.634.958.307,35	22,21
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.758.361.424.932,39	1.480.134.445.660,53	278.226.979.271,86	18,80
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.283.218.652.490,83	1.953.498.547.385,16	329.720.105.105,68	16,88

Rincian Mutasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.d.	Dana Cadangan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp00,00 dan Rp.00,00.

5.3.1.e.	Aset Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		117.534.604.050,02	93.662.190.557,29

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp117.534.604.050,02 dan Rp93.662.190.557,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	51.606.097.170,02	51.727.943.690,06	(121.846.520,04)	(0,24)
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Aset Tidak Berwujud	11.228.026.090,00	11.006.313.250,00	221.712.840,00	2,01
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.981.747.797,00)	(4.325.818.087,25)	(655.929.709,75)	15,16
5	Aset Lain-Lain	70.115.571.016,00	81.716.514.363,00	(11.600.943.347,00)	(14,20)
6	Penyusutan Aset Lain Lain	(41.148.159.037,00)	(46.462.762.658,52)	(5.314.603.621,52)	11,44
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.714.816.608,00	0,00	30.714.816.608,00	100,00
Jumlah		117.534.604.050,02	93.662.190.557,29	13.243.206.249,69	14,14

5.3.1.e.1.	Tagihan Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		51.606.097.170,02	51.727.943.690,06

Tagihan Jangka Panjang tahun 2022 merupakan tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi sebagaimana rincian berikut ini:

Tabel 5.111
Rincian Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan	%
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	1.701.618.475,00	1.701.618.475,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi terhadap bendahara	98.949.193,13	98.949.193,13	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara	49.805.529.501,89	49.927.376.021,93	(121.846.520,04)	(0,24)
Jumlah		51.606.097.170,02	51.727.943.690,06	(121.846.520,04)	(0,24)

5.3.1.e.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.701.618.475,00 dan Rp1.701.618.475,00.

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Peternakan

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.645.188.475,00 Saldo tagihan penjualan angsuran Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:

- Saldo tagihan penjualan angsuran ternak sebesar Rp1.035.612.655,00 merupakan pengadaan ternak yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah. Aset tagihan penjualan angsuran masih mencatat ternak yang telah dinyatakan mati sesuai Berita Acara Kematian sebesar Rp69.207.300,00 untuk permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan



Pangan dan Penyuluhan akan menindaklanjuti dengan melakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Saldo tagihan penjualan angsuran ALSINTAN sebesar Rp609.575.820,00 merupakan pengadaan alat pertanian yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan
Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.430.000,00.

5.3.1.e.1.1 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara

Saldo Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara pada Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp98.949.193,13 dan Rp98.949.193,13.

5.3.1.e.1.1 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Saldo Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp49.805.529.501,89 dan Rp49.927.376.021,93.

5.3.1.e.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.e.3.	Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		11.228.026.090,00	11.006.313.250,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp11.228.026.090,00 dan Rp11.006.313.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp221.712.840,00 atau 2,01% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		11.006.313.250,00
2	Pertambahan		
	Reklas/Pindah Dari Aset Tetap Lainnya	236.367.840,00	
	Jumlah Pertambahan		236.367.840,00
3	Pengurangan		
	Reklas/Pindah Ke Peralatan Dan Mesin	8.880.000,00	
	Penghapusan	5.775.000,00	
	Jumlah Pengurangan		14.655.000,00



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
4	Saldo Akhir		11.228.026.090,00

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.e.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u> (4.981.747.797,00)	<u>31 Desember 2021</u> (4.325.818.087,25)
------------------	---	---	---

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.981.747.797,00 dan Rp4.325.818.087,25. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud terdapat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.e.5.	Aset Lain-Lain	<u>31 Desember 2022</u> 70.115.571.016,00	<u>31 Desember 2021</u> 81.716.514.363,00
-------------------	-----------------------	--	--

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp70.115.571.016,00 dan Rp81.716.514.363,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.600.943.347,00 atau 14,20% . Penambahan dan pengurangan aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		81.716.514.363,00
2	Pertambahan		
	Hibah	180.300.000,00	
	Mutasi Antar SKPD (Masuk)	33.700.000,00	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penulsuran Dan Sebab Lainnya	79.037.958.058,42	
	Jumlah Pertambahan		79.251.958.058,42
3	Pengurangan		
	Penghapusan	90.819.201.405,42	
	Mutasi Antar SKPD (Keluar)	33.700.000,00	
	Jumlah Pengurangan		90.852.901.405,42
4	Saldo Akhir		70.115.571.016,00

Aset lain-lain adalah Aset tidak dipergunakan lagi secara aktif untuk menunjang operasional Pemerintah Daerah terdiri dari:



Tabel 5.114
Rincian Aset Lain-lain pada SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.172.506.624,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
2	Dinas Kesehatan	3.492.431.588,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
3	Rsud Kuala Pembuang	1.957.372.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	29.703.165.673,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	138.225.750,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
6	Satuan Polisi Pamong Praja	65.655.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	33.700.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.733.150,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
9	Dinas Sosial	62.445.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	144.557.100,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	60.675.400,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
12	Dinas Perhubungan	10.009.380.027,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	7.300.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian	221.575.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	503.473.290,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	157.933.150,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	70.156.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	311.385.800,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
19	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.488.816.450,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
20	Dinas Perikanan	2.292.414.685,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
21	Sekretariat Daerah	3.617.292.466,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
22	Sekretariat DPRD	1.361.440.583,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan	135.576.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	4.972.393.070,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
25	Badan Pendapatan Daerah	240.504.750,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	177.253.400,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
27	Inspektorat	25.613.300,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
28	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	61.170.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
29	Kecamatan Danau Sembuluh	994.416.700,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
30	Kecamatan Seruyan Raya	107.097.800,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
31	Kecamatan Danau Seluluk	4.000.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
32	Kecamatan Hanau	563.696.200,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
33	Kecamatan Batu Ampar	9.300.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
34	Kecamatan Seruyan Hulu	49.800.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	840.114.060,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
	JUMLAH	70.115.571.016,00	

Rincian mutasi Aset Rusak Berat pada setiap SKPD di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

5.3.1.e.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(41,148,159,037,00) **(46.462.762.658,52)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp41,148,159,037.00 dan Rp46.462.762.658,52. Rincian akumulasi penyusutan aset lain-lain terdapat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.e.7. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
30.714.816.608,00 **0,00**

Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-392/WPB.18/2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp30.714.816.608,00 dan Rp0,00. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

5.3.2. KEWAJIBAN **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
5.774.095.442,60 **23.671.598.173,87**

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.774.095.442,60 mengalami penurunan sebesar Rp17.897.502.731,27 atau 75,61% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.671.598.173,87.

Tabel 5.115
Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	5.774.095.442,60	23.671.598.173,87	(17.897.502.731,27)	(75,61)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.774.095.442,60	23.671.598.173,87	(17.897.502.731,27)	(75,61)

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		5.774.095.442,60	23.671.598.173,87

Saldo kewajiban jangka pendek tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp5.774.095.442,60 dan Rp23.671.598.173,87 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.116
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	53.099.087,97	61.305.280,08	(8.206.192,11)	(13,39)
2	Utang Belanja	5.681.385.631,63	18.309.969.393,79	(12.628.583.762,16)	(68,97)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	39.610.723,00	5.300.323.500,00	(5.260.712.777,00)	(99,25)
	Jumlah	5.774.095.442,60	23.671.598.173,87	(17.897.502.731,27)	(75,61)

5.3.2.1.a.	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		53.099.087,97	61.305.280,08

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp53.099.087,97 dan Rp61.305.280,08. Rincian pendapatan diterima di muka sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	17.149.653,30	42.696.056,08	(25.546.402,78)	(59,83)
2	Pajak Reklame Kain	18.491.671,00	12.140.864,00	6.350.807,00	52,31
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	14.539.727,00	1.208.333,33	13.331.393,67	1.103,29
4	Retribusi Pemakaian Alat	501.370,00	0,00	501.370,00	100,00
5	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	2.843.360,00	(2.843.360,00)	(100,00)
6	Pendapatan BLUD	2.416.666,67	2.416.666,67	0,00	0,00
	Jumlah	53.099.087,97	61.305.280,08	(8.206.192,11)	(13,39)



5.3.2.1.b. Utang Belanja

31 Desember 2022
5.681.385.631,63

31 Desember 2021
18.309.969.393,79

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.681.385.631,63 dan Rp18.309.969.393,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Utang Belanja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.1.6.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	52.950.691,00
2.1.6.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.807.668.224,00
2.1.6.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.642.987.440,23
2.1.6.01.05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	37.951.169,56
2.1.6.02.01	Utang Belanja Barang	5.016.432,00
2.1.6.02.02	Utang Belanja Jasa	1.111.748.674,84
2.1.6.14.04	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	23.063.000,00
TOTAL		5.681.385.631,63

Rincian utang belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Utang Belanja pada SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1.094.036.412,00
2	Dinas Kesehatan	1.015.499.791,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang (BLUD)	1.484.873.620,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau (BLUD)	914.926.552,68
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.611.495,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	121.174,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.361.845,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	184.353,0
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.585,00
10	Dinas Sosial	104.188.302,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.302.788,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	215.630,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	84.143.161,00
14	Dinas Perhubungan	25.791.982,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.048.196,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	1.655.945,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107.536.649,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	257.610,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.948.848,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	320.580,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	SKPD	Jumlah
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	304.825,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	232.138.611,00
23	Dinas Perikanan	700.900,00
24	Sekretariat Daerah	19.487.448,00
25	Sekretariat DPRD	12.863.226,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	341.570,00
27	Badan Pendapatan Daerah	307.815.275,95
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	467.510,00
29	Inspektorat	82.186,00
30	Kecamatan Seruyan Hilir	1.370.337,00
31	Kecamatan Danau Sembuluh	62.439.955,00
32	Kecamatan Hanau	87.703.024,00
33	Kecamatan Seruyan Hulu	78.877.777,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.529.153,00
35	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.926.315,00
JUMLAH		5.681.385.631,63

5.3.2.1.c. Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	39.610.723,00	5.300.323.500,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp39.610.723,00 dan Rp5.300.323.500,00.

5.3.3 EKUITAS	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	3.144.144.131.009,49	3.326.674.125.691,42

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.144.144.131.009,49, sedangkan saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.326.674.125.691,42. Terjadi penurunan sebesar Rp182.529.994.681,93 yang berasal surplus LO sebesar Rp2.445.705.724,50 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dari koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp184.975.700.406,43.

Tabel 5.120
Ekuitas

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	3.326.674.125.691,42	3.280.272.489.674,64
Surplus/(Defisit) LO	2.445.705.724,50	48.644.477.102,11
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(184.975.700.406,43)	(2.242.841.085,33)
Koreksi Ekuitas Piutang Transfer	-	-
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(184.975.700.406,43)	(2.242.841.085,33)



5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1	Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.039.155.860.530,50	1.029.771.485.020,19

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, LO menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

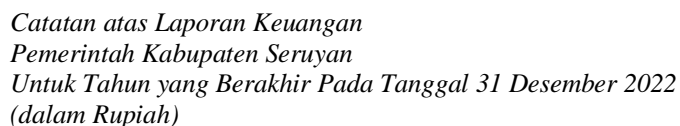
Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.039.155.860.530,50 dan Rp1.029.771.485.020,19 terdiri dari:

Tabel 5.121
Pendapatan - LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	64.704.868.576,72	98.178.598.271,46	(33.473.729.694,74)	(34,09)
Pendapatan Transfer	958.934.320.315,78	897.170.633.245,73	61.763.687.070,05	6,88
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	15.516.671.638,00	34.422.253.503,00	(18.905.581.865,00)	(54,92)
Jumlah	1.039.155.860.530,50	1.029.771.485.020,19	9.384.375.510,31	0,91

5.4.1.a.	Pendapatan Asli Daerah - LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		64.704.868.576,72	98.178.598.271,46

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp64.704.868.576,72 dan Rp98.178.598.271,46 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.122

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan Pajak Daerah	13.406.996.712,97	24.168.362.143,61	(10.761.365.430,64)	(44,53)
Pendapatan Retribusi Daerah	3.221.541.931,01	2.317.824.529,98	903.717.401,03	38,99
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.802.806.489,00	9.301.907.557,00	1.500.898.932,00	16,14
Lain-lain PAD Yang Sah	37.273.523.443,74	62.390.504.040,87	(25.116.980.597,13)	(40,26)
Jumlah	64.704.868.576,72	98.178.598.271,46	(33.473.729.694,74)	(34,09)

5.4.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO

31 Desember 2022
13.406.996.712,97

31 Desember 2021
24.168.362.143,61

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sampai dengan 31 Desember 2022, saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp13.406.996.712,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Pajak Hotel – LO	54.443.600,00	47.228.200,00	7.215.400,00	15,28
Pajak Restoran – LO	894.860.094,00	780.528.048,00	114.332.046,00	14,65
Pajak Hiburan – LO	10.587.800,00	0	10.587.800,00	100,00
Pajak Reklame – LO	200.504.316,30	149.562.675,26	50.941.641,04	34,06
Pajak Penerangan Jalan – LO	8.837.667.691,32	11.375.024.664,20	(2.537.356.972,88)	(22,31)
Pajak Air Tanah – LO	191.653.426,84	195.212.402,55	(3.558.975,71)	(1,82)
Pajak Sarang Burung Walet – LO	10.806.250,00	18.235.000,00	(7.428.750,00)	(40,74)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	952.291.732,51	1.437.023.112,10	(484.731.379,59)	(33,73)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	1.788.599.394,00	4.436.540.681,00	(2.647.941.287,00)	(59,68)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	465.582.408,00	5.729.007.360,50	(5.263.424.952,50)	(91,87)
JUMLAH	13.406.996.712,97	24.168.362.143,61	(10.761.365.430,64)	(44,53)

5.4.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

31 Desember 2022
3.221.541.931,01

31 Desember 2021
2.317.824.529,98

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan sampai dengan 31 Desember 2022, saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp3.221.541.931,01 dan Rp2.317.824.529,98 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.124
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.049.459.550,00	881.883.547,00	167.576.003,00	19,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	10.455.000,00	7.055.000,00	3.400.000,00	48,19
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	307.547.000,00	257.700.000,00	49.847.000,00	19,34
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	95.898.250,00	65.899.100,00	29.999.150,00	45,52
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	172.660.000,00	204.340.000,00	(31.680.000,00)	(15,50)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	79.995.000,00	0,00	79.995.000,00	100,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	192.774.793,00	0,00	192.774.793,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	574.582.354,03	324.297.576,67	250.284.777,36	77,18
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	3.790.000,00	(3.790.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	47.802.000,00	40.568.000,00	7.234.000,00	17,83
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	192.035.000,00	120.670.000,00	71.365.000,00	59,14
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	494.989.623,98	396.774.078,19	98.215.545,79	24,75
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	2.843.360,00	14.847.228,12	(12.003.868,12)	(80,85)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.221.541.931,01	2.317.824.529,98	903.717.401,03	38,99

5.4.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
10.802.806.489,00 **9.301.907.557,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.802.806.489,00 dan Rp9.301.907.557,00 merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Bank Kalteng dan JAMKRIDA.

Tabel 5.125
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN- JAMKRIDA	0,00	51.473.472,00	(51.473.472,00)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – Bank Kalteng	10.802.806.489,00	9.250.434.085,00	1.552.372.404,00	16,78
Jumlah	10.802.806.489,00	9.301.907.557,00	1.500.898.932,00	16,14



5.4.1.a.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
37.273.523.443,74 **62.390.504.040,87**

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp37.273.523.443,74 dan Rp62.390.504.040,87 terdiri dari:

Tabel 5.126
Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.659.728.815,00	0	1.659.728.815,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	473.320.274,57	0	473.320.274,57	100,00
Jasa Giro-LO	4.129.153.576,36	6.914.690.762,63	(2.785.537.186,27)	(40,28)
Pendapatan Bunga-LO	7.449.277,10	0	7.449.277,10	100,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	232.967.411,71	(232.967.411,71)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	81.481.046,41	2.935.037.227,93	(2.853.556.181,52)	(97,22)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.407.991,66	340.371,00	1.067.620,66	313,66
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.584.690.192,19	2.827.959.535,12	(243.269.342,93)	(8,60)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	253.504.193,45	32.173.081,00	221.331.112,45	687,94
Pendapatan dari Pengembalian-LO	716.856.932,00	122.368.015,00	594.488.917,00	485,82
Pendapatan BLUD – LO	27.366.630.973,00	49.372.136.559,33	(22.005.505.586,33)	(44,57)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	(699.828,00)	(47.168.922,85)	46.469.094,85	(98,52)
JUMLAH	37.273.523.443,74	62.390.504.040,87	(25.116.980.597,13)	(40,26)

5.4.1.b Pendapatan Transfer LO

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
958.934.320.315,78 **897.170.633.245,73**

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp958.934.320.315,78 dan untuk periode tahun 2021 terealisasi sebesar Rp897.170.633.245,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127
Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	900.018.331.487,00	850.871.006.597,00	49.147.324.890,00	5,78
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	9.687.181.000,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00	10,00
Transfer Pemerintah Provinsi	49.228.807.828,78	37.492.938.648,73	11.735.869.180,05	31,30
Jumlah	958.934.320.315,78	897.170.633.245,73	61.763.687.070,05	6,88



5.4.1.b.1 Pendapatan Transfer-Dana **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Perimbangan-LO **900.018.331.487,00** **850.871.006.597,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp900.018.331.487,00 dan untuk periode Tahun 2021 sebesar Rp850.871.006.597,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128
Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	69.566.378.292,00	81.506.618.100,00	(11.940.239.808,00)	(14,65)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	66.732.157.617,00	42.008.134.815,00	24.724.022.802,00	58,86
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	559.137.113.257,00	559.646.545.000,00	(509.431.743,00)	(0,09)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	204.582.682.321,00	167.709.708.682,00	36.872.973.639,00	21,99
Jumlah	900.018.331.487,00	850.871.006.597,00	49.147.324.890,00	5,78

5.4.1.b.1.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Khusus (DAK) Fisik-LO **69.566.378.292,00** **81.506.618.100,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.566.378.292,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp81.506.618.100,00 terdiri dari:

Tabel 5.129
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.309.653.600,00	748.721.500,00	560.932.100,00	74,92
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	10.020.634.800,00	11.000.205.489,00	(979.570.689,00)	(8,91)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	6.638.925.800,00	2.698.548.500,00	3.940.377.300,00	146,02
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	361.565.333,00	98.900.000,00	262.665.333,00	265,59
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	-	3.664.755.914,00	(3.664.755.914,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	-	14.677.407.880,00	(14.677.407.880,00)	(100,00)



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	2.106.259.092,00	995.031.117,00	1.111.227.975,00	111,68
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	798.372.450,00	1.047.196.800,00	(248.824.350,00)	(23,76)
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler – LO	-	5.279.451.000,00	(5.279.451.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan- LO	-	16.085.571.720,00	(16.085.571.720,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	-	11.491.549.400,00	(11.491.549.400,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan- LO	-	559.418.280,00	(559.418.280,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	12.384.280.000,00	-	12.384.280.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan- LO	5.734.034.500,00	5.047.934.500,00	686.100.000,00	13,59
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan- LO	4.600.821.000,00	1.965.714.000,00	2.635.107.000,00	134,05
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	12.587.696.845,00	-	12.587.696.845,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan- LO	-	3.562.965.000,00	(3.562.965.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	-	2.583.247.000,00	(2.583.247.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan Peningkatan Pencegahan- Penugasan-LO	-	-	0,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	11.243.090.200,00	-	11.243.090.200,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	733.244.672,00	-	733.244.672,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya- LO	1.047.800.000,00	-	1.047.800.000,00	100,00
Jumlah	69.566.378.292,00	81.506.618.100,00	(11.940.239.808,00)	(14,65)



5.4.1.b.1.2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	<u>31 Desember 2022</u> 66.732.157.617,00	<u>31 Desember 2021</u> 42.008.134.815,00
--------------------	---	--	--

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp66.732.157.617,00 dan Rp42.008.134.815,00 terdiri dari:

Tabel 5.130

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

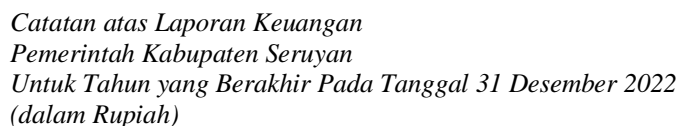
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	26.336.140.507,00	0,00	26.336.140.507,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	26.477.428.555,00	28.366.530.000,00	(1.889.101.445,00)	(6,66)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.087.287.500,00	1.592.500.000,00	(505.212.500,00)	(31,72)
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.663.974.445,00	5.637.603.000,00	26.371.445,00	0,47
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.058.467.000,00	3.225.900.000,00	(167.433.000,00)	(5,19)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	607.800.000,00	838.550.000,00	(230.750.000,00)	(27,52)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.633.627.000,00	50.132.702,00	2.583.494.298,00	5.153,31
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.673.036.113,00	(1.673.036.113,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal – LO	391.242.610,00	381.383.000,00	9.859.610,00	2,59
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LO	416.190.000,00	242.500.000,00	173.690.000,00	71,62
Jumlah	66.732.157.617,00	42.008.134.815,00	24.724.022.802,00	58,86

5.4.1.b.1.3	Dana Alokasi Umum	<u>31 Desember 2022</u> 559.137.113.257,00	<u>31 Desember 2021</u> 559.646.545.000,00
--------------------	--------------------------	---	---

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan merupakan pendapatan Transfer-LO berupa Dana Alokasi Umum-LO dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan. DAU-LO pada tahun 2022 sebesar Rp559.137.113.257,00 dan 2021 sebesar Rp559.646.545.000,00.

5.4.1.b.1.4	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) –LO	<u>31 Desember 2022</u> 204.582.682.321,00	<u>31 Desember 2021</u> 167.709.708.682,00
--------------------	---	---	---

Pendapatan dari Bagi Hasil Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp204.582.682.321,00 dan Rp167.709.708.682,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.131

Dana Bagi Hasil – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Bagi Hasil pajak	103.255.248.492,00	99.275.672.134,00	3.979.576.358,00	4,01
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	101.327.433.829,00	68.434.036.548,00	32.893.397.281,00	48,07
Jumlah	204.582.682.321,00	167.709.708.682,00	36.872.973.639,00	21,99

5.4.1.b.1.4.a Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak -LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	103.255.248.492,00	99.275.672.134,00

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 103.255.248.492,00 dan Rp99.275.672.134,00 terdiri dari:

Tabel 5.132

Bagi Hasil Pajak – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
DBH PBB-LO	67.925.886.884,00	94.023.229.734,00	(26.097.342.850,00)	(27,76)
DBH PPh Pasal 21-LO	35.271.513.608,00	5.196.928.000,00	30.074.585.608,00	578,70
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN-LO	57.848.000,00	55.514.400,00	2.333.600,00	4,20
Jumlah	103.255.248.492,00	99.275.672.134,00	3.979.576.358,00	4,01

5.4.1.b.1.4.b	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		101.327.433.829,00	68.434.036.548,00

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp101.327.433.829,00 dan Rp68.434.036.548,00 terdiri dari:

Tabel 5.133

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
DBH CHT-LO	0,00	3.120.103,00	(3.120.103,00)	(100)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	19.496.000,00	1.082.600,00	18.413.400,00	1.700,85
DBH SDA Gas Bumi-LO	184.534.000,00	111.954.409,00	72.579.591,00	64,83
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	301.701.000,00	1.061.603.250,00	(759.902.250,00)	(71,58)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	82.973.581.829,00	36.036.582.522,00	46.936.999.307,00	130,25
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	15.889.810.000,00	29.213.966.038,00	(13.324.156.038,00)	(45,61)
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	648.108.476,00	(648.108.476,00)	(100)
DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25
Jumlah	101.327.433.829,00	68.434.036.548,00	32.893.397..281,00	48,07



5.4.1.b.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	<u>31 Desember 2022</u> 9.687.181.000,00	<u>31 Desember 2021</u> 8.806.688.000,00
------------------	--	---	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Kabupaten Seruyan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.687.181.000,00 dan untuk periode tahun 2021 terealisasi sebesar Rp8.806.688.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Dana Insentif Daerah	9.687.181.000,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00	9,99
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.687.181.000,00	8.806.688.000,00	880.493.000,00	9,99

5.4.1.b.2.1	Dana Insentif Daerah (DID) – LO	<u>31 Desember 2022</u> 9.687.181.000,00	<u>31 Desember 2021</u> 8.806.688.000,00
--------------------	--	---	---

Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.687.181.000,00 dan Rp8.806.688.000,00.

5.4.1.b.2.2	Dana Desa - LO	<u>31 Desember 2022</u> 0,00	<u>31 Desember 2021</u> 0,00
--------------------	-----------------------	---	---

Pendapatan Penyesuaian Dana Desa - LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.b.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	<u>31 Desember 2022</u> 49.228.807.828,78	<u>31 Desember 2021</u> 37.492.938.648,73
------------------	---	--	--

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp49.228.807.828,78 dan untuk periode tahun 2021 terealisasi sebesar Rp37.492.938.648,73.

5.4.1.b.3.1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	<u>31 Desember 2022</u> 49.228.807.828,78	<u>31 Desember 2021</u> 37.492.938.648,73
--------------------	-----------------------------------	--	--

Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp49.228.807.828,78 dan Rp37.492.938.648,73 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.135
pendapatan Hasil – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil - LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	6.194.091.347,80	6.002.764.840,40	191.326.507,40	3,19
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.209.345.677,57	6.779.164.520,44	430.181.157,13	6,35
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	26.735.567.397,98	15.473.415.890,84	11.262.151.507,14	72,78
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	144.409.218,43	57.937.115,05	86.472.103,38	149,25
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.945.394.187,00	9.179.656.282,00	(234.262.095,00)	(2,55)
Jumlah	49.228.807.828,78	37.492.938.648,73	11.735.869.180,05	31,30

5.4.1.b.3.2	Bantuan Keuangan-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		15.516.671.638,00	34.422.253.503,00

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp15.516.671.638,00 dan Rp34.422.253.503,00 merupakan Pendapatan dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 5.136
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Hibah – LO	10.621.259.263,00	9.278.771.081,00	1.342.488.182,00	14,47
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	4.895.412.375,00	25.143.482.422,00	(20.248.070.047,00)	(80,53)
Jumlah	15.516.671.638,00	34.422.253.503,00	(18.905.581.865,00)	(54,92)

5.4.1.c.1.	Pendapatan Hibah-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		10.621.259.263,00	9.278.771.081,00

Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp10.621.259.263,00 dan Rp9.278.771.081,00 dimana rincian pendapatan hibah tersebut sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 5.137
Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah-LO	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.032.584.500,00	7.347.596.381,00	(315.011.881,00)	(4,29)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	2.609.758.013,00	1.751.309.670,00	858.448.343,00	49,02
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	978.916.750,00	179.865.030,00	799.051.720,00	444,25
Jumlah	10.621.259.263,00	9.278.771.081,00	1.342.488.182,00	14,47

5.4.1.c.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2022
4.895.412.375,00

31 Desember 2021
25.143.482.422,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp4.895.412.375,00 dan Rp25.143.482.422,00 merupakan pendapatan hibah dana BOS dan FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	20.265.142.897,00	(20.265.142.897,00)	(100)
Pendapatan Hibah Dana JKN	4.895.412.375,00	4.878.339.525,00	17.072.850,00	0,35
Jumlah	4.895.412.375,00	25.143.482.422,00	(20.248.070.047,00)	(80,53)

5.4.2 Beban

31 Desember 2022
1.033.960.754.457,00

31 Desember 2021
979.194.432.667,08

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Seruyan. Beban terdiri dari Beban Operasional, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Realisasi dalam tahun 2022 sebesar Rp1.033.960.754.457,00 dan tahun 2021 sebesar Rp979.194.432.667,08 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.139
Beban

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	359.371.179.349,68	339.763.912.399,86	19.607.266.949,82	5,77
Beban Persediaan	55.268.733.963,75	67.571.816.722,37	(12.303.082.758,62)	(18,21)
Beban Jasa	139.845.549.437,17	154.127.828.198,35	(14.282.278.761,18)	(9,27)
Beban Pemeliharaan	11.170.231.934,00	21.135.095.132,62	(9.964.863.198,62)	(47,15)
Beban Perjalanan Dinas	62.942.748.932,87	64.088.523.097,00	(1.145.774.164,13)	(1,79)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	9.822.401.560,00	0,00	9.822.401.560,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Beban Barang dan Jasa BOS	15.305.036.556,19	0,00	15.305.036.556,19	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	17.523.288.715,11	0,00	17.523.288.715,11	100,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	1.999.996.003,00	1.999.995.172,00	831,00	0,00
Beban Hibah	38.218.507.606,00	24.129.133.143,00	14.089.374.463,00	58,39
Beban Bantuan Sosial	18.173.910.800,00	2.520.000.000,00	15.653.910.800,00	621,19
Beban Penyisihan Piutang	(602.488.405,60)	400.990.985,83	(1.003.479.391,43)	(250,25)
Beban Lain-lain	3.401.826.528,89	1.992.007.946,95	1.409.818.581,94	70,77
Beban Penyusutan dan Amortisasi	226.541.010.683,94	235.217.170.846,10	(8.676.160.162,16)	(3,69)
Beban Transfer	74.978.820.792,00	66.247.959.023,00	8.730.861.769,00	13,18
Jumlah Beban	1.033.960.754.457,00	979.194.432.667,08	54.766.321.789,92	5,59

5.4.2.a.	Beban Pegawai	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		359.371.179.349,68	339.763.912.399,86

Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 tercatat sebesar Rp359.371.179.349,68 dan Rp339.763.912.399,86 dimana beban pegawai tersebut terdiri dari:

Tabel 5.140
Beban Pegawai

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	197.811.921.491,00	190.065.103.948,00	7.746.817.543,00	4,08
Beban Tambahan Penghasilan ASN	124.543.129.241,00	106.071.225.708,00	18.471.903.533,00	17,41
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.995.749.263,33	19.475.451.591,81	(14.479.702.328,48)	(74,35)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.273.808.158,00	13.734.583.378,00	(1.460.775.220,00)	(10,64)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	266.391.028,35	297.262.401,05	(308.71.372,70)	(10,39)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	712.480.000,00	(110.880.000,00)	(15,56)
Beban Pegawai BLUD	18.878.580.168,00	9.407.805.373,00	9.470.774.795,00	100,67

5.4.2.b.	Beban Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		55.268.733.963,75	67.571.816.722,37

Beban persediaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan tercatat sebesar Rp55.268.733.963,75 dan Rp67.571.816.722,37.



Rincian jenis Beban Persediaan tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141
Beban Persediaan

No	Nama Persediaan	Persediaan per 31 Des 2022
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	915.862.470,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.905.496.355,55
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.595.396.996,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	66.445.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.415.171.847,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	(7.209.800,00)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	176.166.500,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.326.392.100,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	473.002.565,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	397.458.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.350.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	200.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	302.983.790,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	630.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.687.706.237,12
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.664.025.847,29
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.147.561.814,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	564.870.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	769.889.085,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.300.899.665,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	232.929.200,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	(233.643.325,00)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	46.794.200,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	793.439.300,50
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	618.802.010,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat	4.863.360.464,20
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.222.972.132,09
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	642.151.992,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.647.952.340,00
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	63.935.400,00
31	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.027.629.319,00
32	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.263.343.340,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	278.876.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.000.000,0
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.484.969.160,00
36	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	64.702.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Nama Persediaan	Persediaan per 31 Des 2022
37	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	17.814.000,00
38	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	271.994.630,00
39	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	415.429.794,00
40	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.216.500,00
41	Beban Pakaian Penyelamatan	5.011.112.525,00
42	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	900.000,00
43	Beban Pakaian Kerja Bengkel	109.074.400,00
44	Beban Pakaian KORPRI	18.946.875,00
45	Beban Pakaian Adat Daerah	173.859.255,00
46	Beban Pakaian Batik Tradisional	418.465.550,00
47	Beban Pakaian Olahraga	886.966.140,00
48	Beban Pakaian Paskibraka	136.141.790,00
49	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	6.300.000,00
Total		55.268.733.963,75

5.4.2.c.	Beban Jasa	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		139.845.549.437,17	154.127.828.198,35

Beban Jasa merupakan beban Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp139.845.549.437,17 dan Rp154.127.828.198,35.

Rincian jenis Beban Jasa tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Beban Jasa

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Des 2022
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.575.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.544.582.500,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	17.350.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.527.000.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	19.200.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.600.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	89.000.000,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	277.500.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	15.791.700.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	25.060.907.654,68
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.411.250.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.116.595.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.121.830.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Des 2022
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	9.875.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	21.000.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	161.100.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	21.343.650.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	779.649.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Ahli	531.190.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.203.950.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.007.900.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Supir	3.003.822.500,00
24	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	459.000.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	86.700.000,00
26	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	58.200.000,00
27	Beban Jasa Tata Rias	256.888.300,00
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.037.204,00
29	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	176.361.350,00
30	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	398.700,00
31	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	282.514.000,00
32	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00
33	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	178.191.500,00
34	Beban Jasa Kalibrasi	87.103.500,00
35	Beban Jasa Pengolahan Sampah	4.168.746.000,00
36	Beban Jasa Pengukuran Tanah	37.043.511,00
37	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	31.700.000,00
38	Beban Tagihan Telepon	9.256.878,00
39	Beban Tagihan Air	453.435.326,00
40	Beban Tagihan Listrik	4.030.939.198,00
41	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.721.540.800,00
42	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.671.876.919,00
43	Beban Paket/Pengiriman	58.226.050,00
44	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	356.279.969,83
45	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	407.704.996,00
46	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	273.721.000,00
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	990.011.592,00
48	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.202.425.400,00
49	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.174.768.300,00
50	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	182.202.302,00
51	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	235.464.435,00
52	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	31.982.854,66
53	Beban Sewa Excavator	143.550.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Des 2022
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	294.124.920,00
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.500.000,00
56	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.750.000,00
57	Beban Sewa Alat Kalibrasi	15.395.000,00
58	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	25.480.000,00
59	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00
60	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	80.000.000,00
61	Beban Sewa Personal Computer	3.650.000,00
62	Beban Sewa Peralatan Mainframe	23.080.000,00
63	Beban Sewa Peralatan Jaringan	38.994.832,00
64	Beban Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00
65	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	17.000.000,00
66	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75.675.000,00
67	Beban Sewa Bangunan Terbuka	11.450.000,00
68	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	41.750.000,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.513.600,00
70	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	99.700.000,00
71	Beban Sewa Hotel	305.006.000,00
72	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00
73	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	17.700.000,00
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	13.802.250,00
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	185.052.100,00
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	95.820.750,00
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	555.823.620,00
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.879.515.755,00
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.912.750,00
80	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	52.866.045,00
81	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	90.844.000,00
82	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	7.925.000,00
83	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.976.000,00
84	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	618.686.250,00
85	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	99.345.000,00
86	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	99.386.625,00
87	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	325.000.000,00
88	Beban Sosialisasi	7.650.000,00
89	Beban Bimbingan Teknis	2.245.575.200,00
90	Beban Diklat Kepemimpinan	804.352.000,00
91	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00
Total		139.845.549.437,17



5.4.2.d. **Beban Pemeliharaan**

31 Desember 2022
11.170.231.934,00

31 Desember 2021
21.135.095.132,62

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp11.170.231.934,00 dan Rp21.135.095.132,62.

Rincian jenis Beban Pemeliharaan tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143
Beban Pemeliharaan

No	Nama Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan per 31 Des 2022
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	74.800.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	39.520.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.012.243.769,66
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.629.830.078,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	799.711.579,34
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	592.922.918,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	51.790.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.167.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	110.109.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	125.725.350,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	12.973.900,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	409.172.499,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.385.500,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	27.415.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	5.000.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	4.995.000,00
18	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	427.120.223,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	186.885.673,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.600.000,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.087.179.344,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	4.340.000,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	224.300.000,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	11.437.500,00
25	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	247.850.000,00
26	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	129.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Nama Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan per 31 Des 2022
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	626.404.000,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	199.300.000,00
29	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	199.341.000,00
30	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	863.625.000,00
31	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas	(29.912.400,00)
Total		11.170.231.934,00

5.4.2.e. **Beban Perjalanan Dinas** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
62.942.748.932,87 64.088.523.097,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp62.942.748.932,87 dan Rp64.088.523.097,00.

Tabel 5.144
Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Beban
1.	Dinas Pendidikan	4.947.994.200,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.019.237.100,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	928.757.100,00
2.	Dinas Kesehatan	4.617.445.223,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.704.675.223,00
	Beban Perjalanan Dinas Tetap	821.210.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.091.560.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.954.278.755,67
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.933.278.755,67
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.242.128.053,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.177.378.053,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.750.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	188.763.900,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.637.700,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.126.200,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	296.120.907,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	278.415.707,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.705.200,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.414.365.233,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.375.445.233,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.920.000,00
8.	Dinas Sosial	860.850.630,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	280.717.230,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Beban
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	580.133.400,00
9.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	961.826.495,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	829.697.195,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.129.300,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	610.386.432,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	548.841.032,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.795.400,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.750.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.282.685.898,20
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.893.213.800,20
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	389.472.098,00
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	806.375.341,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	531.465.191,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	274.910.150,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.544.780.951,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.297.617.761,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	247.163.190,00
14.	Dinas Perhubungan	602.240.472,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	536.440.472,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.800.000,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	874.481.281,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	873.911.281,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	570.000,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.132.230.016,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.630.424.867,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	501.805.149,00
17.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	910.957.842,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	881.486.642,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.471.200,00
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	847.536.235,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	842.601.235,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.935.000,00
19.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	384.056.390,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	240.483.282,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.573.108,00
20.	Dinas Perikanan	334.625.074,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	334.625.074,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	315.931.548,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	313.756.548,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.175.000,00
22.	Sekretariat Daerah	7.165.771.462,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.889.025.689,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Beban
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	276.745.773,00
23.	Inspektorat Daerah	2.514.735.706,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.511.202.006,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.003.533.700,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.188.453.288,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.160.372.788,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.080.500,00
25.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.006.903.714,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.902.819.814,00
	Beban Perjalanan Dinas Tetap	83.803.900,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.280.000,00
26.	Badan Pendapatan Daerah	1.721.647.254,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.547.100.297,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	137.546.957,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.000.000,00
27.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.447.405.807,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.434.376.007,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.029.800,00
28.	Sekretariat DPRD	9.002.738.216,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.002.738.216,00
29.	Kecamatan Seruyan Hilir	758.535.189,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	246.560.489,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	511.974.700,00
30.	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	188.497.249,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	119.007.249,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.490.000,00
31.	Kecamatan Danau Sembuluh	311.519.720,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	171.221.100,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.298.620,00
32.	Kecamatan Seruyan Raya	338.034.582,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	302.234.582,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.800.000,00
33.	Kecamatan Danau Seluluk	365.579.448,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	320.847.148,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.732.300,00
34.	Kecamatan Hanau	349.204.800,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	294.761.300,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.443.500,00
35.	Kecamatan Batu Ampar	436.263.908,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	419.308.908,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.955.000,00
36.	Kecamatan Seruyan Tengah	665.198.579,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	606.538.579,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.660.000,00
37.	Kecamatan Seruyan Hulu	315.405.798,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	229.485.298,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.920.500,00
38.	Kecamatan Suling Tambun	357.612.031,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	357.612.031,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	679.181.305,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	628.581.305,0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.600.000,00
Jumlah		62.942.748.932,87

5.4.2.f.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		9.822.401.560,00	0,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.822.401.560,00 dan Rp0,00.

5.4.2.g.	Beban Barang dan Jasa BOS	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		15.305.036.556,19	0,00

Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp15.305.036.556,19 dan Rp0,00.

5.4.2.h.	Beban Barang dan Jasa BLUD	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		17.523.288.715,11	0,00

Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp17.523.288.715,11 dan Rp0,00.

5.4.2.i.	Beban Bunga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Beban Bunga merupakan beban Bunga untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.j.	Beban Subsidi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.999.996.003,00	1.999.995.172,00

Beban Subsidi merupakan beban subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.999.996.003,00 dan Rp1.999.995.172,00.



5.4.2.k.	Beban Hibah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		38.218.507.606,00	24.129.133.143,00

Beban Hibah merupakan beban Hibah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp38.218.507.606,00 dan Rp24.129.133.143,00. Beban Hibah merupakan Beban Bantuan hibah barang untuk diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.145
Beban Hibah

No	SKPD	Hibah Uang	Hibah Barang	Hibah Jasa
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	15.139.217.300,00	647.142.610,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.141.217.000,00	224.708.400,00	
3	Dinas Kesehatan	249.750.000,00	0,00	
4	Dinas Sosial	174.029.500,00	-	
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.070.000.000,00	-	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	399.893.228,00	-	
7	Sekretariat Daerah	3.220.592.928,00	278.690.000,00	
8	Dinas Pendidikan	9.674.269.330,00	2.120.828.200,00	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.004.801.000,00	74.908.350,00	
10	Kecamatan Seruyan Hilir		214700000,00	
11	Kecamatan Seruyan Tengah		90.680.000,00	
13	Dinas Perikanan	0,00	493.079.760,00	
JUMLAH		18.934.552.986,00	18.636.812.010,00	647.142.610,00
Total Hibah Uang + Barang			38.218.507.606,00	

5.4.2.l.	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		18.173.910.800,00	2.520.000.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp18.173.910.800,00 dan Rp2.520.000.000,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tabel 5.146
Beban Bantuan Sosial

No	SKPD	Bantuan sosial uang	Bantuan sosial Barang	Beban bantuan sosial
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.103.708.250,00	0,00	3.103.708.250,00



No	SKPD	Bantuan sosial uang	Bantuan sosial Barang	Beban bantuan sosial
2	Dinas Sosial	1.460.700.000,00	254.363.050,00	1.715.063.050,00
3	Sekretariat Daerah	665.000.000,00	0,00	665.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	12.690.139.500,00	12.690.139.500,00
J U M L A H		5.229.408.250,00	12.944.502.550,00	18.173.910.800,00

5.4.2.m. Beban Penyisihan Piutang **31 Desember 2022**
(602.488.405,60) **31 Desember 2021**
400.990.985,83

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(602.488.405,60) dan Rp400.990.985,83. Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian beban Penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.147
Beban Penyisihan Piutang

Uraian Beban Penyisihan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	(547.786.045,96)	458.098.532,97
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	(48.614.406,42)	3.868.034,21
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	(6.110.408,22)	(60.975.581,35)
Beban Penyisihan Piutang Tansfer	22.455,00	0,00
Jumlah	(602.488.405,60)	400.990.985,83

Berdasarkan PMK No. 270/PMK.05/2014 pada Beban Penyisihan Piutang dimungkinkan bersaldo negatif. Hal ini dikarenakan adanya penurunan saldo Penyisihan Piutang yang mempengaruhi nilai Beban Penyisihan.

5.4.2.n. Beban Lain Lain **31 Desember 2022**
3.401.826.528,89 **31 Desember 2021**
1.992.007.946,95

Beban Lain-lain per 31 Desember 2022 Rp3.401.826.528,89 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.148
Beban Lain-lain

No	SKPD	Per 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	1.037.652.545,85
2	Dinas Kesehatan	142.295.597,00
3	Rsud Kuala Pembuang	94.021.470,00
4	Rsud Hanau	46.619.851,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	26.973.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.773.940.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	700.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	900.000,0



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

No	SKPD	Per 31 Desember 2022
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.424.035,04
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	29.891.730,00
11	Sekretariat Daerah	47.740.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	2.000.000,00
13	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	35.865.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	39.793.800,00
15	Inspektorat	3.156.000,00
16	Sekretariat DPRD	8.785.000,00
17	Kecamatan Seruyan Hilir	19.500.000,00
18	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	7.020.000,00
19	Kecamatan Battu Ampar	11.836.000,00
20	Kecamatan Seruyan Tengah	54.712.500,00
Jumlah		3.401.826.528,89

5.4.2.o.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>31 Desember 2022</u> 226.541.010.683,94	<u>31 Desember 2021</u> 235.217.170.846,10
-----------------	--	---	---

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp226.541.010.683,94 dan Rp235.217.170.846,10.

Rincian Beban Penyusutan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.149
Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian Beban Penyusutan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.312.625.161,94	48.610.682.688,62	2.701.942.473,32	5,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.342.557.784,00	18.035.226.856,24	307.330.927,76	1,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	156.134.063.480,00	165.341.970.444,78	(9.207.906.964,78)	(5,57)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	2.442.353.202,80	(2.442.353.202,80)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	751.764.258,00	786.937.653,66	(35.173.395,66)	(4,47)
Jumlah	226.541.010.683,94	235.217.170.846,10	(8.676.160.162,16)	(3,69)

5.4.2.p.	Beban Transfer	<u>31 Desember 2022</u> 74.978.820.792,00	<u>31 Desember 2021</u> 66.247.959.023,00
-----------------	-----------------------	--	--

Jumlah Beban Transfer pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp74.978.820.792,00 dan Rp66.247.959.023,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.150
Beban Transfer

Beban Transfer	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa	1.479.323.792,00	2.168.822.703,00	(689.498.911,00)	(31,79)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	485.000.000,00	189.112.058,00	295.887.942,00	156,46
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa	73.014.497.000,00	63.890.024.262,00	9.124.472.738,00	14,28
Jumlah	74.978.820.792,00	66.247.959.023,00	8.730.861.769,00	13,18

5.4.3	Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2022</u> (1.391.820.203,00)	<u>31 Desember 2021</u> (842.800.539,00)
--------------	---------------------------------	---	---

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp1.391.820.203,00) dan (Rp842.800.539,00).

5.4.3.a	Surplus Non Operasional	<u>31 Desember 2022</u> 0,00	<u>31 Desember 2021</u> 0,00
----------------	--------------------------------	---	---

Surplus Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan surplus dari penyertaan modal pada PDAM.

5.4.3.b	Defisit Non Operasional	<u>31 Desember 2022</u> 1.391.820.203,00	<u>31 Desember 2021</u> 842.800.539,00
----------------	--------------------------------	---	---

Defisit Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.391.820.203,00 dan Rp842.800.539,00.

5.4.4.	Pos Tak Terduga	<u>31 Desember 2022</u> (1.357.580.146,00)	<u>31 Desember 2021</u> (1.089.774.712,00)
---------------	------------------------	---	---

Pos Tak Terduga terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.357.580.146,00) dan (Rp1.089.774.712,00).

5.4.4.a	Pendapatan Tak Terduga	<u>31 Desember 2022</u> 0,00	<u>31 Desember 2021</u> 0,00
----------------	-------------------------------	---	---

Pendapatan Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



5.4.4.b	Beban Tak Terduga	<u>31 Desember 2022</u> 1.357.580.146,00	<u>31 Desember 2021</u> 1.089.774.712,00
----------------	--------------------------	---	---

Beban Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.357.580.146,00 dan Rp1.089.774.712,00. Rincian Beban Tak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.151
Rincian Beban Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan untuk santunan korban kebakaran	182.000.000,00
2	Bantuan untuk santunan uang duka	392.500.000,00
3	Bantuan berobat	375.582.710,00
4	BTT banjir	407.497.436,00
Jumlah		1.357.580.146,00

5.4.4.c	Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u> (1.357.580.146,00)	<u>31 Desember 2021</u> (1.089.774.712,00)
----------------	--	---	---

Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp1.357.580.146,00) dan (Rp1.089.774.712,00).

5.4.5.	Surplus / Defisit LO	<u>31 Desember 2022</u> 2.445.705.724,50	<u>31 Desember 2021</u> 48.644.477.102,11
---------------	-----------------------------	---	--

Surplus / Defisit LO 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.445.705.724,50 dan Rp48.644.477.102,11.

5.5 PENJELASAN AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeliran kas selama tahun 2022 dan tahun 2021 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2022</u> 200.380.243.321,24	<u>31 Desember 2021</u> 218.850.106.263,59
--------------	---	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp200.380.243.321,24 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2022.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:



Tabel 5.152
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Arus Kas Masuk	1.112.241.971.242,55	1.113.153.187.993,89	(911.216.751,34)
Arus Kas Keluar	911.861.727.921,31	894.303.081.730,30	17.558.646.191,01
Selisih	200.380.243.321,24	218.850.106.263,59	(18.469.862.942,35)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.153
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	14.379.211.257,19	23.335.087.158,77	(8.955.875.901,58)
Penerimaan Retribusi Daerah	3.126.459.134,68	2.329.982.648,19	796.476.486,49
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.802.806.489,00	9.301.907.557,00	1.500.898.932,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	54.124.554.822,92	48.069.173.944,96	6.055.380.877,96
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	967.508.351.279,00	971.033.500.596,00	(3.525.149.317,00)
Penerimaan Transfer Antar Daerah	51.808.471.884,76	33.940.053.666,97	17.868.418.217,79
Penerimaan Hibah	5.596.704.000,00	0,00	5.596.704.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.895.412.375,00	25.143.482.422,00	(20.248.070.047,00)
Jumlah	1.112.241.971.242,55	1.113.153.187.993,89	(911.216.751,34)

Perbandingan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.154
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Pengeluaran Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)
Pembayaran Pegawai	366.213.212.937,00	329.783.903.018,82	36.429.309.918,18
Pembayaran Barang dan Jasa	329.372.640.412,31	317.828.524.792,48	11.544.115.619,83
Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	1.999.996.003,00	1.999.995.172,00	831,00
Pembayaran Hibah	29.943.448.031,00	52.584.982.175,00	(22.641.534.144,00)
Pembayaran Bantuan Sosial	19.478.374.200,00	12.701.517.600,00	6.776.856.600,00
Pembayaran Tak Terduga	1.357.580.146,00	1.089.774.712,00	267.805.434,00
Pembayaran Bagi Hasil	1.479.323.792,00	2.357.934.761,00	(878.610.969,00)
Pembayaran Bantuan Keuangan	162.017.152.400,00	175.956.449.499,00	(13.939.297.099,00)
Jumlah	911.861.727.921,31	894.303.081.730,30	17.558.646.191,01



5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(172.666.235.084,20) (226.340.890.790,52)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp172.666.235.084,20) merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2022.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.155
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	(172.666.235.084,20)	(226.340.890.790,52)	(53.674.655.706,32)
Selisih	(172.666.235.084,20)	(226.340.890.790,52)	(53.674.655.706,32)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar (Rp172.666.235.084,20) digunakan untuk membiayai belanja yang terkait dengan investasi aset non keuangan, tercermin dalam Belanja Modal yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ada di SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:

Tabel 5.156
Arus Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	48.875.920.215,00	74.927.643.949,91	(26.051.723.734,91)
Belanja Gedung dan Bangunan	31.520.633.822,00	40.971.060.481,47	(9.450.426.659,47)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.887.865.307,20	96.672.379.004,14	(18.784.513.696,94)
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.419.315.740,00	807.307.355,00	612.008.385,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	0,00
JUMLAH	172.666.235.084,20	226.340.890.790,52	(53.674.655.706,32)

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
0,00 0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
0,00 0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.



Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.157
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Arus Masuk Kas	60.687.507.078,00	66.090.260.904,00	(5.402.753.826,00)
Arus Keluar Kas	60.687.507.078,00	66.090.260.904,00	(5.402.753.826,00)
Selisih	0,00	0,00	(0,00)

5.5.5. Perhitungan Akhir Kas Per 31 Desember 2022

Tabel 5.158
Perhitungan akhir Kas Per 31 Desember 2022

Perhitungan akhir Kas Per 31 Desember 2022	31 Desember 2022 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	27.714.008.237,04
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	154.189.478.543,31
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	181.903.486.780,35
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	170.205.279.326,08
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS	338.448.675,66
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	489.964.249,72
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	10.869.794.528,89
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
Kas Lainnya	0,00
Saldo Akhir Kas	181.903.486.780,35

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2022</u> 3.326.674.125.691,42	<u>31 Desember 2021</u> 3.280.272.489.674,64
--------------	---------------------	---	---

Nilai ekuitas awal tahun 2022 dan 2021 sebesar 3.326.674.125.691,42 dan Rp3.280.272.489.674,64.

5.6.2	Surplus / (Defisit) LO	<u>31 Desember 2022</u> 2.445.705.724,50	<u>31 Desember 2021</u> 48.644.477.102,11
--------------	-------------------------------	---	--

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.445.705.724,50 dan Rp48.644.477.102,11. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>31 Desember 2022</u> (184.975.700.406,43)	<u>31 Desember 2021</u> (2.242.841.085,33)
--------------	--	---	---

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar merupakan akibat dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar (Rp184.975.700.406,43) dan (Rp2.242.841.085,33).

5.6.4	Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2022</u> 3.144.144.131.009,49	<u>31 Desember 2021</u> 3.326.674.125.691,42
--------------	----------------------	---	---

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.144.144.131.009,49 dan Rp3.326.674.125.691,42.



BAB VI

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*SUBSEQUENT EVENT*)

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum, Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dimana perubahan regulasi ini mempengaruhi catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Kas setara kas / Investasi jangka pendek .

Pada akhir tahun 2022 Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dan penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-226/PB.3/2023 Tanggal 10 Februari 2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan merupakan dasar Pemerintah Kabupaten Seruyan mencatat kebijakan akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai Saldo dan Renumerasi pada rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.714.816.608.00 dan Rp7.449.277,10 dan sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur APK DJPb Nomor 67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang pada LKPD Tahun Anggaran 2022 Saldo dana TDF sebagaimana dimaksud, dicatat sebagai Investasi Jangka Pendek, sedangkan pencatatan renumerasi TDF dicatat sebagai piutang pendapatan bunga pendapatan transfer.



BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Catatan atas Laporan Keuangan ini kami sajikan untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Audited disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.


WAKIL BUPATI SERUYAN,

DR(c). Hj. ISWANTI, S.E., M. M.